

VISI & MISI

STAKEHOLDERS
PERSPECTIVE

INTERNAL BUSINESS
PROCESS PERSPECTIVE

LEARNING & GROWTH
PERSPECTIVE



2019

RENCANA STRATEGIS 2015-2019

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA



RENCANA STRATEGIS 2015-2019

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 01/B/RO/IV/2015/01

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN 2015 – 2019**

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa rencana strategis penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada periode 2015 – 2019 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian Luar Negeri yang telah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, dan program;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah mengamanatkan setiap Kementerian/ Lembaga menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Kementerian Luar Negeri telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2015 – 2019;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara 3882);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara 4012);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;
15. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 – 2019;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2015 – 2019.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Renstra Kementerian Luar Negeri Tahun 2015 – 2019 disusun sebagai acuan bagi:
- a. Penyusunan Renstra Unit Organisasi Eselon I dan Satuan Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Kementerian Luar Negeri dan Rencana Kerja setiap Unit Organisasi Eselon I dan Satuan Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Luar Negeri, serta Perwakilan Republik Indonesia;
 - c. Koordinasi Perencanaan Kegiatan antar Unit Organisasi Eselon I dan Satuan Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
 - d. Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kementerian Luar Negeri.
- KETIGA : Memerintahkan kepada seluruh Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Luar Negeri serta Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk:
- a. Menjabarkan lebih lanjut Renstra Kementerian Luar Negeri Tahun 2015 – 2019 ke dalam Rencana Strategis Unit Organisasi Eselon I, Satuan Kerja Eselon II, dan Perwakilan RI masing-masing;

b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis sekurang-kurangnya pada setiap triwulan.

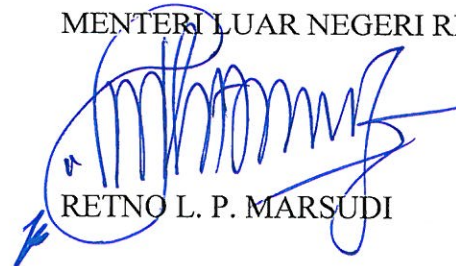
KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK 25/B/OT/V/2013/02 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK 111/B/05/2010/02 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2010 – 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 April 2015

MENTERI LUAR NEGERI RI



RETNO L. P. MARSUDI



Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmatNya, kami dapat menerbitkan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2015—2019 sebagai wujud manajemen pemerintahan efektif, transparan, dan akuntabel. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2015—2019 mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015—2019.

Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri tahun 2015—2019 menyajikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, serta kerangka pendanaan.



Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan jajaran pimpinan Kementerian Luar Negeri terhadap rumusan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri tahun 2015—2019, maka Visi Kementerian Luar Negeri Tahun 2015—2019 adalah “Terwujudnya Wibawa Diplomasi guna Memperkuat Jati Diri Bangsa sebagai Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat” dengan 3 (tiga) misi, 3 (tiga) tujuan utama, 8 (delapan) sasaran strategis, 8 (delapan) arah kebijakan dengan strategi beserta alat ukur dan targetnya. Kementerian Luar Negeri juga memiliki tekad “*Diplomasi untuk Rakyat, Diplomasi Membumi*” dalam arti kinerja Kementerian Luar Negeri tidak akan memiliki jarak dengan rakyat serta dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat.

Akhir kata, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan politik luar negeri sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia. Semoga Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri tahun 2015—2019 dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan hubungan luar negeri dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Jakarta, 6 April 2015

Menteri Luar Negeri,

RETNO L. P. MARSUDI

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2015—2019

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Kondisi Umum	1
I.2. Potensi dan Permasalahan	13
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS	23
II.1. Visi Kementerian Luar Negeri	23
II.2. Misi Kementerian Luar Negeri	23
II.3. Tujuan Kementerian Luar Negeri	28
II.4. Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri	30
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KELEMBAGAAN	35
III.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	35
III.1.1. Visi dan Misi Pembangunan Nasional	35
III.1.2. Prioritas Nasional Tahun 2015—2019	35
III.1.3. Prioritas Sub Bidang Politik Luar Negeri	37
III.1.4. Sasaran Bidang Politik Luar Negeri	46
III.1.5. Arah Kebijakan dan Strategi Politik Luar Negeri	46
III.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Luar Negeri	48
III.2.1. Arah Kebijakan Kementerian Luar Negeri	48
III.2.2. Strategi Kementerian Luar Negeri	48
III.2.3. Program Kementerian Luar Negeri	53
III.3. Kerangka Regulasi	56
III.4. Kerangka Kelembagaan	56
PENUTUP	57
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1: Kerangka Strategis Tujuan Kementerian Luar Negeri	26
Gambar 2: Peta Strategi Kementerian Luar Negeri	27
LAMPIRAN	
Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Luar Negeri	
Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi	

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Kondisi Umum

Pelaksanaan politik luar negeri RI memiliki dua aspek utama, yaitu untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional dan sebagai upaya untuk ikut berkontribusi terhadap kemaslahatan dunia internasional. Dalam kurun waktu 2010-2014, perkembangan dinamika situasi global ditandai oleh berbagai tantangan dan ancaman yang bersifat multidimensional dan kompleks. Di samping isu-isu yang bersifat tradisional, munculnya isu-isu non-tradisional dan fenomena perkembangan geopolitik serta geoekonomi, baik di tingkat global maupun regional, merupakan tantangan yang harus dihadapi dan disikapi oleh Indonesia.

Dengan merujuk pada Rencana Jangka Menengah Pembangunan Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra), Kementerian Luar Negeri selama 2010-2014 telah melaksanakan berbagai tindak prioritas bidang politik luar negeri RI dan juga program-program kerja lainnya dalam tataran bilateral, regional maupun multilateral. Berbagai aktivitas yang dilakukan ditujukan untuk memperkuat peranan Indonesia di fora internasional dengan tetap mengacu pada prinsip politik luar negeri RI yang bebas dan aktif.

Dalam kurun waktu tersebut, politik luar negeri RI yang bebas-aktif masih dijalankan dengan pendekatan *all-directions foreign policy*. Pada tataran praktis, hubungan dan kerja sama yang baik semua negara diimplementasikan dengan semangat *a million friends, zero enemy*. Pendekatan ini dipertajam dengan fokus Indonesia untuk menjadi jembatan (*bridge builder*) atas berbagai kepentingan dan posisi dalam kancah internasional, sebagai wujud kontribusi Indonesia bagi ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada tataran dunia internasional, Indonesia dipandang semakin memiliki posisi dan peranan yang penting. Di tingkat global, prakarsa dan peran Indonesia menjadi bukti pengaruh yang dimainkan, yang menjadi modal dalam penyelenggaraan diplomasi pada fora internasional. Modal ini merupakan hasil kerja keras menjawab tantangan ke depan, yakni menempatkan posisi Indonesia secara tepat atas isu-isu global dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia secara maksimal bagi kepentingan nasional.

Peran Indonesia juga diarahkan untuk menjadi *part of the solution* bagi penyelesaian masalah global. Dalam konteks tersebut, politik luar negeri RI telah terbukti memberikan peluang dalam membangun hubungan baik dengan negara-negara di dunia dan meningkatkan peranan Indonesia dalam berbagai organisasi regional dan internasional, utamanya di ASEAN, PBB, G-20, APEC, ARF, GNB, OKI, ASEM, FEALAC dan D-8. Selain itu, kebijakan luar negeri juga memprioritaskan isu-isu yang menjadi kepentingan masyarakat, antara lain isu perdamaian dunia, peningkatan kualitas perlindungan WNI di luar negeri, kerja sama selatan-selatan, lingkungan hidup, serta pemajuan demokrasi dan HAM.

Pada masa Renstra 2010-2014/RPJMN II, Kementerian Luar Negeri telah berhasil meningkatkan kerja sama internasional, menciptakan perdamaian dunia, serta mendorong terciptanya kerja sama seluruh bidang (politik, ekonomi, sosial budaya) pada hubungan bilateral, regional dan internasional.

I.1.1. Capaian RPJMN Tahun 2010—2014

Dalam RPJMN 2010-2014, terdapat 3 Prioritas Nasional yang diamanatkan kepada Kementerian Luar Negeri dengan capaian kinerja yang melampaui target nasional.

Prioritas Nasional “Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Pasca Konflik” dengan indikator “jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan maritim dan darat” telah tercapai sebesar 276,67%, dari realisasi akumulatif tahun 2010-2014 sebanyak 166 perundingan dengan target akumulatif 2010-2014 sebanyak 60 perundingan.

Prioritas Nasional “Politik, Hukum dan Keamanan” dengan indikator “jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB” telah tercapai sebesar 150% dari realisasi akumulatif tahun 2010-2014 sebanyak 30 prakarsa dengan target akumulatif 2010-2014 sebanyak 20 prakarsa.

Prioritas Nasional lainnya terkait Perlindungan WNI di luar negeri yang diukur dengan 4 indikator dalam RPJMN selama kurun 2010-2012 telah mencapai kinerja melebihi target 100%. Pada tahun 2013 dilakukan revisi indikator baru yang diimplementasikan ke dalam RPJMN 2010-2014, yaitu “Persentase permasalahan/Kasus WNI dan BHI di luar negeri yang diselesaikan” dengan capaian pada tahun 2013 lebih dari 100% (dari realisasi 57,93% dengan target 50%) dan capaian tahun 2014 sebesar 83,84% (dari realisasi 61% dengan target 55%). Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan karena IKU sebagian besar masih berorientasi pada kegiatan, proses dan setingkat *output*. Selain itu, capaian kinerja Kementerian Luar Negeri pada Prioritas Nasional 2010-2012 telah melebihi target.

Sebagai langkah kedepan atas capaian RPJMN 2010-2014, penentuan prioritas pada periode kedepan diantaranya pelaksanaan diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian masalah perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, termasuk perbatasan darat. Penyelesaian persoalan perbatasan sangat penting untuk menjaga keamanan dan integritas wilayah Indonesia.

Selain itu, dalam Reformasi Dewan Keamanan PBB, Kementerian Luar Negeri harus terus mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB, khususnya aspek yang berkenaan langsung dengan kepentingan nasional Indonesia, seperti perluasan keanggotaan DK PBB guna meningkatkan keterwakilan negara berkembang, penghapusan hak veto, serta penguatan hubungan antara DK PBB dan organ-organ PBB lainnya melalui pendekatan *intermediate approach* seraya senantiasa memperkuat upaya pendekatan dengan negara-negara kunci untuk memajukan posisi dan kepentingan nasional RI melalui perannya sebagai *bridge builder and consensus builder*. Bersama dengan hal itu, dalam hal menghadapi permasalahan/kasus WNI di luar negeri, harus terus dilakukan peningkatan kualitas perlindungan hak dan keselamatan WNI/BHI di luar negeri, khususnya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Capaian kinerja Kementerian Luar Negeri telah berkontribusi langsung terhadap pencapaian Sasaran Prioritas RPJMN 2010-2014 di bidang Politik Luar Negeri yaitu, “Pulihnya posisi penting Indonesia sebagai negara demokratis besar yang ditandai dengan keberhasilan diplomasi di fora internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional” serta pencapaian Misi Pembangunan Nasional 2010—2014 “Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang”.

I.1.2. Capaian RENSTRA Tahun 2010-2014

Dalam periode 2010-2014, Kementerian Luar Negeri telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja yang akuntabel. Tahun 2013, Kementerian Luar Negeri telah melakukan revisi Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan 6 (enam) Sasaran Strategis dan 7 (tujuh) IKU. Sasaran Strategis dan IKU Kementerian Luar Negeri telah berorientasi hasil dengan IKU yang relevan dan terukur yang setingkat *outcome* bahkan *impact*. Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan perubahan pada *setting* target yang lebih progresif dan menantang, khususnya di tahun 2013 dan 2014. Dengan adanya revisi tersebut, penjelasan dalam perbandingan kinerja dari tahun ke tahun disesuaikan dengan tingkat kualitas kinerja tersebut.

Salah satu faktor pendorong dilakukannya revisi tersebut mengingat capaian Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri telah melampaui 100%. Capaian organisasi Kementerian Luar Negeri pada tahun 2010 sebesar 94,47%, sedangkan pada tahun 2011 capaian kinerja organisasi telah mencapai 114,99% dan pada tahun 2012 telah mencapai 121,27%.

Dengan adanya Revisi Renstra tersebut, sepiantas jika dibandingkan kinerja capaian organisasi Kementerian Luar Negeri tahun 2013-2014 secara kuantitatif mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun secara kualitas, kinerja Kementerian Luar Negeri lebih akuntabel yang dibuktikan dengan semakin kecilnya deviasi realisasi anggaran (93,10%) dengan capaian kinerja organisasi (95,56%) pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2012, realisasi anggaran 81,20% dengan capaian kinerja 121,27%.

Dari capaian kinerja organisasi Kementerian Luar Negeri tahun 2013 sebesar 91,82% dan tahun 2014 sebesar 95,56% telah menunjukkan bahwa Kementerian Luar Negeri telah berhasil mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasinya yang mendukung pencapaian visi Kementerian Luar Negeri tahun 2010-2014, yaitu "Memajukan Kepentingan Nasional melalui Diplomasi Total".

I.1.3. Hubungan Bilateral

Diplomasi bilateral merupakan mekanisme penting dalam menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan negara-negara lain. Diplomasi Indonesia di kawasan ini menghasilkan berbagai capaian yang positif dalam kerja sama di berbagai bidang, yaitu ekonomi dan perdagangan, pariwisata, lingkungan hidup, pendidikan, transportasi, dan bidang prioritas lainnya yang bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia. Hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa digambarkan semakin kuat dan solid dan matang di segala bidang, dengan hasil-hasil kerja sama bilateral yang telah memberikan kontribusi positif tidak hanya bagi kemajuan hubungan Indonesia dengan negara sahabat, akan tetapi juga bagi kemajuan kerja sama di regional dan internasional.

Dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral, fokus dan prioritas program serta kegiatan politik luar negeri Indonesia antara lain mencakup kegiatan saling kunjung Kepala Negara/Pemerintahan dan *dignitaries* lainnya, saling memberi dukungan terhadap posisi negara dalam berbagai pertemuan, serta peran pro-aktif dalam inisiatif perdamaian dan kemajuan di kawasan. Fokus dan prioritas politik luar negeri juga dilakukan untuk mempertajam diplomasi ekonomi melalui optimalisasi berbagai kerja sama kemitraan strategis yang telah terbentuk dengan berbagai negara di dunia serta perluasan pasar tradisional dan non-tradisional termasuk melakukan upaya-upaya peningkatan koordinasi inter-

Kementerian/Lembaga serta pemangku kepentingan yang terkait, khususnya untuk mengoptimalkan implementasi berbagai kesepakatan yang telah ditandatangani dengan negara-negara di tataran dunia internasional.

Capaian hubungan bilateral diukur melalui beberapa indikator, yaitu: banyaknya jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi; jumlah dokumen kerja sama dan prakarsa di bidang politik dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan investasi, sosial dan budaya; negara yang mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); nilai investasi negara-negara asing; total nilai perdagangan; serta jumlah wisatawan mancanegara.

Secara umum, pada tahun 2010-2014 kinerja Kementerian Luar Negeri berhasil meningkatkan kerja sama dengan negara-negara di kawasan dan organisasi intrakawasan. Selama periode tersebut, jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi meningkat walaupun jumlah kunjungan/pertemuan cenderung fluktuatif tiap tahunnya. Capaian hubungan bilateral pada lima tahun terakhir ini terefleksikan dari banyaknya jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi yang mencapai lebih dari 403 kunjungan/pertemuan selama kurun 2010-2014, yang menunjukkan posisi strategis dan arti penting Indonesia di mata negara-negara sahabat.

Di sela-sela rangkaian *APEC Economic Leaders' Week* di Beijing bulan November 2014, misalnya, Presiden RI Joko Widodo mendapat permintaan pertemuan bilateral dari Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Meksiko Enrique Peña Nieto. Sedangkan, di sela-sela KTT G-20 di Brisbane, Australia, 14-18 November 2014, telah diselenggarakan pertemuan bilateral dengan PM Matteo Renzi (Italia), Kanselir Angela Merkel (Jerman), Presiden Hollande (Perancis), dan PM Ahmet Davutoglu (Turki).

Beberapa kunjungan yang bersifat strategis telah meningkatkan hubungan kerja sama ke tingkat yang lebih tinggi dari hubungan Kemitraan Strategis menjadi Kemitraan Komprehensif yang berarti komitmen kerja yang lebih luas dan lebih mengikat. Pada kurun waktu 2010-2014, Indonesia telah menjalin kerja sama Kemitraan Strategis dan Kemitraan Komprehensif dengan 6 (enam) negara di kawasan Amerika dan Eropa, yaitu Amerika Serikat (2010), Perancis (2011), Turki (2011), Inggris (2012), Jerman (2012) dan Belanda (2013) serta dengan Uni Eropa (2012). Sementara di kawasan Asia Pasifik, pada kurun waktu tersebut telah terjalin kemitraan strategis dengan Papua New Guinea serta peningkatan kemitraan strategis dengan Tiongkok menjadi "*Comprehensive Strategic Partner*" pada Oktober 2013.

Selain itu pada tataran kerja sama bilateral, jumlah dokumen kerja sama yang disepakati selama kurun 2010-2014 mencapai 533 dokumen kerja sama. Dokumen tersebut memiliki arti penting bagi kepentingan nasional Indonesia, misalnya penandatanganan perjanjian delimitasi batas maritim ZEE RI – Filipina, perjanjian kerja sama intelijen RI-Australia, perjanjian penempatan dan perlindungan TKI sektor domestik RI-Arab Saudi, *Letter of Intent* (LoI) kerja sama penanganan *Transnational Crime* dengan Amerika Serikat, *Plan of Action* (PoA) 5 tahun kerja sama RI-Kanada, Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Menlu RI dengan Menlu AS mengenai Kerja Sama Selatan-Selatan dan *Triangular*, serta Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Menhut RI-Menlu AS untuk "Konservasi Satwa Liar dan Penanggulangan Perdagangan Ilegal Satwa Liar".

Sementara dalam bidang ekonomi, terjadi peningkatan nilai investasi asing yang mencapai USD 28.527,3 juta pada tahun 2014; nilai perdagangan yang mencapai USD 354.472 juta pada tahun 2014; dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia yang mencapai 9.435.411 wisman pada tahun 2014.

I.1.4. Kerja Sama Regional

Dalam rangka menunjang kepentingan nasional di berbagai bidang dan dalam upaya untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, Indonesia juga telah berperan aktif dalam berbagai bidang kerja sama di fora regional, termasuk ASEAN, APEC, FEALAC, Asia Cooperation Dialogue (ACD), Asia Middle-East Dialogue (AMED), New Asian-African Strategic Partnership (NAASP), Southwest Pacific Dialogue (SwPD), dan Indian Ocean Rim Association (IORA).

Pada tahun 2013, Indonesia kembali menjadi tuan rumah dan ketua APEC setelah sebelumnya pernah mengemban peran yang sama di tahun 1994. Puncak pelaksanaan APEC 2013 adalah saat Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Bali, bulan Oktober 2013 yang menghasilkan 2 (dua) dokumen utama. Selain itu, peran Indonesia sebagai tuan rumah pada pelaksanaan *The 6th FEALAC Foreign Ministers Meeting* di Bali, bulan Juni 2013 juga menandakan peningkatan hubungan kerja sama Indonesia di kawasan Asia Timur dan Amerika Selatan. Dalam kedua kesempatan tersebut, telah diadakan pertemuan-pertemuan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara mitra.

Sebagai bagian dari lingkaran konsentris yang pertama dari kebijakan luar negeri, Pemerintah Indonesia menempatkan ASEAN sebagai soko guru atau pilar utama politik luar negeri Indonesia dengan berupaya terus berpartisipasi aktif dalam kerja sama ASEAN di bidang politik-keamanan, ekonomi, sosial budaya dan pembangunan. Sebagai sokoguru politik luar negeri Indonesia, ASEAN menjadi prioritas utama bagi kebijakan luar negeri Indonesia yang didasarkan atas visi "Melalui penguatan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama ASEAN, ikut mendorong proses integrasi Komunitas ASEAN 2015 yang memberikan manfaat bagi Indonesia yang mandiri, maju, bersatu, demokratis, aman, adil, makmur dan sejahtera." Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa dari 611 langkah aksi yang ada dalam Cetak Biru Masyarakat ASEAN terdapat 539 langkah aksi yang telah diimplementasikan oleh ASEAN dan Indonesia sampai dengan tahun 2014.

Kontribusi konkrit Kementerian Luar Negeri pada tahun 2014 untuk mendukung peran penting Indonesia dalam mempertahankan dan memelihara perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan adalah melalui peran aktifnya dalam mendorong penyelesaian masalah Laut Tiongkok Selatan melalui mekanisme regional dan instrumen *Declaration on the Conduct (DoC) of Parties in the South China Sea* dan *Code of Conduct (CoC) in The South China Sea*. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga telah berhasil mendorong ratifikasi *ASEAN Agreement on Trans-Boundary Haze Pollution* (AATHP) melalui UU No. 26 tahun 2014. Bersamaan dengan itu, dalam konteks pembentukan Masyarakat ASEAN 2015, Kementerian Luar Negeri terus berperan aktif dan memberikan kontribusi konkrit dalam mewujudkan pencapaian Masyarakat ASEAN 2015 serta ASEAN pasca-2015 melalui rekomendasi yang dituangkan dalam elemen-elemen pokok ASEAN *Community's Post 2015 Vision* serta melalui sosialisasi Masyarakat ASEAN.

Bukti peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN juga dapat dilihat dari semakin banyaknya peran dan kontribusi Indonesia dalam penyelesaian berbagai isu strategis dan menonjol di ASEAN sepanjang tahun 2010-2014. Prakarsa pembentukan *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation* (AIPR) oleh Indonesia telah direalisasikan oleh seluruh negara anggota ASEAN dan saat ini Sekretariat AIPR berkedudukan di Jakarta. Di bidang HAM, Indonesia juga telah memprakarsai pembentukan Badan HAM ASEAN (*ASEAN Intergovernmental Committee on Human Rights/AICHR*). Tahun 2012, ketika timbul keraguan mengenai kesamaan pandangan ASEAN mengenai Laut Tiongkok Selatan, Indonesia bergerak melalui *shuttle diplomacy* selama 36 jam untuk mengkonsolidasikan posisi ASEAN sesuai *six-point principles*. Tahun 2013, kesediaan

RRT memulai konsultasi formal pembentukan “*code of conduct*” di tahun 2013, tidak lepas dari peran aktif Indonesia dalam mendorong diselesaikannya dokumen tersebut sebagai acuan utama dalam pengelolaan masalah Laut Tiongkok Selatan. Gagasan Indonesia mengenai *Indo-Pacific Treaty*, yaitu *treaty* yang mencakup kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas dan bertujuan untuk menciptakan kawasan yang memiliki *mutual trust and confidence* telah mendapat *endorsement* dari para Kepala Negara ASEAN di tahun 2014. Keketuaan Myanmar di tahun 2014 juga tidak terlepas dari peran Indonesia yang pada masa keketuaannya di tahun 2011 mampu meyakinkan berbagai negara bahwa Myanmar telah menjadi negara yang demokratis dan mampu menjadi Ketua ASEAN.

Pada masa keketuaan Indonesia di ASEAN 2011, Indonesia juga telah berhasil mendorong masuknya Amerika Serikat dan Rusia untuk bergabung dengan *East Asia Summit*. Terkait upaya pengembangan hubungan eksternal ASEAN, Indonesia mengusulkan adanya kemitraan yang lebih sejajar dan saling menguntungkan antara ASEAN dengan mitra wicaranya, maupun dengan pihak eksternal lainnya (*Second Generation Partnership*). Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Masyarakat ASEAN, Indonesia mengusulkan elemen-elemen pokok ASEAN Community’s Post 2015 Vision yang menjadi dasar penyusunan Visi Masyarakat ASEAN Pasca 2015.

Di bidang kerja sama ekonomi ASEAN, Indonesia mengggagas dibentuknya *ASEAN Framework on Equitable Economic Development* (AFEED) dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). AFEED yakni prinsip-prinsip pedoman untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan *inclusive* yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar negara anggota ASEAN. RCEP merupakan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif di bidang perdagangan, jasa, investasi dan bidang ekonomi lainnya, dengan 6 (enam) Negara Mitra Wicara (Australia, India, Jepang, Republik Korea, dan RRT, serta Selandia Baru) ASEAN yang mengedepankan *common best practices* (prinsip *open regionalism*) dan *mutually beneficial cooperation*. Pada kerja sama sosial budaya, Indonesia mengggagas penyusunan *Declaration on ASEAN Unity in Cultural Diversity: Towards Strengthening ASEAN Community*. Indonesia juga terlibat secara aktif dalam kerja sama penanggulangan bencana alam di ASEAN. Hal ini dibuktikan melalui pembentukan *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management* (AHA Centre) di Jakarta.

I.1.5. Kerja Sama Multilateral

Bukti peningkatan diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral secara umum dapat dilihat dari beberapa capaian kinerja dalam kurun waktu tahun 2010-2014, antara lain sebagai berikut:

Pada Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-69 yang berlangsung di New York, tanggal 21 Oktober 2014, Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan HAM, dengan perolehan 152 suara. Bersama India, Bangladesh, dan Qatar, Indonesia akan kembali berpartisipasi aktif di Dewan HAM untuk periode 2015-2017 mewakili wilayah Asia dalam upaya promosi, pemajuan, dan perlindungan HAM di tingkat global. Terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB merupakan suatu bukti nyata kepercayaan masyarakat internasional terhadap upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM, konsolidasi demokrasi Indonesia yang makin menguat, serta dukungan terhadap pemerintahan Indonesia yang baru.

- 1) Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB. Pada 2010-2014, Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2011-2014 (perolehan suara 184 dari 191 negara), dan 2015-2019 (perolehan 152 suara). Terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM, tidak saja memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dan menentukan arah pembahasan suatu isu, tetapi juga secara langsung memperjuangkan kepentingan nasional, termasuk memagari kedaulatan NKRI.
- 2) Dialog Interaktif Pemerintah Indonesia dengan *Treaty Bodies* HAM PBB. Kementerian Luar Negeri telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan dan pembahasan implementasi instrumen HAM internasional, di mana Indonesia menjadi Negara Pihak, antara lain:
 - ❖ Pembahasan Laporan Periodik Gabungan ke-6 dan ke-7 pada tanggal 11 Juli 2012 di New York, Sidang ke-52 Komite *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).
 - ❖ Pembahasan Laporan Inisial dan Periodik Pertama Indonesia sebagai Negara Pihak *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) pada Sidang Komite Hak Sipil dan Politik PBB (CCPR) pada tanggal 10-11 Juli 2013 di Jenewa.
 - ❖ Dialog interaktif antara Pemri dengan Komite *Convention on the Rights of the Child* (CRC) PBB, pada Sidang Sesi ke-66 pada tanggal 5 Juni 2014 di Jenewa.
- 3) Kontribusi Indonesia di misi pemeliharaan perdamaian PBB. Jumlah personel Indonesia yang berpartisipasi dalam berbagai UN PKO (sesuai data *United Nations Department of Peacekeeping Operations* per 31 Desember 2014) adalah sejumlah 1.844 personel, yang menempatkan Indonesia di urutan ke-16 dari 122 *Troops/Police Contributing Countries* (T/PCC). Pasukan tersebut bertugas di 9 (sembilan) misi pemeliharaan perdamaian PBB di 6 (enam) negara, yaitu: MINUSTAH (Haiti); MONUSCO (Republik Demokratik Kongo); UNAMID (Darfur, Sudan); UNIFIL (Lebanon); UNMIL (Liberia); UNMISS (Sudan Selatan), MINURSO (Sahara Barat), MINUSCA (Afrika Tengah), dan UNISFA (Abyei, Sudan). Sesuai dengan amanat Konstitusi dan instruksi Presiden RI, Pemerintah Indonesia akan terus meningkatkan partisipasinya dalam UN PKO sebagai *net contributor* dari perdamaian dunia. Visi Indonesia dalam hal ini adalah mewujudkan penggelaran 4.000 *Indonesian Peacekeepers* pada tahun 2019, yang diharapkan menempatkan Indonesia masuk ke dalam peringkat sepuluh besar penyumbang pasukan (*Troop/Police Contributing Countries*) di UN PKO.
- 4) Upaya Indonesia dalam Mendorong Reformasi Dewan Keamanan (DK) PBB. Mendorong Reformasi Dewan Keamanan (DK) PBB merupakan salah satu prioritas nasional Indonesia selama periode 2010-2014. Selama periode tersebut, Pemerintah Indonesia melalui inisiatif-inisiatifnya terus menyuarakan perlunya DK PBB yang lebih transparan, representatif, akuntabel, dan demokratis. Pemerintah Indonesia juga terus mendorong *intermediate approach* guna menjembatani perbedaan posisi yang cukup tajam antara negara-negara kunci, termasuk dengan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
- 5) Gagasan Indonesia pada *First Annual Session Peace Building Commission*. *First Annual Session Peace Building Commission* (PBC) yang terlaksana pada tanggal 23 Juni 2014 merupakan gagasan Indonesia, melalui modalitas (yang juga disusun oleh Indonesia) yang disahkan secara konsensus pada bulan Desember 2013. Melalui pelaksanaan *Annual Session* PBC tersebut, Indonesia membagi pengalaman dan mempromosikan berbagai bantuan kerja sama teknik dan *capacity building* di bawah kerangka bilateral dan Kerja Sama Selatan-Selatan dan *Triangular* kepada sesama negara berkembang.

- 6) Proses Ratifikasi Konvensi Minamata untuk Merkuri. Selama tahun 2010-2014, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam perumusan Konvensi Minamata untuk mencegah penggunaan Merkuri. Rangkaian *Intergovernmental Negotiating Committee* (INC) untuk menyiapkan *legally binding instrument* untuk Merkuri telah dimulai sejak tahun 2010. Pada tahun 2013, INC ke-5 berhasil menyepakati *legally binding instrument* untuk Merkuri dengan mengesahkan Konvensi Minamata untuk Merkuri. Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang telah melakukan penandatanganan Konvensi dan *Final Act* tersebut pada *Diplomatic Conference* Konvensi Minamata pada tanggal 10 Oktober 2013. Setelah disepakatinya naskah konvensi, pada November 2014 pertemuan *Intergovernmental Negotiating Committee* ke-6 masih terus dilanjutkan untuk membahas *supplementary document* pada konvensi Minamata. Konvensi Minamata telah ditandatangani oleh 128 negara dan diratifikasi oleh 8 negara. Pada pertemuan INC ke-6 tersebut, pemerintah telah menyampaikan perkembangan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk penambang emas berskala kecil yang berpedoman pada artikel 7 dan *annex C* Konvensi Minamata. Sebagai upaya untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup, pemerintah telah memiliki komitmen untuk melakukan pelarangan penggunaan Merkuri. Indonesia saat ini tengah berupaya menempuh langkah proses menuju ratifikasi Konvensi Minamata menjadi undang-undang.

I.1.6. Penguatan Diplomasi Publik

Peningkatan citra Indonesia di mata publik domestik dan internasional dilakukan melalui serangkaian komunikasi efektif atas perkembangan-perkembangan dan pelaksanaan politik luar negeri kepada publik di dalam negeri, menyerap masukan dan aspirasi publik di dalam negeri, mempromosikan citra Indonesia di luar negeri dan aktif menggalang koordinasi dengan kalangan pemangku kepentingan. Beberapa sarana komunikasi tersebut dapat dilakukan melalui rangkaian kegiatan di antaranya *Presidential Friends of Indonesia*, *Interfaith Dialogue and Empowering the Moderates*, *Indonesian Arts and Culture Scholarship* (Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia-BSBI) dan *Indonesian Channel*, *Outstanding Student for the World*, *Public Diplomacy Campaign*, Duta Belia, *Updates from the Region*, *Diplomatic Gathering*, *Public Lecture*, Pelayanan Publik, Promosi dan *Community Outreach* MKAA (Museum Konferensi Asia Afrika), Terbitan Tabloid Diplomasi, dan *Bali Democracy Forum* (BDF).

Sejak dimulainya Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) pada tahun 2003, jumlah total peserta yang mengikuti BSBI hingga tahun 2014 mencapai sebanyak 588 peserta.

Peningkatan jumlah partisipan program mencerminkan semakin meningkatnya ketertarikan masyarakat di negara sahabat akan budaya Indonesia. Pada gilirannya, para penerima beasiswa BSBI tersebut dapat menjadi aset untuk mempromosikan Indonesia di negara masing-masing.

Sejak tahun 2004, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Agama RI telah melakukan serangkaian dialog lintas agama (DLA), baik pada tingkat bilateral, regional maupun multilateral. Pada tingkat multilateral, Indonesia telah aktif dalam berbagai forum DLA, a.l. melalui *The Non-Aligned Movement (NAM) Interfaith Dialogue* dan *United Nations Alliance of Civilization* (UNAOC). Pada Agustus 2014, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan *The 6th Global Forum of UNAOC* atas capaian Indonesia yang dinilai tepat untuk menggambarkan kehidupan antar umat beragama dalam kerangka mencari solusi berbagai tantangan global, serta latar belakang Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim

terbesar menjadi daya tarik tersendiri dalam pembahasan menjembatani berbagai perbedaan, seperti dunia Barat dan dunia Islam.

Dialog Lintas Agama merupakan kegiatan *soft power* yang banyak menarik minat negara-negara sahabat untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mengedepankan sikap toleransi dan saling memahami antar sesama umat beragama dan antar peradaban. Upaya pro-aktif Indonesia ini ditargetkan untuk melawan *stereotype* negatif tentang Islam yang berkembang di Barat di mana terdapat anggapan bahwa Islam berada dibalik berbagai aksi terorisme.

Selain itu, Dialog Lintas Agama dimanfaatkan untuk menampilkan Indonesia sebagai negara multikultur yang hidup bertoleransi dan harmoni, sekaligus memberikan kontribusi demi terciptanya "*harmony among civilizations*". Kegiatan DLA melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu tokoh agama, masyarakat madani, akademisi, media, dan generasi muda. Melalui dialog lintas agama yang akan dilakukan, Indonesia dapat saling bertukar pengalaman dengan negara mitra mengenai pluralitas dan harmoni antar peradaban, serta diharapkan akan tercipta berbagai kerja sama di bidang dialog lintas agama.

Sejak dicanangkan pada 2004, telah terjalin kerja sama Dialog Lintas Agama pada tingkat bilateral dengan 25 negara, di antaranya yaitu Amerika Serikat, Belanda, Bulgaria, Ethiopia, Italia, Jerman, Kanada, Lebanon, Polandia, Serbia, Uni Eropa, Vatikan, Chile, Argentina, dan Pakistan.

Indonesia merupakan inisiator *Bali Democracy Forum* (BDF) yang diciptakan guna membantu mewujudkan terbentuknya tata bangun demokrasi di kawasan melalui praktik *sharing of experiences and best practices* dengan menganut prinsip-prinsip persamaan, saling pengertian dan menghargai.

Untuk mendiseminasikan informasi dan menjalin jejaring kerja serta mendapatkan dukungan kalangan *stakeholders* muda (pelajar dan mahasiswa) mengenai pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia, Kementerian Luar Negeri secara rutin melaksanakan *public outreach* program, seperti kuliah umum di dalam dan luar negeri, sosialisasi, *open house*, serta penerimaan kunjungan ke Kementerian Luar Negeri.

Sementara itu, peningkatan citra Indonesia dapat digambarkan melalui peningkatan pengunjung *website* Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan kebijakan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara di dunia. Sejak 2009, portal situs Kementerian Luar Negeri terus menunjukkan peningkatan, baik dari sisi penambahan aplikasi bagi administrator maupun pengunjung. Hal ini ditambah pula dengan tautan media sosial yang menjadikan diseminasi informasi portal situs Kementerian Luar Negeri menjadi semakin luas menjangkau berbagai kalangan.

Di awal 2014, selain pengunjung portal situs Kementerian Luar Negeri naik secara rata-rata, yaitu 61,3 persen, pengunjung baru juga terus mengalami kenaikan dengan total kunjungan lebih dari satu juta kali di pertengahan 2014. Selain itu, media sosial Kementerian Luar Negeri juga semakin digemari oleh pengunjung dengan total 15.400 pengikut *twitter* dan 13.163 *fans page facebook* Kementerian Luar Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa publik tertarik mengikuti secara dekat diplomasi RI di kancah dunia. Dengan portal tersebut, Kementerian Luar Negeri mencoba membawa publik lebih dekat kepada dunia diplomasi di segala bidang.

Dalam lingkup kerja sama teknik, hingga September 2014, Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan berbagai program peningkatan kapasitas untuk negara-negara berkembang di wilayah Afrika, Timur Tengah, Asia dan Pasifik, serta beberapa negara di wilayah Amerika. Tercatat sebanyak 72 program/kegiatan peningkatan kapasitas telah diselenggarakan bekerja sama dengan berbagai mitra pelaksana. Kegiatan tersebut telah diikuti oleh 63 negara, dengan

jumlah peserta 1251 orang. Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa jumlah permintaan kerja sama teknik meningkat dari 187 permintaan pada tahun 2013 menjadi 303 permintaan dari 42 negara pada tahun 2014, sehingga terjadi peningkatan presentase permintaan bantuan sebesar 62%. Sementara itu, turut terjadi peningkatan penyelenggaraan kegiatan triangular dari 5 kegiatan di tahun 2013 menjadi 9 kegiatan di tahun 2014.

Di samping itu, dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS), Indonesia telah memberikan bantuan teknik bagi negara-negara penerima melalui kegiatan pelatihan, pengiriman ahli, lokakarya, pemagangan dan pemberian bantuan peralatan baik yang dibiayai oleh APBN maupun atas kerja sama berbagai mitra pembangunan lainnya. Setiap tahun mengalami peningkatan, tidak hanya jumlah peserta, tapi juga jumlah negara dan kegiatannya. Seperti diketahui bahwa peningkatan kapasitas dalam kerangka KSS ini adalah merupakan alat dalam diplomasi ekonomi. Dengan kerja sama teknik memiliki ruang besar dan kesempatan mempromosikan produk dan pasar investasi Indonesia sekaligus membangun jembatan antara para pelaku bisnis terkait. Sejak program ini mulai pada 2006, telah menyelenggarakan 56 program bagi 1.014 peserta dari 52 negara di bidang penguatan pangan, pembangunan sosial, makroekonomi, infrastruktur, pemberdayaan perempuan, kebencanaan, pengembangan UKM, dsb.

Secara khusus, sesuai amanat UUD 1945 untuk mendukung tercapainya ketertiban dan perdamaian dunia, Indonesia secara konsisten memberikan dukungan dan bantuan kepada Palestina untuk mewujudkan Palestina yang merdeka, mandiri dan sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Dalam kaitan ini, Indonesia mendukung penuh keanggotaan Palestina di berbagai forum internasional, seperti di PBB dan UNESCO. Dalam upaya mendukung pembangunan Palestina, Indonesia telah berkomitmen untuk melatih 1000 orang Palestina selama 5 tahun (2008-2013) dalam kerangka *New Asian African Strategic Partnership* (NAASP).

Selain itu, Indonesia secara konsisten juga berperan aktif dalam upaya internasional membantu pembangunan Palestina, seperti di UNESCO, UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency*), dan OIC (*Organization of The Islamic Cooperation*). Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan pemerintah Jepang, juga telah menyelenggarakan *Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development* (CEAPAD) yang kedua pada Maret 2014 dan telah berhasil menggalang bantuan untuk Palestina dari negara-negara di kawasan Asia Timur dan berbagai organisasi internasional. Tercatat hingga Desember 2014, sebanyak 1.311 orang Palestina telah menerima manfaat dalam berbagai kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan Indonesia untuk Palestina dalam berbagai bidang.

1.1.7. Diplomasi Perbatasan

Diplomasi perbatasan (*border diplomacy*) adalah suatu bentuk pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka penetapan (delimitasi) dan penegasan (demarkasi) batas serta kerjasama internasional dalam penanganan permasalahan dan pengelolaan batas negara di ketiga matra wilayah laut, darat, dan udara. Upaya penetapan batas wilayah negara yang dilakukan oleh Pemerintah RI merupakan suatu perintah konstitusional serta diselenggarakan sesuai dengan hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.

Penyelesaian penetapan perbatasan Indonesia sendiri merupakan prioritas Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004–2014. Komitmen tersebut diwujudkan dengan cara melaksanakan perundingan delimitasi batas maritim serta demarkasi batas darat dengan negara-negara yang memiliki perbatasan langsung dengan Indonesia. Terdapat sepuluh negara yang

memiliki perbatasan maritim dengan Indonesia yakni Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam, serta perbatasan darat dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Penetapan batas darat dengan Papua Nugini telah selesai dilakukan, sedangkan penetapan perbatasan dengan Malaysia dan Timor Leste sebagian besar telah dilaksanakan.

Penyelesaian masalah perbatasan sulit diukur secara kuantitatif karena menyangkut aspek hukum, politis, teknis dan kepentingan nasional masing-masing negara. Oleh karena itu, hal yang dianggap paling signifikan dalam mengukur tingkat kemajuan penyelesaian masalah perbatasan tersebut adalah banyaknya perundingan perbatasan yang telah dilakukan. Pengukuran demikian dilakukan mengingat dikarenakan untuk dapat menyelenggarakan perundingan diperlukan kesepakatan dan kesediaan kedua belah pihak, sehingga dibutuhkan suatu kinerja diplomasi melalui langkah pendekatan diplomatik untuk bisa mengajak negara mitra memulai dan/atau melanjutkan perundingan. Selain itu, mengingat adanya aspek kebijakan politik masing-masing negara dalam penyelenggaraan perundingan perbatasan, disamping aspek hukum dan teknis, kinerja pelaksanaan hubungan luar negeri dapat pula diukur dari jumlah perundingan perbatasan yang telah dapat diselenggarakan.

Dalam hal ini dapat disampaikan bahwa sepanjang tahun 2014 saja, Indonesia telah melakukan 31 kali perundingan dari target 12 kali perundingan. Sementara itu dari sekian banyak perundingan yang telah dilaksanakan dalam periode 2010-2014, telah terdapat 4 Perjanjian terkait Perbatasan Indonesia dengan negara tetangga yang terdiri dari 2 perjanjian terkait penetapan batas maritim, yaitu Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura tahun 2013; dan Persetujuan Penetapan Batas ZEE RI-Filipina, 1 perjanjian batas darat, yaitu *Addendum No. 1 to the Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on The Land Boundary* tahun 2013 dan 1 perjanjian pengaturan perbatasan, yaitu *Basic Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea on Border Arrangements* tahun 2013.

Penyelesaian persoalan perbatasan sangat penting untuk demi menjaga keamanan dan integritas wilayah Indonesia. Selain itu, berlarut-larutnya permasalahan di wilayah perbatasan dapat berdampak negatif terhadap hubungan diplomatik negara bertetangga dan dampaknya seringkali dirasakan langsung oleh penduduk di kawasan tersebut. Oleh karena itu, upaya penetapan perbatasan perlu terus dilaksanakan.

I.1.8. Pelayanan dan Perlindungan Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia

Selama periode 2010 - 2014 permasalahan yang dihadapi warga negara Indonesia di luar negeri semakin kompleks dan beragam variannya yang membutuhkan perhatian dan peran negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan secara lebih menyeluruh, tepat dan optimal. Sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, Kementerian Luar Negeri senantiasa berkomitmen untuk terus memperkuat upaya perlindungan WNI dan BHI di luar negeri dengan prinsip keberpihakan dan kepedulian serta melalui tiga pendekatan yang saling terkait: pencegahan, deteksi dini dan penanganan tanggap cepat. Sepanjang tahun 2014 (data berjalan 31 Desember 2014), Kementerian Luar Negeri bersama dengan berbagai Perwakilan RI di luar negeri telah menangani sebanyak 16.184 kasus, dimana 11.804 kasus diantaranya telah berhasil diselesaikan dan 4.380 kasus masih dalam penyelesaian.

Secara umum angka kasus dalam lima tahun mengalami *trend* penurunan, sebagai hasil upaya pencegahan dan koordinasi yang semakin baik antara pemangku kepentingan. Sebagian besar kasus-kasus yang ditangani merupakan kasus ketenagakerjaan dan keimigrasian yang menimpa TKI di luar negeri. Namun di samping kasus-kasus tradisional tersebut, terdapat sejumlah isu perlindungan yang menjadi perhatian publik sepanjang tahun 2014 dan turut masuk dalam agenda penanganan Kementerian Luar Negeri, di antaranya masalah WNI *overstayers* di Arab Saudi dan Malaysia, repatriasi WNI dari Suriah, kecelakaan pesawat dan kapal laut, bencana alam, penyebaran wabah penyakit, kurir narkoba serta kasus-kasus WNI di luar negeri yang terancam hukuman mati.

I.1.9. Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah telah mencanangkan program Reformasi Birokrasi (RB) melalui *Grand Design* RB Nasional 2010 – 2025 (Perpres No. 81 Tahun 2010). Program ini dijabarkan melalui *Road Map* RB lima tahunan yang pada tahap awal dilakukan untuk periode 2010 – 2014 (PermenPAN dan RB No. 20 Tahun 2010), meliputi 8 area perubahan (Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana/*E-Government*, Penataan Sistem Manajemen dan SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) ditambah 1 pokja Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan untuk menjamin agar pelaksanaan RB dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Mengawali kepesertaan dalam RB Nasional, Kementerian Luar Negeri mengusung 5 program *Quick Wins* (QW) sebagai program pengungkit untuk mendorong perubahan-perubahan yang lebih besar. Kelima program QW tersebut adalah 1) Portal *Treaty Room*, 2) Sistem Informasi WNI dan BHI, 3) Sistem Informasi Terpadu Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, 4) Sistem Rekrutmen Pegawai Kementerian Luar Negeri, dan 5) Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG).

Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga melakukan upaya penguatan *e-government* seperti implementasi program *e-dispo* dan *e-procurement* di lingkungan Sekretariat Jenderal; peluncuran fasilitas penanganan aspirasi secara elektronik dan *online*; pelayanan internal organisasi yang bersifat *one-desk service* dan terakhir pengembangan *e-perjadin*. Untuk meningkatkan efisiensi hubungan kerja dan koordinasi Pusat dengan Perwakilan, Kementerian Luar Negeri telah membangun dan menerapkan koordinasi melalui *video conference* guna membahas berbagai isu penting yang memerlukan penyamaan persepsi dan langkah tindak lanjut.

Pada tahun 2014, Kementerian Luar Negeri telah mencanangkan Zona Integritas sekaligus menandatangani komitmen pengendalian gratifikasi. Semua Eselon I telah menandatangani pakta integritas dengan diikuti oleh seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri. Bersamaan dengan itu, Kementerian Luar Negeri juga telah meluncurkan *whistle blowing system online*. Upaya serupa juga akan terus dilakukan pada area perubahan lainnya, sehingga proses Reformasi Birokrasi dapat terus berkelanjutan untuk menjadikan Kementerian Luar Negeri yang lebih baik, akuntabel, profesional dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Kementerian Luar Negeri berkomitmen secara penuh untuk melakukan percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Dalam rangka mewujudkan kualitas pengelolaan keuangan yang baik, Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk selalu menindaklanjuti temuan dan menjalankan berbagai rekomendasi positif BPK atas Pengelolaan Keuangan Negara di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Atas upaya Kementerian Luar Negeri dalam mengelola Keuangan secara transparan dan

akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ada, maka predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK atas Laporan Keuangan telah dapat diraih Kementerian Luar Negeri secara berturut-turut sejak 2011-2013.

Sejak 2009-2013, nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri terus mengalami peningkatan. Tahun 2014, nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Luar Negeri meningkat dengan raihan predikat “B” (Baik) dengan nilai 65,27 dari predikat “CC” (cukup baik). Prestasi tersebut dicapai atas upaya bersama oleh seluruh Unit Organisasi dan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang terus melakukan langkah progresif dan konkrit dalam menggerakkan dan mendorong seluruh komponen di lingkungan Kementerian Luar Negeri untuk menjalankan rencana aksi perbaikan akuntabilitas kinerja.

Sebagai langkah strategis untuk menjaga dan meningkatkan prestasi akuntabilitas kinerja di tahun-tahun berikutnya, Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk melakukan peningkatan kualitas perencanaan kinerja dan keselarasan kinerja, penyempurnaan indikator kinerja dan penentuan target kinerja, melakukan evaluasi kinerja secara periodik, menerapkan *reward and punishment* atas kinerja yang dicapai, serta meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja. Upaya tersebut telah didukung dengan implementasi komitmen pada level pimpinan dan seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri.

I.2. Potensi dan Permasalahan

Pada tataran dunia internasional, Indonesia dipandang semakin memiliki posisi dan peranan yang penting. Di tingkat global, prakarsa dan peran Indonesia menjadi bukti pengaruh yang dimainkan, yang menjadi modal dalam penyelenggaraan diplomasi pada fora internasional. Modal ini merupakan hasil kerja keras menjawab tantangan ke depan, yakni menempatkan posisi Indonesia secara tepat atas isu-isu global dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia secara maksimal bagi kepentingan nasional.

Selain itu, perubahan dinamika konstelasi ekonomi politik global menuntut perhatian untuk lebih berperan aktif dalam politik dan hubungan luar negeri Indonesia baik di tingkat regional maupun global. Optimalisasi diplomasi dilakukan dengan memaknai secara positif berbagai peluang yang menguntungkan bagi kepentingan nasional yang muncul dari perspektif baru dalam hubungan internasional yang dinamis. Peran dan kepemimpinan Indonesia akan semakin penting dalam kerja sama ASEAN, dalam pemeliharaan perdamaian dunia, kerja sama selatan-selatan, peningkatan kualitas perlindungan WNI di luar negeri, serta pemajuan HAM dan demokrasi.

Perubahan ekonomi politik global turut juga menuntut peran aktif dalam pengelolaan hubungan ekonomi dalam kerja sama internasional. Diplomasi ekonomi menjadi salah satu instrumen penting bagi Indonesia dalam mewujudkan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia, sehingga kemampuan dalam berdiplomasi ekonomi merupakan hal yang krusial.

I.2.1. Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kerja Sama ASEAN

ASEAN merupakan salah satu soko guru dan lingkaran konsentrik terdekat politik luar negeri Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara pemrakarsa dan pendiri ASEAN yang berpandangan bahwa kestabilan dan kemakmuran kawasan akan sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia baik secara politik, keamanan, ekonomi maupun sosial budaya. Dalam lima tahun terakhir, seiring dengan kerja sama ASEAN yang semakin meningkat di tengah tantangan

dan peluang dinamika kawasan dan global, ASEAN tetap berkomitmen mewujudkan Masyarakat ASEAN 2015 dan selanjutnya.

Sebagai organisasi regional, kiprah ASEAN semakin diakui oleh negara-negara sahabat dan organisasi internasional. Hal itu merupakan buah dari komitmen tinggi negara anggota ASEAN termasuk di dalamnya peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Kepemimpinan tersebut merupakan refleksi postur dan visi Indonesia dalam pergaulan internasional. Dalam lima tahun ke depan, peran dan kepemimpinan Indonesia perlu diperkuat sejalan dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi di kawasan, baik dalam penanganan isu-isu yang mengemuka maupun dalam upaya meraup keuntungan dari peluang yang ditawarkan oleh ASEAN.

Isu-isu tradisional seperti tumpang tindih klaim di Laut Tiongkok Selatan, sengketa perbatasan, dan ketegangan Semenanjung Korea serta isu non-tradisional seperti kerja sama maritim, kejahatan lintas batas negara, perlindungan hak asasi manusia termasuk perlindungan pekerja migran dan *good governance* merupakan isu-isu politik dan keamanan yang akan terus menjadi perhatian Indonesia di ASEAN. Indonesia juga akan terus mengelola diplomasi kerja sama ekonomi ASEAN. Agenda menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN dihadapkan pada tantangan upaya memperkecil kesenjangan pembangunan baik di antara negara anggota ASEAN maupun dengan negara mitra, dan merampungkan komitmen integrasi ekonomi ASEAN di tengah proliferasi *Free Trade Agreement* (FTA). Di bidang sosial dan budaya, perlu terus dipupuk semangat *caring and sharing society* di ASEAN untuk mencapai kohesivitas dan identitas bersama menuju suatu Masyarakat ASEAN yang *people centered*.

Upaya mewujudkan Masyarakat ASEAN yang berdimensi global tidak lepas dari kerja sama ASEAN dengan mitra wicara ASEAN mengingat postur dan kepentingan mitra wicara dimaksud di kawasan. Meningkatnya perhatian negara mitra wicara ASEAN terhadap kawasan dapat terlihat, antara lain, melalui *Asian-US Pivot Policy*, *India Look and Act East Policy*, *China's 2+7 Cooperation Framework*, *Australia's "6+2+N"*, *Japan's Proactive Contribution to Peace*, dan upaya penciptaan suatu arsitektur regional baru dalam konteks kerja sama *East Asia Summit*. Hal tersebut memunculkan nuansa dinamika baru dalam kerja sama di kawasan yang antara lain dan utamanya berupa *trust deficit* yang masih terjadi di kawasan. Berbagai kepentingan mitra wicara dimaksud berpotensi mengancam kepentingan dan kepemimpinan ASEAN (*ASEAN centrality*) termasuk di dalam kawasannya sendiri. Karena itu, kepemimpinan Indonesia di ASEAN menjadi semakin relevan mengingat Indonesia telah dianggap sebagai *natural leader* dari ASEAN.

Untuk memperkuat peran dan kepemimpinan ASEAN dalam menghadapi tantangan-tantangan dimaksud, maka dalam lima tahun ke depan Indonesia perlu terus memantapkan kepemimpinannya di ASEAN dan menentukan arah ASEAN ke depan. Keberhasilan kepemimpinan Indonesia di ASEAN tersebut juga akan sangat tergantung pada upaya menindaklanjuti komitmen Indonesia di ASEAN ke dalam dukungan domestik melalui regulasi, kelembagaan, program/kegiatan dan anggaran.

I.2.2. Peran Indonesia dalam Kerja Sama Global

Indonesia perlu memperkuat peran dalam kerja sama global dan regional untuk membangun saling pengertian, memajukan demokrasi dan HAM, perdamaian dunia, meningkatkan Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS), dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan ruang bagi berjalan efektifnya proses pembangunan di Indonesia demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Keberhasilan proses konsolidasi demokrasi di dalam negeri, serta upaya-upaya yang dilakukan Indonesia selama ini untuk mempromosikan dan memajukan demokrasi telah mendapatkan apresiasi dan pengakuan dunia internasional. Selama ini Indonesia sudah melakukan promosi demokrasi dan HAM di tingkat regional dan multilateral, misalnya melalui penyelenggaraan *Bali Democracy Forum* (BDF), kontribusi Indonesia dalam pembentukan ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR), dan melalui kontribusi sebagai anggota Dewan HAM PBB. Negara-negara Timur Tengah dan ASEAN telah membuka ruang kerja sama untuk saling berbagi pengalaman terkait dengan pelaksanaan demokrasi. Dengan potensi tersebut, Indonesia dapat lebih berperan memajukan demokrasi pada tingkat regional dan global.

Lebih lanjut, fakta yang ada saat ini menunjukkan masih tingginya potensi konflik *interstate*, dan adanya *trust deficit* di kawasan. Masyarakat Internasional memiliki ekspektasi peran, kontribusi dan partisipasinya dalam upaya menjaga perdamaian dunia, baik di kawasan maupun di level yang lebih luas. Upaya ini terkait erat dengan kepentingan nasional karena *peace and stability* di kawasan adalah prasyarat mutlak untuk dapat melaksanakan pembangunan di dalam negeri.

Indonesia selama ini telah menjadi negara netral dan dipercaya para pihak untuk meredam konflik di Laut Tiongkok Selatan yang sangat penting bagi stabilitas dan keamanan Asia Pasifik. Saling klaim wilayah, serta potensi sumber daya alam yang dikandung di wilayah Laut Tiongkok Selatan menjadi isu pertarungan negara Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Tiongkok, yang dalam 5 tahun ke depan masih berpotensi menimbulkan ketegangan di kawasan.

Dalam konteks global, situasi Timur Tengah diperkirakan masih akan ditandai dengan berbagai ketegangan dan kekerasan sebagai dampak gelombang demokratisasi, dan hubungan antarnegara yang kurang harmoni. Peran Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB tentu perlu ditingkatkan melalui upaya meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, menemukan solusi untuk mengatasi kendala pengiriman pasukan perdamaian, menyusun *road map* pencapaian target *peace keepers*, sehingga target 10 besar sebagai penyumbang pasukan perdamaian dapat tercapai.

Tidak dapat dipungkiri bahwa isu kejahatan terorganisir lintas negara merupakan masalah global yang dapat mengancam umat manusia. Isu kejahatan ini seperti pencucian uang, penyelundupan manusia, kejahatan *cyber*, *trafficking in persons*, penyelundupan senjata dan narkoba, menjadi salah satu persoalan yang dapat mengancam stabilitas kawasan, khususnya mengancam pembangunan nasional Indonesia.

Pengalaman selama ini menunjukan bahwa dalam kerja sama global dan regional sulit untuk mencapai kesepakatan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan tersebut pada tataran multilateral, dan situasi ini berdampak pada belum tercapainya kerangka instrumen internasional penanganan kejahatan lintas negara yang komprehensif di bawah payung PBB. Meskipun demikian, Indonesia perlu terus mengupayakan kerja sama penanganan kejahatan lintas negara, baik pada tingkat regional maupun global, bahkan bilateral khususnya dengan negara-negara yang terkait langsung.

Dalam isu *irregular migration/people smuggling* dan *trafficking in persons*, Indonesia harus terus mendorong dan memperkuat kerja sama penanganan antara negara pengirim, negara transit, negara tujuan imigran. Isu *irregular migration/people smuggling* berpotensi membawa dampak buruk terutama bagi masyarakat Indonesia di daerah transit, dan berpotensi membawa hubungan yang tidak harmonis antarnegara. Kepentingan ketiga negara pengirim, transit, dan

tujuan dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kerja sama. Dengan demikian, kerugian yang dialami oleh masing-masing negara dapat diminimalkan dan potensi konflik ketiga negara dapat dihindarkan.

Terorisme global merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan negara. Kelompok teroris memiliki kapasitas dan jejaring internasional, menggunakan kemajuan teknologi komunikasi dan informatika, bahan peledak dan transportasi untuk mendukung keberhasilan aksi terorisme di dunia. Penguatan pencegahan dan penindakan terorisme melalui peningkatan kerja sama internasional menjadi suatu keniscayaan. Negara-negara perlu bersatu menghadapi ancaman terorisme tersebut mengingat ancaman terorisme bersifat laten, dan tidak berpola. Kesiapsiagaan setiap saat perlu dilakukan dalam menghadapi ancaman dan aksi terorisme.

Dalam isu perubahan iklim, Indonesia perlu selalu konsisten dengan peran aktif dan konstruktif untuk mendorong negara-negara agar lebih fleksibel dalam mengupayakan kompromi, dengan tidak mengorbankan kepentingan nasional, khususnya kepentingan negara berkembang. Hal ini penting untuk mendorong keberhasilan mencapai *legally binding outcome*, seperti yang dimandatkan oleh *Bali Action Plan*.

Melanjutkan peran Indonesia selama ini dalam merumuskan arah agenda pembangunan global selama ini, Indonesia menyadari pentingnya upaya mengintensifkan kerja sama internasional dalam mengatasi masalah-masalah global seperti perubahan iklim, penyebaran penyakit. Dalam hal ini, Indonesia tidak cukup hanya menjadi peserta, melainkan perlu memainkan peran kepemimpinan dalam mengawal agenda pembangunan global, sejalan dengan kebijakan pembangunan di dalam negeri.

Dalam bidang perlucutan senjata, tantangan bagi Indonesia untuk terus mendorong pemberlakuan *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty* (CTBT), serta memperjuangkan universalisasi traktat dan pemberlakuannya. Tantangan bagi Indonesia pula untuk mendorong 8 negara Annex 2 lainnya untuk melakukan hal yang sama.

Indonesia perlu terus menyatakan sikap bahwa dunia perlu memperkuat multilateralisme, khususnya dalam memelihara peran sentral PBB. “Indonesia menyatakan agar PBB tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan global dan terus dapat menjunjung multilateralisme. Hasil akhir dari reformasi tersebut, harus menjadikan proses pembuatan keputusan PBB menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan inklusif. Kerja sama dan kemitraan antara-PBB dengan organisasi regional merupakan keniscayaan. Indonesia juga menegaskan bahwa harus ada sinergi antara upaya-upaya di tingkat global dengan upaya di tingkat regional

I.2.3. Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri

Terlepas dari amanat konstitusi dan perundang-undangan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi WNI dan BHI di luar negeri, isu perlindungan masih menjadi prioritas utama Pemerintah RI dalam hal ini kebijakan luar negeri dan diplomasi RI. Jumlah WNI yang berada di luar negeri tercatat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada akhir 2011 tercatat sekitar 3 juta WNI tersebar di seluruh dunia dan meningkat menjadi 4 juta lebih pada 2014. Diperkirakan jumlah riil WNI di luar negeri mencapai dua hingga tiga kali lipat dari angka tersebut dimana sekitar 60% merupakan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang didominasi oleh TKI sektor domestik. Dalam menghadapi tingginya jumlah dan kompleksitas penanganan kasus-kasus WNI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri juga dihadapkan pada tingginya ekspektasi publik di dalam negeri untuk dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi semua WNI. Tingginya

sorotan publik dan sensitivitas isu perlindungan mendesak Pemerintah untuk memberikan perlindungan lebih jauh dari normatif perlindungan hukum dan konsuleran, secara cepat, tepat dan akuntabel.

Tantangan berikutnya dalam pengelolaan isu perlindungan antara lain masih adanya legislasi nasional di bidang migrasi tenaga kerja yang tumpang tindih sehingga menimbulkan duplikasi dan inkonsistensi dalam tatanan implementasi perlindungan WNI serta perbedaan cara pandang antara instansi pemangku kebijakan. Hal ini marak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan komersial sehingga menyulitkan posisi Pemerintah RI. Selain itu masih minimnya pemahaman publik mengenai pentingnya proses migrasi aman. Belum optimalnya penanganan perlindungan WNI di luar negeri antara lain juga terkendala limitasi sumber daya Perwakilan RI yang tidak seimbang dengan luas wilayah kerja dan jumlah kasus yang ditangani. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, Kementerian Luar Negeri membangun sistem penanganan kasus WNI di luar negeri melalui penguatan strategi perlindungan, antara lain dengan penguatan sistem kelembagaan, penguatan diplomasi perlindungan dan *grand design* penyelesaian kasus. Penguatan koordinasi dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan terkait merupakan suatu keniscayaan sebagai bagian dari upaya pencegahan. Sebagai contoh, upaya Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI mendorong penetapan kebijakan moratorium penempatan TKI sektor domestik secara menyeluruh terutama di Timur Tengah serta pembenahan pada sektor-sektor lainnya telah mendapat dukungan Kemenaker dan BNP2TKI dan diharapkan dapat ditetapkan dalam waktu dekat.

1.2.4. Peran Indonesia dalam Diplomasi Ekonomi

Diplomasi Indonesia di berbagai forum ekonomi selama ini memperlihatkan bahwa penekanan yang berbeda pada aspek politik atau aspek ekonomi menghasilkan keputusan yang berbeda, sehingga perlu upaya untuk menyeimbangkan antara kedua aspek tersebut agar keduanya dapat berjalan seiring dan saling mendukung. Semakin kuatnya diplomasi ekonomi yang dilakukan pada gilirannya dapat berperan dalam upaya keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (*middle income trap*).

Di samping itu, Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G-20. Indonesia berperan aktif dalam upaya penanganan krisis ekonomi global dan mendorong reformasi tata kelola ekonomi dunia. Oleh karena itu, posisi sebagai anggota G-20 perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Diplomasi Indonesia di G-20 perlu memperkuat kepentingan ekonomi nasional yang dalam lima tahun ke depan ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas atau *“growth with equity”*. Pertumbuhan ini akan dilakukan melalui strategi investasi perdagangan, peningkatan daya saing, *financial inclusion* dan produktivitas. Diplomasi Indonesia untuk mendukung *“quality growth”* atau *“growth with equity”* ini sejalan dengan kepentingan negara berkembang.

Peluncuran *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-19 pada keketuaan Indonesia tahun 2011, telah membuka peluang pasar bersama terbesar di dunia karena berpopulasi separuh jumlah penduduk dunia. RCEP ditujukan sebagai suatu upaya memperkuat ketahanan ekonomi kawasan yang berlandaskan semangat kemitraan dan saling menguntungkan antara negara ASEAN dan negara mitranya. RCEP juga dibentuk agar ASEAN dapat menjadi *key driver* dalam pengembangan arsitektur kawasan yang bersifat ASEAN-*minded* dengan tetap mengutamakan pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Tantangan bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan ASEAN dan tentu kepentingan ekonomi nasional yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Pertarungan politik global ditandai dengan pertarungan penguasaan pangan dan energi. Krisis pangan dan energi dunia dan kelangkaan air berdampak pada peningkatan harga pangan dunia, arus impor dan ekspor pangan dalam jumlah besar. Hal lain, rawan pangan dan energi menyebabkan terjadinya kompetisi penyediaan energi dan pangan menjadi alat negosiasi baru di dunia internasional (aturan main dalam rezim internasional). Dalam bidang perdagangan, sejumlah negara menerapkan strategi hambatan non-tarif untuk melindungi harga dan pasokan pangan dalam negerinya. Dalam lima tahun ke depan, diplomasi politik dan diplomasi ekonomi harus berjalan seiring untuk melindungi kepentingan nasional atas pangan dan energi.

Diplomasi ekonomi Indonesia juga perlu dilakukan dalam bidang perbankan, terutama untuk membantu perbankan nasional melakukan ekspansi ke negara-negara tetangga terdekat. Selama ini, perbankan nasional mengalami kesulitan dan hambatan perizinan dari pemerintah setempat. Situasi ini sangat berbeda dengan kemudahan sejumlah bank komersial dari negara anggota ASEAN yang memiliki lebih banyak kantor cabang di Indonesia daripada di negara asalnya.

Dalam konteks kerja sama bilateral, diplomasi ekonomi Indonesia perlu juga mengacu kepada kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Kerja sama kemitraan strategis yang telah dibangun perlu dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan nasional Indonesia.

Sejalan dengan aspirasi Indonesia sebagai negara maritim, diplomasi ekonomi juga perlu untuk digalakkan di forum *Indian Ocean Rim Association* (IORA). Kerja sama perekonomian dengan sejumlah negara anggota IORA memiliki potensi yang besar dan telah mendapatkan perhatian dalam Komunike Perth tahun 2013. Ke depan kerja sama maritim komprehensif melalui IORA perlu didorong mengingat potensi sumbangannya bagi kepentingan nasional Indonesia.

1.2.5. Kerja sama Selatan Selatan dan *Triangular* (KSST)

Salah satu permasalahan dalam diplomasi Indonesia melalui bantuan teknik adalah belum adanya desain nasional yang komprehensif untuk menjamin sinergi antara berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS). Indonesia juga belum mempunyai entitas yang kuat untuk menangani KSS yang mampu melaksanakan koordinasi secara terpadu. Sebagai perbandingan, Thailand, Malaysia, Turki, Chili, Korea, dan Jepang telah memiliki entitas yang cukup kuat dan solid dalam penanganan KSS. Selain itu, tantangan ke depan adalah pentingnya untuk mengidentifikasi potensi keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia serta menetapkan prioritas bidang-bidang kerja sama dalam kerangka KSS. Indonesia juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan keberadaan *South-South Centers of Excellence* seperti *Non Aligned Movement for South-South Technical Cooperation* untuk pelaksanaan program KSS Indonesia.

Terkait dengan perubahan pergeseran dalam karakter dan orientasi hubungan antara negara maju dan berkembang, terdapat kecenderungan pada negara-negara maju menempatkan negara berkembang tidak lagi sebagai klien, tetapi sebagai mitra setara. Dalam situasi demikian posisi Indonesia sebagai negara berkembang akan semakin sulit untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari negara maju terhadap KSS dalam bentuk *triangular cooperation*. Indonesia dituntut untuk lebih kreatif dalam mendesain program-program KSS-nya dengan memperhatikan keinginan pihak donor tanpa perlu mengorbankan kepentingan negara berkembang.

Indonesia telah menjadi *Middle Income Country* yang diharapkan memberikan kontribusi bagi negara lain melalui kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan *Triangular* (KSST).

Sesungguhnya, Indonesia telah banyak memberikan kontribusi bagi negara lain, baik bantuan fisik maupun non fisik berupa *capacity building*, namun belum terkoordinasi dengan baik di antara kementerian/lembaga. Pembentukan Tim Koordinasi Nasional KSST merupakan jawaban untuk merespon persoalan koordinasi dimaksud.

Peningkatan peran Indonesia dalam KSST memerlukan formulasi kebijakan Kerja sama Selatan-Selatan yang terintegrasi agar kontribusi yang diberikan tidak hanya menjadi *charity*, dan memperjuangkan kepentingan sesama negara selatan-selatan dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan sejajar dan saling menguntungkan, melainkan menjadi investasi politik dan instrumen diplomasi Indonesia, termasuk dalam mendorong diplomasi ekonomi tanpa menghilangkan esensi solidaritas sesama negara berkembang.

I.2.6. Pemajuan Demokrasi dan HAM

Terkait masalah demokrasi dan HAM, pada tahun 2006 setelah reformasi bergulir selama delapan tahun, Indonesia mendapat predikat *free* dari *Freedom House*, lembaga pemantau rating kebebasan politik yang menjadi rujukan dunia. Predikat *free* merupakan capaian tertinggi dari tiga indikator demokrasi: *free*, *partly free*, dan *not free*, yang diukur dari terpenuhinya komponen hak-hak politik (*political rights*) dan kebebasan sipil (*civil liberties*). Namun, predikat praktek demokrasi Indonesia justru melorot menjadi *partly free* pada 2014.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah nyata seperti menjaga keberlanjutan *Bali Democracy Forum* sebagai forum *sharing of experience* dan *best practice* demokrasi di Kawasan, terlepas dari pergantian pemerintahan. Selain itu, masih muncul perhatian khusus dari dunia internasional terhadap isu demokrasi dan HAM di Indonesia, seperti terkait kasus Papua dan kebebasan berkeyakinan. Disisi lain, pemerintah dipandang perlu merumuskan strategi diplomasi untuk memajukan demokrasi dan HAM di level Kawasan (ASEAN) dan internasional yang sekaligus mampu mendorong konsolidasi demokrasi dan penguatan penegakan HAM di dalam negeri;

I.2.7. Diplomasi Perbatasan

Secara umum, terdapat sejumlah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan diplomasi perbatasan. Adanya ketidakjelasan batas antarnegara telah menyebabkan kerancuan dalam menerapkan hukum nasional negara mana yang berlaku di lapangan sehingga memicu kebingungan aparat negara dalam melaksanakan upaya penegakan hukum dan kedaulatan. Batas yang tidak jelas juga dapat menimbulkan permasalahan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah perbatasan negara serta memperbesar potensi timbulnya pelanggaran wilayah oleh pihak asing, insiden masyarakat di wilayah perbatasan dengan masyarakat di negara tetangga dan penggunaan kawasan perbatasan sebagai pintu masuk dan berlindungnya para pelaku tindak pidana transnasional. Tingginya potensi permasalahan perbatasan menjadikan diplomasi perbatasan sebagai hal yang memiliki tantangan tinggi dalam pelaksanaannya.

Secara hukum, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk merundingkan batas wilayah laut dengan negara-negara tetangga. Namun dalam praktiknya, perundingan dengan negara tetangga untuk menetapkan batas wilayah negara adalah tidak mudah. Adanya perbedaan pandangan hukum mengenai ketentuan penarikan batas antara Indonesia dan negara tetangga, merupakan salah satu hal yang menjadi kendala. Sebagai contoh, walaupun beberapa negara

counterpart telah mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan dimana berdasarkan hukum internasional memiliki hak untuk menarik garis lurus dari titik-titik dasar terluar dalam menentukan garis pangkal untuk menentukan klaim atas wilayah perairannya, ada negara-negara tetangga lain yang memandang bahwa prinsip negara kepulauan tidak adil karena memberikan wilayah laut yang sangat luas bagi Indonesia dan memandang bahwa pembagian wilayah harus berdasarkan prinsip sama jarak.

Perbedaan pandangan tersebut seringkali menyebabkan proses perundingan dapat berlangsung cukup lama hingga tercapainya suatu kesepakatan untuk dituangkan dalam suatu Perjanjian Batas Wilayah. Sebagai contoh, pembahasan batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Viet Nam berlangsung selama 25 tahun sejak tahun 1978 hingga disepakatinya Perjanjian Batas Landas Kontinen kedua negara pada tahun 2003.

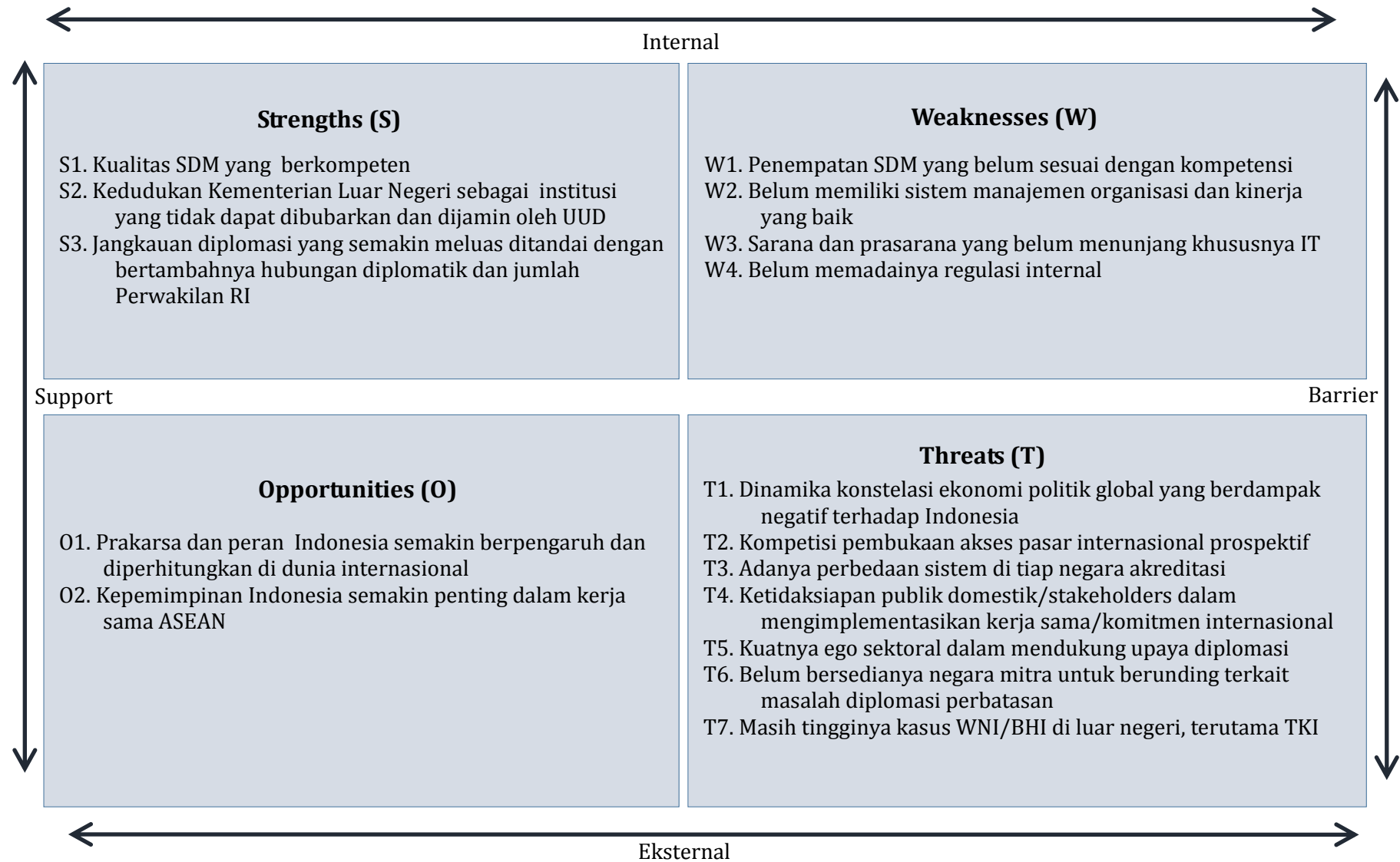
Selain itu, proses perundingan penetapan batas dapat memakan waktu panjang dikarenakan sejumlah faktor, yang bukan hanya terdiri atas isu substansi dan teknis melainkan juga aspek non-substansi seperti kesiapan delegasi kedua belah pihak untuk berunding serta dinamika politik dalam negeri dan kesediaan serta komitmen negara *counterpart*. Memperhatikan hal tersebut, penentuan kerangka waktu proses penetapan batas tidak dapat secara serta merta ditentukan.

Selain itu, kendala lainnya mencakup minimnya ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana-prasarana publik termasuk moda transportasi perhubungan kawasan perbatasan, sulitnya melakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga karena adanya konflik kepentingan antara para pemangku kepentingan, penanganan masalah perbatasan yang masih tumpang tindih (penetapan batas dan pengelolaan kawasannya), serta kurangnya sentuhan pembangunan di kawasan perbatasan, khususnya di kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar.

Pada dimensi kewilayahan, kejelasan batas wilayah darat dan laut merupakan elemen yang penting dalam upaya memelihara keutuhan dan kesatuan NKRI. Berikut adalah strategi yang patut menjadi prioritas untuk dilakukan oleh pemerintah guna mendukung diplomasi perbatasan:

1. Optimalisasi Tim Teknis Penetapan Batas Maritim RI untuk merundingkan batas maritim secara efektif dan efisien;
2. Perampingan format pertemuan perundingan batas darat dengan fokus pada penyelesaian batas darat yang belum disepakati;
3. Penegakan keamanan di laut dan udara, serta penguatan pengamanan di kawasan perbatasan khususnya pos-pos lintas batas, guna mengantisipasi pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh pihak asing, tindak pidana transnasional, seperti *smuggling of people and goods* yang terjadi di kawasan perbatasan ataupun masuk melalui daerah perbatasan;
4. Pengelolaan sumber daya kelautan, seperti pengelolaan perikanan dan penanganan masalah seperti *illegal, unreported and unregulated fishing*, serta pengelolaan pemanfaatan sumber daya energi dan mineral;
5. Perlindungan lingkungan hidup;
6. Penataan ruang serta *blue print* pengembangan kawasan perbatasan;
7. Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan untuk menyokong kehidupan masyarakat di kawasan tersebut; dan
8. Penguatan koordinasi dan kerja sama inter-Kementerian/Lembaga.

1.2.8. Analisis SWOT Kementerian Luar Negeri



TOWS MATRIX

	Strength (S): S1. Kualitas SDM yang berkompeten S2. Kedudukan Kementerian Luar Negeri sebagai institusi yang tidak dapat dibubarkan dan dijamin oleh UUD S3. Jangkauan diplomasi yang semakin meluas yang ditandai dengan bertambahnya hubungan diplomatik dan jumlah Perwakilan RI	Weakness (W): W1. Penempatan SDM yang belum sesuai dengan kompetensi W2. Belum memiliki sistem manajemen organisasi dan kinerja yang baik W3. Sarana dan prasarana yang belum menunjang khususnya IT
Opportunities (O): O1. Prakarsa dan peran Indonesia semakin berpengaruh dan diperhitungkan di dunia internasional O2. Kepemimpinan Indonesia semakin penting dalam kerja sama ASEAN	SO Strategy : S1,S3 --> O1 Menempatkan posisi Indonesia secara tepat atas isu-isu global dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia secara maksimal bagi kepentingan nasional dan merevitalisasi konsep identitas nasional dalam politik luar negeri RI. S1,S3 --> O2 Pemantapan peran Indonesia di ASEAN	WO Strategy : W1 - W2 - W3 --> O1,O2 Menerapkan dan mengimplemetasikan sistem manajemen organisasi, kinerja, SDM, dan IT yang baik
Threats (T): T1. Dinamika konstelasi ekonomi politik global yang berdampak negatif terhadap Indonesia T2. Kompetisi pembukaan akses pasar internasional prospektif T3. Adanya perbedaan sistem di tiap negara akreditasi T4. Ketidaksiapan publik domestik/stakeholders dalam mengimplementasikan kerja sama/komitmen internasional T5. Kuatnya ego sektoral dalam mendukung upaya diplomasi T6. Belum bersedianya negara mitra untuk berunding terkait masalah diplomasi perbatasan T7. Masih tingginya kasus WNI/BHI di luar negeri, terutama TKI	ST Strategy : S1,S3 --> T1,T2 Penyesuaian strategi dan penguatan diplomasi ekonomi S1,S2--> T4,T5 Meningkatkan pelibatan peran, aspirasi, dan kepentingan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri RI S1,S3 → T6 Memprioritaskan kerja sama maritim dalam rangka keamanan dan stabilitas regional S1,S3 → T7 Diplomasi yang menghasilkan kerangka hukum/mekanisme proteksi WNI/BHI	WT Strategy : W3 --> T1, T3 Membangun dan menata infrastruktur diplomasi

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

II.1. Visi Kementerian Luar Negeri

Guna mewujudkan Visi Pembangunan Tahun 2015—2019 “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, dan guna mewujudkan Misi ke-3 “Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim”, Agenda Pembangunan Nasional, maka ditetapkanlah pernyataan Visi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai berikut:

“Terwujudnya Wibawa Diplomasi guna Memperkuat Jati Diri Bangsa sebagai Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat”

Terwujudnya Wibawa Diplomasi adalah terlaksananya penyelenggaraan hubungan Indonesia dengan negara lain yang disegani dan dihormati oleh dunia internasional karena peran aktif dan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional.

Memperkuat Jati Diri Bangsa adalah penguatan identitas/ciri khas yang menandai keberadaan bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain di dunia.

Negara Maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan dan mengelola wilayah lautnya untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran serta membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan serta membangun konektivitas dan pertahanan maritim.

Untuk Kepentingan Rakyat adalah pemenuhan kebutuhan dan hajat hidup masyarakat guna membawa kemakmuran bagi masyarakat luas, bangsa, dan negara.

Pernyataan visi di atas menggambarkan komitmen yang akan diperjuangkan dan diwujudkan oleh Kementerian Luar Negeri, terutama melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya (*core competency*) sebagai institusi penyelenggara hubungan dan pelaksana politik luar negeri dengan tekad kinerja Kementerian Luar Negeri “Diplomasi untuk Rakyat, Diplomasi Membumi”, yang berarti kinerja diplomasi yang dilaksanakan Kementerian Luar Negeri harus dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

II.2. Misi Kementerian Luar Negeri

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kementerian Luar Negeri telah menetapkan 3 (tiga) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Unit Organisasi dan Satuan Kerja selama kurun waktu 2015-2019, sebagai berikut:

1. Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara maritim dalam kerja sama internasional untuk memajukan kepentingan nasional

2. Memantapkan peran Kementerian Luar Negeri sebagai penjuror pelaksana hubungan luar negeri dengan dukungan dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan nasional
3. Mewujudkan kapasitas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang mumpuni

MISI 1:
Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara maritim dalam kerja sama internasional untuk memajukan kepentingan nasional

Memperkuat adalah menjadikan lebih kuat dari kondisi sebelumnya.

Peran adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif.

Kepemimpinan adalah nilai kewibawaan yang menjadi pertimbangan dan kepercayaan dunia internasional terhadap kedudukan Indonesia, sehingga memiliki nilai pengaruh terhadap kebijakan di forum internasional. Kepemimpinan dapat diperlihatkan di antaranya melalui peran sebagai mediator dan stabilisator.

Negara Maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan dan mengelola wilayah lautnya untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran serta membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan serta membangun konektivitas dan pertahanan maritim.

Kerja Sama Internasional adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh negara yang menyangkut aspek bilateral, regional, dan internasional untuk mencapai tujuan bersama.

Memajukan adalah mencapai atau membawa kepada suatu keadaan yang lebih baik.

Kepentingan Nasional adalah amanat yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pada periode 2010-2014 difokuskan pada pencapaian Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

MISI 2:
Memantapkan peran Kemenlu sebagai penjuror pelaksana hubungan luar negeri dengan dukungan dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan nasional

Memantapkan adalah meningkatkan; mengukuhkan.

Peran adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif.

Penjuror adalah sebagai garda terdepan dan lokomotif serta peran koordinator.

Pelaksana Hubungan Luar Negeri adalah pelaksana setiap kegiatan yang menyangkut aspek bilateral, regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi-organisasi, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

Dukungan dan Peran Aktif adalah sokongan, bantuan, partisipasi positif dan keikutsertaan secara aktif.

Pemangku Kepentingan Nasional adalah segenap pihak dalam negeri yang memiliki kepentingan dan terkait dengan isu hubungan luar negeri.

MISI 3:
Mewujudkan kapasitas Kemenlu dan Perwakilan RI yang mumpuni

Mewujudkan adalah melaksanakan dan menyelenggarakan.

Kapasitas Kementerian Luar Negeri adalah kemampuan Kementerian Luar Negeri untuk menciptakan nilai (*value*) dimana kemampuan tersebut didapatkan dari berbagai jenis sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri.

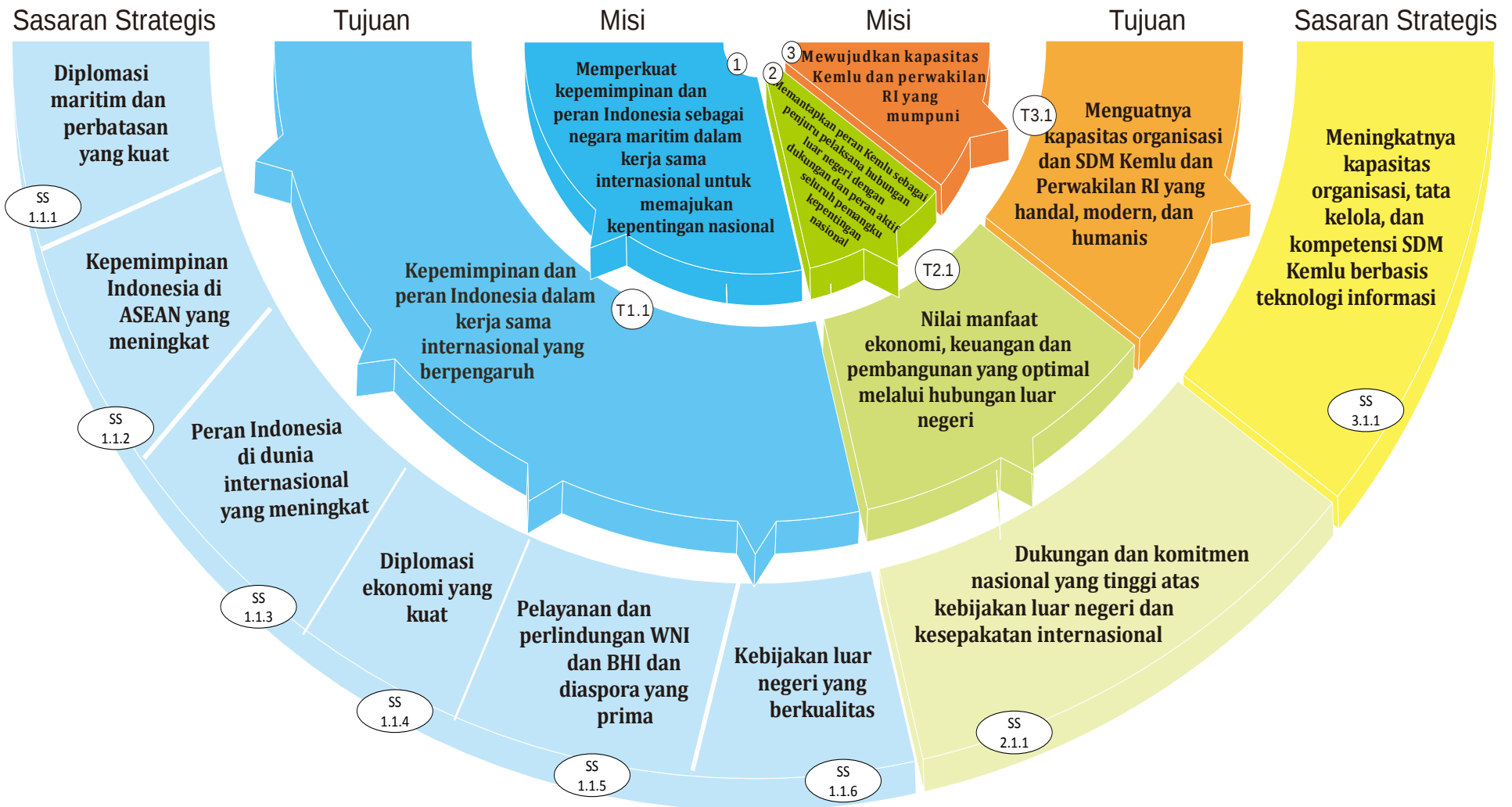
Mumpuni adalah mampu melaksanakan tugas dengan baik; menguasai keahlian (kecakapan, keterampilan) tinggi.

Kementerian Luar Negeri telah menyusun suatu kerangka strategis tujuan Kementerian Luar Negeri berdasarkan Trisakti, Nawa Cita, dan visi dan misi Presiden RI, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019, dengan tekad “Diplomasi untuk Rakyat”.

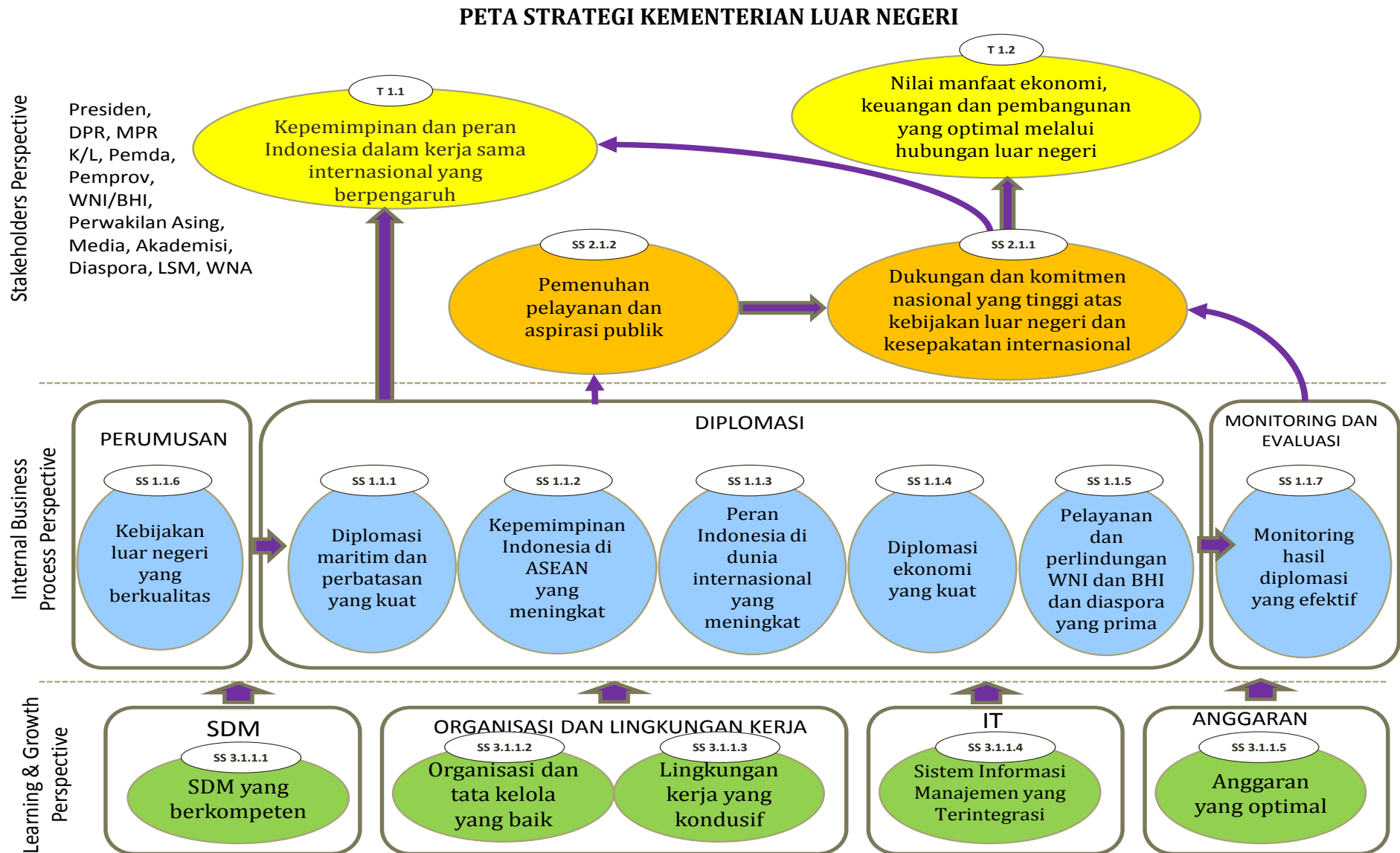
Berdasarkan visi dan misi Kementerian Luar Negeri tahun 2015—2019, Kementerian Luar Negeri juga menjabarkan tujuan dan sasaran strategis berdasarkan tiga perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal business process perspective*, dan *learning & growth perspective*, yang menggambarkan hubungan sebab akibat.

Gambar 1: Kerangka Strategis Tujuan Kementerian Luar Negeri

DIPLOMASI UNTUK RAKYAT



Gambar 2: Peta Strategis Kementerian Luar Negeri



II. 3. Tujuan Kementerian Luar Negeri

Tujuan Kementerian Luar Negeri disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Luar Negeri. 3 (tiga) Tujuan Kementerian Luar Negeri yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh

Kepemimpinan adalah nilai kewibawaan yang menjadi pertimbangan dan kepercayaan dunia internasional terhadap kedudukan Indonesia, sehingga memiliki nilai pengaruh terhadap kebijakan di forum internasional. Kepemimpinan dapat diperlihatkan di antaranya melalui peran sebagai inisiator, mediator dan fasilitator.

Peran adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif.

Kerja Sama Internasional adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh negara yang menyangkut aspek bilateral, regional dan internasional untuk mencapai tujuan bersama.

Berpengaruh adalah mempunyai pengaruh terhadap pengambil kebijakan isu-isu bilateral, regional, dan global.

Tujuan ini diukur melalui indikator yang disertai dengan target sampai dengan 2019 melalui kinerja kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan peran Indonesia di dunia internasional. Target dari tujuan ini sebagaimana tabel di bawah.

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2015	Target 2019
Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh	Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional	89%	95%

2. Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri

Nilai manfaat ekonomi adalah jumlah nominal manfaat secara ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang dihasilkan oleh berbagai kerja sama dan hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata antara negara.

Optimal adalah paling baik; tertinggi; dan paling menguntungkan.

Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek bilateral regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi-organisasi, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

Tujuan ini diukur melalui indikator yang disertai dengan target sampai dengan 2019 melalui banyaknya negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia, nilai investasi asing ke Indonesia, dan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia. Target dari tujuan ini sebagaimana tabel di bawah.

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2015	Target 2019
Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	78	85
	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia	25	65
	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	23	60

3. Menguatnya kapasitas organisasi dan SDM Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang handal, modern, dan humanis

Kapasitas Organisasi dan SDM Kementerian Luar Negeri adalah kemampuan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan untuk menciptakan nilai dimana kemampuan tersebut didapatkan dari berbagai jenis sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri.

Handal adalah (baku: andal) dapat dipercaya, menjadi tumpuan.

Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman.

Humanis adalah berdasarkan asas perikemanusiaan; pengabdian kepentingan sesama umat manusia.

Tujuan ini diukur melalui indikator yang disertai dengan target sampai dengan 2019 melalui Pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik dengan indikator Hasil Evaluasi Pelayanan Publik oleh Kementerian PAN dan RB. Target dari tujuan ini sebagaimana tabel di bawah.

Tujuan	Sasaran Antara	Indikator Kinerja Utama	Target 2015	Target 2019
Menguatnya kapasitas organisasi dan SDM Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang handal, modern, dan humanis	Pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik oleh KemenPAN RB	Baik	Amat Baik

II.4. Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri

8 (delapan) Sasaran Strategis utama Kementerian Luar Negeri yang hendak dicapai pada periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat

Diplomasi maritim dan perbatasan adalah negosiasi atau perundingan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih mengenai kerja sama kemaritiman dan penetapan serta penanganan permasalahan perbatasan laut dan darat.

Kuat adalah mempunyai keunggulan / tidak mudah goyah.

Sasaran strategis ini diukur melalui indeks diplomasi maritim dan perbatasan disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019. Indeks tersebut diperoleh dari komponen dengan pembobotan sebagaimana tabel di bawah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (setelah pembobotan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat	Indeks diplomasi maritim dan perbatasan	39	54.43	66.29	81.89	97.5

2. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat

Kepemimpinan adalah nilai kewibawaan yang menjadi pertimbangan dan kepercayaan dunia internasional terhadap kedudukan Indonesia, sehingga memiliki nilai pengaruh terhadap kebijakan di forum internasional. Kepemimpinan dapat diperlihatkan di antaranya melalui peran sebagai inisiator, mediator dan fasilitator.

Meningkat adalah bertambah tingkatan/kuat dari kondisi sebelumnya.

Sasaran strategis ini diukur melalui seberapa banyak rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dari yang disampaikan disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019, sebagaimana tabel di bawah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat	Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima	90%	92%	93%	94%	95%

3. Peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat

Peran adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif.

Meningkat adalah bertambah tingkatan/kuat dari kondisi sebelumnya.

Sasaran strategis ini diukur melalui indeks peran Indonesia disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019. Indeks tersebut diperoleh dari komponen dengan pembobotan sebagaimana tabel di bawah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (setelah pembobotan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat	Indeks Peran Indonesia	88%	89%	90%	90%	91%

4. Diplomasi ekonomi yang kuat

Diplomasi ekonomi adalah pemanfaatan alat politik internasional untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi melalui berbagai kerja sama seperti pembangunan (termasuk kesehatan, pendidikan dan pertanian), energi, lingkungan hidup, keuangan, dan pangan.

Kuat adalah mempunyai keunggulan dibanding negara lain.

Sasaran strategis ini diukur melalui indeks diplomasi ekonomi disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019. Indeks tersebut diperoleh dari komponen dengan pembobotan sebagaimana tabel di bawah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (setelah pembobotan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Diplomasi ekonomi yang kuat	Indeks diplomasi ekonomi	67%	72%	79%	85%	92%

5. Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI dan diaspora yang prima

Pelayanan adalah tindakan, bantuan, persiapan, dan pengurusan dokumen dan perizinan dalam hal kekonsuleran, keimigrasian, ketenagakerjaan, pendidikan dan perhubungan, dan lain-lain.

Perlindungan adalah pertolongan, pembelaan, pendampingan, dan penyediaan bantuan hukum dan sosial dari Perwakilan RI di luar negeri bagi WNI dan BHI yang terkena kasus di luar negeri.

WNI adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia.

BHI adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan menurut peraturan perundangan Indonesia.

Diaspora adalah warga negara Indonesia, keturunannya, dan orang yang memiliki darah Indonesia yang menetap di luar negeri.

Prima adalah sangat baik; utama.

Sasaran strategis ini diukur melalui indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019. Indeks tersebut diperoleh dari komponen dengan pembobotan sebagaimana tabel di bawah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (setelah pembobotan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pelayanan dan perlindungan PwNI dan BHI dan diaspora yang prima	Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora	58%	60.7%	65,1%	70%	74.8%

6. Kebijakan Luar Negeri yang berkualitas

Kebijakan Luar Negeri adalah sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Berkualitas adalah mempunyai mutu/taraf baik dan ditindaklanjuti oleh Pimpinan Kementerian Luar Negeri.

Sasaran strategis ini diukur melalui seberapa banyak rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diimplementasikan dari yang disampaikan disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019, sebagaimana tabel di bawah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kebijakan luar negeri yang berkualitas	Persentase rekomendasi yang diimplementasikan	70%	70%	70%	70%	70%

7. Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional

Dukungan adalah sokongan/bantuan.

Komitmen adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu.

Tinggi adalah (mendukung) secara penuh.

Kebijakan luar negeri adalah sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Kesepakatan internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum

internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Sasaran strategis ini diukur melalui persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh *stakeholders* dalam negeri disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019, sebagaimana tabel di bawah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (setelah pembobotan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri	70%	72.4%	75%	77.3%	79.4%

8. Monitoring hasil diplomasi yang efektif

Monitoring adalah satu langkah sistematis dan berkala dalam kerangka memastikan terlaksananya suatu perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri.

Diplomasi yang efektif adalah diplomasi yang tepat guna sehingga hasil diplomasi dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Sasaran strategis ini diukur melalui persentase deviasi efektifitas perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri, sebagaimana tabel di bawah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (setelah pembobotan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Monitoring hasil diplomasi yang efektif	Persentase deviasi efektifitas perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri	10%	10%	10%	10%	10%

II.4.1 Sasaran Strategis Pendukung Kementerian Luar Negeri

Sasaran Strategis Pendukung Kementerian Luar Negeri merupakan pendekatan dari aspek *learning and growth perspective* yang hendak dicapai pada periode 2015-2019 yaitu, **Meningkatnya kapasitas organisasi, tata kelola, dan kompetensi SDM Kementerian Luar Negeri berbasis teknologi informasi.**

Meningkatnya adalah bertambah tinggi/kuat dari kondisi sebelumnya.

Kapasitas Organisasi adalah kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai yang didapatkan dari berbagai jenis sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.

Tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga

mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi.

Kompetensi adalah kecakapan atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang.

SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi yang harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Basis adalah dasar/asas.

Teknologi Informasi adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi.

Sasaran strategis pendukung ini memiliki sasaran antara yang tercantum pada peta strategi *learning and growth perspective* yang diukur melalui 6 (enam) IKU sebagaimana tabel di bawah.

Sasaran Strategis Pendukung	Sasaran Antara	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kapasitas organisasi, tata kelola, dan kompetensi SDM Kementerian Luar Negeri berbasis teknologi informasi	SDM yang Berkompeten	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	50%	60%	70%	80%	90%
	Organisasi dan Tata Kelola yang Baik	Nilai Kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenlu	60	75	85	90	95
	Lingkungan Kerja yang Kondusif	Indeks Kepuasan Pegawai	65%	70%	75%	80%	85%
	Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi	Indeks keamanan informasi (KAMI)	1,5	2	2,5	3	3,5
	Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi Anggaran yang Optimal	Indeks pemeringkatan e-government Indonesia (PEGI)	3,35	3,45	3,55	3,65	3,75
		Persentase penyerapan anggaran dan realisasi kinerja	95%	96%	97%	98%	99%

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

III.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke tiga (2015-2019), disusun sebagai penjabaran dari Visi Misi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

III.1.1. Visi dan Misi Pembangunan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pada 7 Misi Pembangunan, Kementerian Luar Negeri memiliki tanggung jawab dalam Misi ke-3, yaitu “Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim”.

III.1.2. Prioritas Nasional Tahun 2015-2019

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah Indonesia secara konsisten dapat melaksanakan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dan jatidirinya sebagai negara maritim untuk mewujudkan tatanan dunia yang semakin baik, dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam rangka mencapai tujuan nasional Indonesia yang diukur dari target sasaran sebagai berikut:

1. Tersusunnya karakter kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim.
2. Menguatnya diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan ZEE.
3. Meningkatkan peran dan kontribusi Indonesia dalam mendorong penyelesaian sengketa teritorial di kawasan.

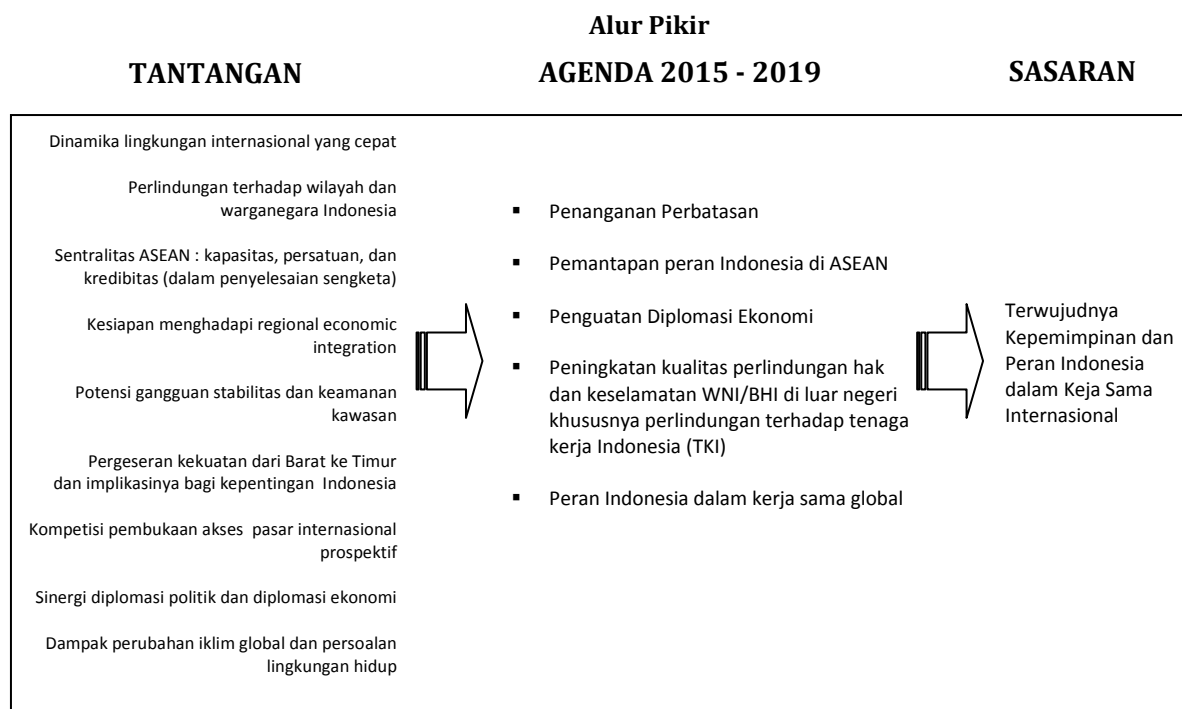
Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Menata kembali kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (a) Evaluasi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan penyusunan buku biru diplomasi yang menggambarkan politik luar negeri bebas aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim, dan melaksanakan UU No. 17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) secara konsisten; (b) Pembenahan pelaksanaan kebijakan nasional Indonesia sebagai negara kepulauan antara lain (i) pembenahan pengaturan hak lintas damai alur laut kepulauan melalui laur laut dan rute penerbangan untuk transit yang tidak melanggar kedaulatan Negara Kepulauan atas air serta ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya dan sumber kekayaan di dalamnya; (ii) penataan kembali kerja sama pengelolaan, konservasi sumber kekayaan alam hayati dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut; (iii) pengaturan penelitian ilmiah kelautan di laut territorial atau perairan kepulauan, di ZEE dan Landas Kontinen; dan

- (iv) pembenahan dan penguatan kerja sama internasional mengenai pengembangan dan pengalihan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; (c) Penyediaan beasiswa untuk bidang hukum laut dan perdagangan; (d) Evaluasi dan konsolidasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara regular untuk melaksanakan kebijakan polugri yang berkarakter bebas aktif, kepentingan nasional dan jati diri negara maritim; (e) Penataan infrastruktur diplomasi.
2. Memperkuat diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan ZEE, melalui strategi: (a) pelaksanaan perundingan perbatasan maritime dan darat; (b) pelaksanaan Doktrin Poros Maritim Dunia; (c) penyebaran informasi perbatasan termasuk perundingan kesepakatan batas kekuatan transmisi radio.
 3. Meningkatkan peran dan kontribusi Indonesia penyelesaian sengketa teritorial di kawasan, melalui strategi peningkatan peran Indonesia dalam penanganan sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui mekanisme ASEAN.

III.1.3. Prioritas Sub Bidang Politik Luar Negeri

Untuk menuju jalan Indonesia yang berdaulat secara politik, dalam lima tahun kedepan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif akan dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri bangsa sebagai negara maritim. Indonesia akan membangun wibawa politik luar negeri dan dapat mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global. Dalam menghadapi dinamika lingkungan internasional yang begitu cepat, Indonesia perlu memimpin dan berperan dalam mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil, dan damai di berbagai aspek kehidupan.



Dalam lima tahun ke depan, politik luar negeri Indonesia akan dititikberatkan pada mengedepankan identitas sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerja sama internasional, menguatkan diplomasi *middle power* yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo Pasifik, dan meningkatkan pelibatan peran, aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri, dan menata infrastruktur diplomasi.

Penanganan Perbatasan

Masih tingginya potensi konflik antarnegara, terdapatnya kurangpercayaan di kawasan, serta ekspektasi masyarakat internasional menjadikan Indonesia memiliki kepentingan untuk turut berkontribusi dan berpartisipasi dalam upaya menjaga perdamaian dunia, baik di kawasan maupun pada skala yang lebih luas. Hal ini juga terkait erat dengan pemenuhan kepentingan nasional mengingat perdamaian dan stabilitas di kawasan merupakan prasyarat mutlak untuk dapat melaksanakan pembangunan dalam negeri. Untuk itu, Indonesia akan memberikan perhatian pada upaya memelihara perdamaian dan keamanan di kawasan dan di tingkat global, yang selama ini sudah mulai dilakukan.

Penanganan permasalahan perbatasan merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan integritas wilayah Indonesia serta di kawasan pada skala yang lebih luas. Prioritas pertama yang perlu ditangani berkaitan dengan upaya tersebut adalah pelaksanaan diplomasi maritim dalam rangka mempercepat penyelesaian masalah penetapan dan penegasan batas Indonesia dengan 10 negara tetangga, baik di wilayah maritim maupun darat.

Pemantapan Peran Indonesia di ASEAN

Dalam memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan IndoPasifik, konsolidasi kepemimpinan Indonesia di ASEAN, memperkuat kerja sama dan menjamin sentralitas ASEAN merupakan fokus kebijakan yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan. Pemantapan peran kepemimpinan Indonesia di ASEAN sangat penting bagi upaya mencapai kepentingan nasional Indonesia, baik untuk meningkatkan kemakmuran di dalam negeri, maupun bagi upaya menjaga stabilitas dan perdamaian di Kawasan Asia Tenggara.

ASEAN akan menghadapi berbagai tantangan dalam lima tahun mendatang. Dalam aspek politik dan keamanan, ASEAN menghadapi dua isu utama yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan, yakni persoalan Laut Tiongkok Selatan dan Semenanjung Korea. Indonesia berkepentingan menjaga stabilitas kawasan untuk kepentingan pembangunan Indonesia.

Dalam aspek ekonomi, tantangan ke depan yang akan dihadapi adalah kebangkitan ekonomi Tiongkok dan munculnya berbagai perjanjian perdagangan. Hal ini perlu direspon dan dikelola dengan baik oleh ASEAN, mengingat di sisi lain, ASEAN sedang dalam proses mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN berupa integrasi ekonomi regional secara penuh pada tahun 2015 mendatang. Tantangan lain adalah munculnya keraguan integrasi ekonomi regional ASEAN akan memberikan manfaat dan dampak positif terhadap sektor ekonomi dan keuangan negara-negara anggota ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN khawatir munculnya ketidakadilan yang terjadi ketika diterapkan integrasi ekonomi dimaksud. Persoalan ketidakadilan ini tentu bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang seharusnya didedikasikan untuk membangun dan memajukan kawasan Asia

Tenggara yang terintegrasi dalam pembangunan ekonomi yang merata dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Tantangan lain adalah ketahanan ekonomi bersama ASEAN yang akan dipengaruhi oleh adanya krisis yang dialami oleh negara anggota ASEAN. Harapannya adalah krisis ekonomi yang dialami oleh negara-negara anggota ASEAN tidak menyebar dan tidak memberikan dampak besar terhadap negara-negara lainnya di kawasan. Bagi Indonesia, dengan potensi penduduk dan sumber daya yang besar seharusnya integrasi ekonomi dan keuangan ASEAN dapat menjadikan perekonomian Indonesia semakin meningkat.

Dalam aspek sosial budaya, tantangan besar yang dihadapi adalah upaya membangun satu identitas dan kebersamaan ASEAN sebagai satu komunitas. ASEAN masih akan menghadapi persoalan kohesivitas internal dan tantangan terhadap pelaksanaan sentralitas ASEAN dalam berhubungan dengan para mitra wicaranya. Pidato Presiden RI dalam KTT ASEAN ke 25 menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN 2015, penguatan kerja sama ASEAN utamanya implementasi *Master Plan on ASEAN Connectivity* termasuk infrastruktur bidang maritim, peningkatan perdagangan intra-ASEAN dari 24,2 persen menjadi 35-40 persen, meningkatkan PDB ASEAN dua kali lipat dari US\$ 2.2 triliun menjadi USD 4.4 triliun pada tahun 2030, serta ajakan untuk melakukan upaya bersama dalam mengurangi separuh angka kemiskinan di kawasan pada tahun 2030 dari 18,6% menjadi 9,3%. Indonesia menegaskan pula bahwa rakyat harus mendapatkan manfaat dari kerja sama ASEAN. Berkenaan dengan isu Laut Tiongkok Selatan, pada KTT ASEAN ke 25 tersebut, Indonesia menegaskan pentingnya negara-negara di kawasan untuk saling menghormati kedaulatan masing-masing, menyelesaikan masalah dengan cara damai, dapat menjalankan *Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea (DoC)*, serta mempercepat kesepakatan *Code of Conduct (CoC)*. Penyelesaian damai atas sengketa wilayah laut memerlukan kerja sama maritim untuk mengurangi ketegangan dan menghindari konflik di kawasan, dan membangun kepercayaan antarnegara dan meningkatkan transparansi diantara negara-negara anggota ASEAN. Upaya ini perlu dilakukan untuk meredam rivalitas maritim antarnegara dan mendorong penyelesaian sengketa teritorial di kawasan perdagangan bebas. Lebih jauh, Presiden RI dalam KTT ASEAN ke 25 tersebut menegaskan perlunya penanganan secara sungguh-sungguh sumber-sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran wilayah, penyelundupan, dan sengketa wilayah. Hal lain, mempertahankan sentralitas ASEAN melalui penguatan kapasitas, kredibilitas dan persatuan ASEAN merupakan kebijakan yang harus ditempuh oleh negara-negara anggota ASEAN dan dapat dijadikan dasar dalam membawa ASEAN pasca 2015.

Indonesia perlu turut menentukan arah ASEAN ke depan. Di satu sisi, ASEAN harus memberikan manfaat bagi Indonesia, dan di sisi lain Indonesia harus memiliki kepemimpinan di ASEAN. Untuk itu, dalam lima tahun mendatang Indonesia perlu memastikan kesiapan domestik sekaligus mempersiapkan konsep dan langkah kepemimpinan Indonesia di ASEAN melalui dukungan regulasi, kelembagaan, program/kegiatan dan anggaran. Di samping itu, kepemimpinan dan peran Indonesia di ASEAN perlu didukung oleh kapasitas sumber daya manusia (*intellectual resources*) yang memadai.

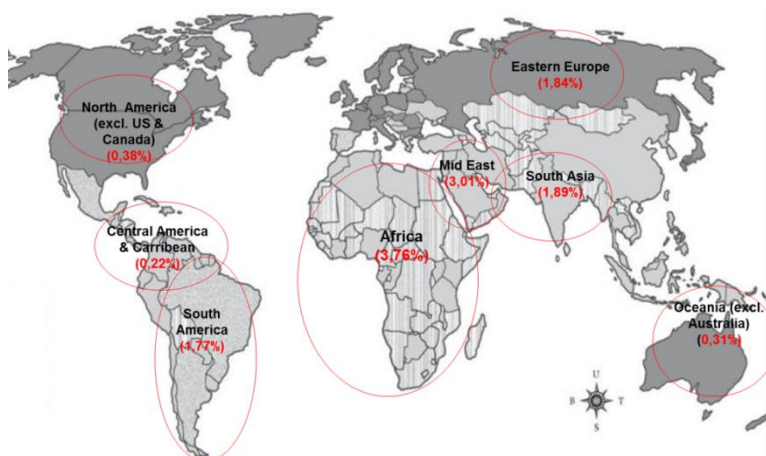
Dalam kepemimpinannya, Indonesia perlu memastikan terkonsolidasinya satu tatanan kawasan baru melalui bingkai East Asia Summit (EAS). Untuk itu, upaya memperkuat arsitektur regional, khususnya EAS, perlu mendapat perhatian khusus dalam lima tahun mendatang. Dalam KTT ke-9 EAS, Presiden menegaskan konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia yang akan memfokuskan pada 5 pilar utama, yaitu membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan

menempatkan nelayan pada pilar utama; memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim; menerapkan diplomasi maritim melalui peningkatan kerja sama maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara lain, bukan memisahkan; dan membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggungjawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Penguatan Diplomasi Ekonomi

Selama ini diplomasi telah memberikan keuntungan politis bagi Indonesia di tingkat internasional. Keuntungan politis tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, antara lain melalui peningkatan ekspor barang/jasa atau perluasan pasar prospektif. Lima tahun ke depan, diplomasi ekonomi Indonesia akan difokuskan untuk mendukung penghapusan *non-tariff barrier* dalam perdagangan dengan pasar utama dan pembukaan pasar prospektif, antara lain di kawasan Eropa Timur dan Tengah, Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Selatan, Sub Sahara Afrika, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia dan Asia yang juga mengalami pertumbuhan pesat.

GAMBAR 1 PASAR PROSPEKTIF INDONESIA



Sumber: Exploring Africa, BPPK Kementerian Luar Negeri, 2012

Pasar prospektif perdagangan Indonesia masih sangat kecil. Di kawasan Afrika hanya sebesar 3,76 persen dari total perdagangan; Amerika Selatan hanya 1,77 persen; Amerika Utara 0,38 persen. Di sisi lain, Malaysia, Brazil, dan Vietnam telah masuk ke wilayah ini dan memiliki nilai investasi yang jauh lebih signifikan. Diplomasi Indonesia di berbagai forum ekonomi selama ini memperlihatkan bahwa penekanan yang berbeda pada aspek politik atau aspek ekonomi menghasilkan keputusan yang berbeda, sehingga perlu upaya untuk menyeimbangkan antara kedua aspek tersebut agar keduanya dapat berjalan seiring dan saling mendukung. Semakin kuatnya diplomasi ekonomi yang dilakukan pada gilirannya dapat berperan dalam upaya keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (*middle income trap*).

Di samping itu, Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G-20. Indonesia berperan aktif dalam upaya penanganan krisis ekonomi global dan mendorong reformasi tata kelola ekonomi dunia. Oleh karena itu, posisi sebagai anggota G20

perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Diplomasi Indonesia di G20 perlu memperkuat kepentingan ekonomi nasional yang dalam lima tahun ke depan yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas atau “*growth with equity*”. Pertumbuhan ini akan dilakukan melalui strategi investasi perdagangan, peningkatan daya saing, financial inclusion dan produktivitas. Diplomasi Indonesia untuk mendukung “*quality growth*” atau “*growth with equity*” ini sejalan dengan kepentingan negara berkembang.

Dalam forum APEC, peran Indonesia pada beberapa bentuk kerja sama cukup menonjol khususnya dalam konsep integrasi ekonomi dimana Indonesia berperan aktif sebagai salah satu *lead economies* dalam sejumlah program aksi. Partisipasi Indonesia di APEC dilandaskan pada pentingnya mengambil keuntungan dan mengamankan kepentingan nasional Indonesia dalam era perdagangan dan investasi yang semakin bebas di Asia Pasifik.

Peluncuran *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-21 membuka peluang pasar bersama terbesar di dunia karena berpopulasi separuh jumlah penduduk dunia. RCEP ditujukan sebagai suatu upaya memperkuat ketahanan ekonomi kawasan yang berlandaskan semangat kemitraan dan saling menguntungkan antara negara ASEAN dan negara mitranya. RCEP juga dibentuk agar ASEAN dapat menjadi *key driver* dalam pengembangan arsitektur kawasan yang bersifat ASEAN-minded dengan tetap mengutamakan pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Tantangan bagi Indonesia adalah untuk memperjuangkan kepentingan ASEAN dan tentu kepentingan ekonomi nasional yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO), Indonesia perlu merumuskan arah dan strategi untuk memastikan agar keputusan WTO yang bersifat *legally binding* sejalan dengan kepentingan nasional. Pemanfaatan forum WTO akan sangat membantu pelaku diplomasi ekonomi bilateral yang sering menemui berbagai persoalan terkait *tariff* dan *non-tariff barrier*. WTO juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memanfaatkan bantuan teknis di forum ini. Selama ini, upaya diplomasi ekonomi Indonesia di WTO masih belum optimal, karena kurang matangnya persiapan negosiasi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan domestik untuk menghadapi putaran perundingan yang berjalan sepanjang tahun. Untuk itu, di masa mendatang diplomasi ekonomi di forum WTO perlu diperkuat dengan upaya pemetaan kepentingan domestik yang perlu dilindungi, koordinasi antarlembaga yang lebih permanen dan intensif, serta analisis mendalam terhadap produk-produk hukum WTO.

Pertarungan politik global ditandai dengan pertarungan penguasaan pangan dan energi. Krisis pangan dan energi dunia dan kelangkaan air berdampak pada peningkatan harga pangan dunia, arus impor dan ekspor pangan dalam jumlah besar. Hal lain, kerawanan pangan dan energi menyebabkan terjadinya kompetisi penyediaan energi dan pangan menjadi alat negosiasi baru di dunia internasional (aturan main dalam rezim internasional). Dalam bidang perdagangan, sejumlah negara menerapkan strategi hambatan non-tarif untuk melindungi harga dan pasokan pangan dalam negerinya. Dalam lima tahun ke depan, diplomasi politik dan diplomasi ekonomi harus berjalan seiring untuk melindungi kepentingan nasional atas pangan dan energi.

Diplomasi ekonomi Indonesia juga perlu dilakukan dalam bidang perbankan, terutama untuk membantu perbankan nasional melakukan ekspansi ke negara-negara tetangga terdekat. Selama ini, perbankan nasional mengalami kesulitan dan hambatan perijinan dari pemerintah setempat. Situasi ini sangat berbeda dengan kemudahan sejumlah

bank komersial dari negara anggota ASEAN yang memiliki lebih banyak kantor cabang di Indonesia daripada di negara asalnya.

Dalam konteks kerja sama bilateral, diplomasi ekonomi Indonesia perlu juga mengacu kepada kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Kerja sama kemitraan strategis yang telah dibangun perlu dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan nasional Indonesia. Sejalan dengan aspirasi Indonesia sebagai negara maritim, diplomasi ekonomi juga perlu untuk digalakkan di forum *Indian Ocean Rim Association* (IORA). Kerja sama perekonomian dengan sejumlah negara anggota IORA memiliki potensi yang besar dan telah mendapatkan perhatian dalam Komunike Perth tahun 2013. IORA juga merupakan forum yang strategis bagi Indonesia untuk mendorong agenda setting yang sejalan dengan kepentingan nasional, termasuk mengenai *illegal fishing* dan *human trafficking*. Untuk mengoptimalkan manfaat kerja sama IORA bagi kepentingan nasional, Indonesia sebagai ketua pada periode 2015–2017 perlu menerapkan strategi *multiplication of authority*, yakni adanya tindakan bersama dari berbagai lapisan untuk menuju tujuan bersama.

Sudah saatnya kawasan ini perlu memperoleh perhatian utama. Sebagai negara yang menempati posisi strategis di persinggungan dua samudera, Hindia dan Pasifik, Indonesia perlu berperan aktif dan memimpin.

Terkait dengan kerja sama antarkawasan (*interregional cooperation*), Meksiko, Indonesia, South Korea, Turki, dan Australia (MIKTA) telah mengagendakan pertemuan konsultasi berkala dalam mengembangkan kerja sama berlandaskan pembangunan ekonomi dan karakteristik kebijakan politik global yang serupa. Dalam pertemuan pertama di Meksiko City, April 2014, telah dibahas persoalan terkait situasi politik internasional terkini, termasuk tujuan-tujuan pembangunan pasca 2015, *cybersecurity*, perubahan iklim, hak asasi manusia, migrasi dan reformasi Dewan Keamanan PBB. Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia merupakan negara-negara di antara 20 negara ekonomi kuat dan berlandaskan demokrasi yang memainkan peran konstruktif dalam *global governance*.

Negara-negara MIKTA telah menunjukkan kemampuannya untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan ekonomi terbuka yang mengambil manfaat dari perdagangan bebas dan investasi asing. Dari sudut pandang geopolitik, negara-negara MIKTA berperan sebagai ‘titian’ antar kawasan. Untuk itu, Indonesia akan terus memainkan peran penting dalam kerja sama antarkawasan MIKTA sebagai bagian dari penguatan dan perluasan diplomasi ekonomi di samping sebagai jejaring yang kuat untuk menopang pencapaian kepentingan nasional.

Peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan hak dan keselamatan WNI/BHI di luar negeri khususnya terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa isu perlindungan WNI/BHI di luar negeri, khususnya TKI, adalah persoalan yang akan terus muncul dan selalu menjadi perhatian utama publik dengan ekspektasi tinggi. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah terus berupaya menunjukkan komitmen kepedulian dan keberpihakannya dalam menghadirkan negara memberikan pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri.

Dalam rangka merespon dinamika persoalan WNI/BHI termasuk TKI, lima tahun ke depan Kementerian Luar Negeri akan mengambil langkah-langkah terobosan, antara lain memperkuat sistem kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap WNI/BHI yang cepat, tepat dan akuntabel, memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait pembagian tugas yang jelas dan membangun mekanisme koordinasi yang lebih baik, serta

mendorong diplomasi perlindungan di tingkat bilateral maupun regional/multilateral untuk menghasilkan instrumen hukum/mekanisme yang dapat meningkatkan proteksi WNI/TKI dan BHI.

Peran Indonesia dalam kerja sama bilateral, regional dan global

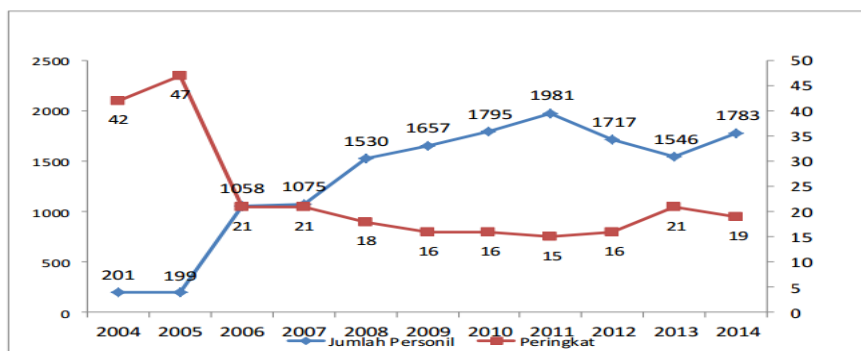
Penguatan diplomasi bilateral Indonesia ditandai dengan upaya peningkatan hubungan kerja sama dengan negara-negara terdekat serta perkembangan implementasi sejumlah kerja sama kemitraan strategis dengan beberapa negara kunci di kawasan dan negara sahabat lainnya.

Sementara itu Indonesia juga perlu memperkuat peran dalam kerja sama global dan regional untuk membangun saling pengertian, memajukan demokrasi dan HAM, perdamaian dunia, meningkatkan kerja sama selatan selatan, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia, termasuk perubahan iklim akibat pemanasan global. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan ruang bagi berjalan efektifnya proses pembangunan di Indonesia demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Keberhasilan proses konsolidasi demokrasi di dalam negeri, serta upaya-upaya yang dilakukan Indonesia selama ini untuk mempromosikan dan memajukan demokrasi telah mendapatkan apresiasi dan pengakuan dunia internasional. Selama ini Indonesia sudah melakukan promosi demokrasi dan HAM di tingkat regional dan multilateral, misalnya melalui penyelenggaraan *Bali Democracy Forum* (BDF), kontribusi Indonesia dalam pembentukan ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR), dan melalui kontribusi sebagai anggota Dewan HAM PBB. Negara-negara Timur Tengah yang terkena dampak *Arab Springs* dan ASEAN telah membuka ruang kerja sama untuk saling berbagi pengalaman terkait dengan pelaksanaan demokrasi. Dengan potensi tersebut, Indonesia dapat lebih berperan memajukan demokrasi pada tingkat regional dan global.

Lebih lanjut, fakta yang ada saat ini menunjukkan masih tingginya potensi konflik *interstate*, adanya *trust deficit* di kawasan. Masyarakat Internasional memiliki ekspektasi peran, kontribusi dan partisipasinya dalam upaya menjaga perdamaian dunia, baik di kawasan maupun di level yang lebih luas. Upaya ini terkait erat dengan kepentingan nasional karena *peace and stability* di kawasan adalah prasyarat mutlak untuk dapat melaksanakan pembangunan di di dalam negeri. Indonesia selama ini telah menjadi negara netral dan dipercaya para pihak untuk meredam konflik di Laut Tiongkok Selatan yang sangat penting bagi stabilitas dan keamanan Asia Pasifik. Saling klaim wilayah, serta potensi sumber daya alam yang dikandung di wilayah Laut Tiongkok Selatan menjadi isu pertarungan negara Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Tiongkok, yang dalam 5 tahun ke depan masih berpotensi menimbulkan ketegangan di kawasan.

Dalam konteks global, situasi Timur Tengah diperkirakan masih akan ditandai dengan berbagai ketegangan dan kekerasan sebagai dampak gelombang demokratisasi, dan hubungan antarnegara yang kurang harmonis. Peran Indonesia melalui pasukan perdamaannya tentu perlu ditingkatkan. Indonesia perlu meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, serta menemukan solusi untuk mengatasi kendala pengiriman pasukan perdamaian sehingga target 10 besar negara pengirim pasukan perdamaian dapat dicapai, dan menyusun *road map* pencapaian target *peace keepers*, serta mengoptimalkan kontribusi di UNPKO tersebut untuk mendukung diplomasi Indonesia di PBB. Kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dapat dilihat dari tabel dibawah ini yang menunjukkan posisi ke 19. Diharapkan Indonesia dapat mencapai target 10 besar pengiriman pasukan perdamaian dalam 5 tahun mendatang.

GRAFIK.2 JUMLAH PERSONEL DAN PERINGKAT INDONESIA DALAM PASUKAN PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB TAHUN 2004-2014



Tidak dapat dipungkiri bahwa isu kejahatan terorganisir lintas negara merupakan masalah global yang dapat mengancam umat manusia. Isu kejahatan ini seperti pencucian uang, penyelundupan manusia, kejahatan *cyber*, *trafficking in persons*, penyelundupan senjata dan narkoba, menjadi salah satu persoalan yang dapat mengancam stabilitas kawasan, khususnya mengancam pembangunan nasional Indonesia. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa dalam kerja sama global dan regional sulit untuk mencapai kesepakatan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan tersebut pada tataran multilateral, dan situasi ini berdampak pada belum tercapainya kerangka instrumen internasional penanganan kejahatan lintas negara yang komprehensif di bawah payung PBB. Meskipun demikian, Indonesia perlu terus mengupayakan kerja sama penanganan kejahatan lintas negara, baik pada tingkat regional maupun global, bahkan bilateral khususnya dengan negara-negara yang terkait langsung.

Dalam *isu irregular migration/people smuggling* dan *trafficking in persons*, Indonesia harus terus mendorong dan memperkuat kerja sama penanganan antara negara asal, negara transit, negara tujuan imigran. Isu *irregular migration/people smuggling* berpotensi membawa dampak buruk terutama bagi masyarakat Indonesia di daerah transit, dan berpotensi membawa hubungan yang tidak harmonis antarnegara. Kepentingan ketiga negara asal, transit, dan tujuan dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kerja sama. Dengan demikian, kerugian yang dialami oleh masing-masing negara dapat diminimalkan dan potensi konflik ketiga negara dapat dihindarkan.

Terorisme global merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan negara. Kelompok teroris memiliki kapasitas dan jejaring internasional, dan menggunakan kemajuan teknologi komunikasi dan informatika, bahan peledak dan transportasi untuk mendukung keberhasilan aksi terorisme di dunia. Penguatan pencegahan dan penindakan terorisme melalui peningkatan kerja sama internasional menjadi suatu keniscayaan. Negara-negara perlu bersatu menghadapi ancaman terorisme tersebut mengingat ancaman terorisme bersifat laten, dan tidak berpola. Kesiapsiagaan setiap saat perlu dilakukan dalam menghadapi ancaman dan aksi terorisme.

Dalam isu perubahan iklim, Indonesia perlu selalu konsisten dengan peran aktif dan konstruktif untuk mendorong negara-negara agar lebih fleksibel dalam mengupayakan kompromi, dengan tidak mengorbankan kepentingan nasional, khususnya kepentingan negara berkembang. Hal ini penting untuk mendorong keberhasilan mencapai *legally binding outcome*, seperti yang dimandatkan oleh *Bali Action Plan*.

Melanjutkan peran Indonesia selama ini dalam merumuskan arah agenda pembangunan global selama ini, Indonesia menyadari pentingnya upaya mengintensifkan kerja sama internasional dalam mengatasi masalah-masalah global seperti perubahan iklim, penyebaran penyakit.

Dalam hal ini, Indonesia tidak cukup hanya menjadi peserta, melainkan perlu memainkan peran kepemimpinan dalam mengawal agenda pembangunan global, sejalan dengan kebijakan pembangunan di dalam negeri. Dalam bidang perlucutan senjata, tantangan bagi Indonesia untuk terus mendorong pemberlakuan *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty* (CTBT), dan memperjuangkan universalisasi traktat dan pemberlakuannya. Tantangan bagi Indonesia pula untuk mendorong 8 negara Annex 2 lainnya untuk melakukan hal yang sama. Indonesia perlu terus menyatakan sikap bahwa dunia perlu memperkuat multilateralisme, khususnya dalam memelihara peran sentral PBB. Indonesia menyatakan agar PBB tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan global dan terus dapat menjunjung multilateralisme, dengan proses pembuatan keputusan PBB yang lebih efektif, efisien, transparan, dan inklusif. Kerja sama dan kemitraan antara PBB dengan organisasi regional merupakan keniscayaan. Indonesia juga menegaskan bahwa harus ada sinergi antara upaya-upaya di tingkat global dengan upaya di tingkat regional. Indonesia tetap memainkan peran penting dan terus mendorong kerja sama di antara negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam menghadapi krisis keuangan dunia. Indonesia juga memberikan kontribusi untuk mereformasi OKI sebagai wadah untuk menjawab tantangan umat Islam memasuki abad ke-21. Indonesia berkomitmen dalam menjamin kebebasan, toleransi dan harmonisasi serta memberikan bukti nyata akan keselarasan Islam, demokrasi dan modernitas. Sementara itu, dalam kerangka *New Asia Africa Strategic Partnership* (NAASP), peran Indonesia sangat besar terutama dalam bertukar pengalaman di berbagai bidang pembangunan.

Melalui kerangka NAASP, Indonesia menggalang solidaritas dan memberikan dukungan konkret untuk pengembangan kapasitas bagi Palestina, termasuk bagi aparaturnya dan polisi Palestina. Indonesia telah menjadi *Middle Income Country* yang diharapkan memberikan kontribusi bagi negara lain melalui kerangka Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular. Sesungguhnya, Indonesia telah banyak memberikan kontribusi bagi negara lain, baik bantuan barang maupun *capacity building*, namun belum terkoordinasi dengan baik di antara kementerian/lembaga. Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) merupakan jawaban untuk merespon persoalan koordinasi dimaksud.

Peningkatan peran Indonesia dalam kerja sama selatan-selatan dan triangular memerlukan formulasi kebijakan Kerja sama Selatan-Selatan yang terintegrasi agar kontribusi yang diberikan tidak hanya menjadi *charity*, dan memperjuangkan kepentingan sesama negara selatan-selatan dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan sejajar dan saling menguntungkan, melainkan menjadi investasi politik dan instrumen diplomasi Indonesia, termasuk dalam mendorong diplomasi ekonomi tanpa menghilangkan esensi solidaritas sesama negara berkembang.

Hal lain, peran Indonesia ke depan perlu juga direpresentasikan dengan penempatan putra-putri terbaik Indonesia di dalam organisasi internasional dan regional khususnya di PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Sekretariat ASEAN. Hal ini penting untuk mendukung penguatan citra dan kemampuan Indonesia dalam berkontribusi, dan sekaligus sebagai upaya untuk menghadirkan Indonesia di organisasi tersebut. Untuk itu, Indonesia perlu mengatasi persoalan kapasitas SDM, keengganan untuk bersaing, kemampuan komunikasi dan upaya membuka akses.

Penyelenggaraan politik luar negeri yang efektif harus ditopang oleh upaya penataan infrastruktur diplomasi. Penataan dilakukan secara terukur melalui reorganisasi dan penguatan penyelenggara hubungan luar negeri dengan penguatan instrumen diplomasi ekonomi dan pengembangan keahlian khusus di bidang *asset recovery*, hukum laut internasional, perdagangan dan riset strategis. Perluasan partisipasi publik sangat esensial dalam proses perumusan kebijakan dan diplomasi khususnya melalui penguatan diplomasi publik. Tidak kalah penting, koordinasi antarkementerian maupun dengan Dewan Perwakilan Rakyat perlu diselenggarakan dengan seksama. Di samping itu penguatan diplomasi juga dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi penyelenggara hubungan luar negeri. Seluruh upaya tersebut harus didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai.

III.1.4. Sasaran Bidang Politik Luar Negeri

Sasaran pembangunan bidang politik luar negeri adalah terwujudnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim. Sasaran utama ini dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagai berikut:

1. Efektifnya penanganan masalah perbatasan
2. Meningkatnya kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN;
3. Meningkatnya peran Indonesia di tingkat global;
4. Menguatnya diplomasi ekonomi Indonesia;
5. Menguatnya peran Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular;
6. Meningkatnya promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM;
7. Meningkatnya kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri;
8. Terselenggaranya kebijakan dan infrastruktur diplomasi Indonesia yang lebih efektif

III.1.5. Arah Kebijakan dan Strategi Politik Luar Negeri

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN melalui strategi: (a) intervensi kebijakan pemerintah terkait Masyarakat ASEAN; (b) penguatan kapasitas domestik dalam menghadapi terwujudnya Masyarakat ASEAN; (c) penguatan kelembagaan untuk mendukung pemantapan pelaksanaan Masyarakat ASEAN; (d) penguatan kemitraan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya; (e) penguatan diplomasi Indonesia di ASEAN berbasis *intellectual resources*; (f) pelaksanaan peran (kontribusi) Indonesia dalam menguatkan sentralitas ASEAN dan peran ASEAN di tingkat regional dan global (arsitektur kawasan); (g) penyusunan road map dan partisipasi aktif di East Asia Summit (EAS); (h) pelaksanaan peran (kontribusi) Indonesia dalam South East Asia Nuclear Weapon Free Zone; (i) mendorong pelaksanaan traktat persahabatan dan kerja sama di Kawasan Asia Pasifik; (j) peningkatan peran Indonesia dalam penanganan konflik kawasan melalui mekanisme ASEAN termasuk sengketa Laut Tiongkok Selatan; (k) Pengembangan IT Masterplan untuk mendukung diplomasi RI di ASEAN.

2. Memperkuat diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan ZEE, melalui strategi: (a) Pemantapan diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian masalah perbatasan maritime dan darat; (b) pelaksanaan Doktrin Poros Maritim Dunia; (c) penyebarluasan informasi perbatasan termasuk perundingan kesepakatan batas kekuatan transmisi radio; (d) pemantapan diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian masalah perbatasan; (e) Pembenahan pelaksanaan kebijakan nasional Indonesia sebagai negara kepulauan sesuai dengan UU No. 17 tahun 1985 seperti antara lain pembenahan pengaturan hak lintas damai alur laut kepulauan melalui laur laut dan rute penerbangan untuk transit yang tidak melanggar kedaulatan Negara Kepulauan atas air serta ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya dan sumber kekayaan di dalamnya; penataan kembali kerja sama pengelolaan, konservasi sumber kekayaan alam hayati dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut; pengaturan penelitian ilmiah kelautan di laut territorial atau perairan kepulauan, di ZEE dan Landas Kontinen; dan pembenahan dan penguatan kerja sama internasional mengenai pengembangan dan pengalihan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan;
3. Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global melalui strategi (a) pelaksanaan diplomasi Indonesia dalam penanganan konflik di Timur Tengah; (b) pelaksanaan peran Indonesia dalam penanganan *people smuggling/irregular migration* bersama negara pengirim, negara transit, dan negara tujuan; (c) pemantapan peran Indonesia dalam penanganan *transnational organized crime*; (g) peningkatan partisipasi Indonesia dalam pengiriman pasukan pemelihara perdamaian; (h) penguatan diplomasi Indonesia di PBB yang efektif; (i) pemantapan peran Indonesia dalam mendorong terlaksananya *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty* (CTBT).
4. Menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global melalui strategi (a) penguatan diplomasi perluasan pasar prospektif; (b) Perumusan Cetak Biru peran Indonesia di APEC dan G20 untuk memperjuangkan kerja sama yang berimbang dan relevan; (c) pelaksanaan koordinasi kebijakan yang lebih erat antara negara anggota G-20 guna menuju pemulihan ekonomi global dan menjaga terciptanya sistem perekonomian global yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang; (d) peningkatan peran Indonesia di APEC dan G-20 untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang; (e) peningkatan diplomasi politik yang seiring dengan target-target diplomasi ekonomi; (f) pelaksanaan peran Indonesia di *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP); dan (g) pelaksanaan kontribusi Indonesia dalam terbentuknya norma/rezim internasional yang mengatur *energy and food security* sebagai *public goods*.
5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama selatan selatan dan triangular melalui strategi (a) Intervensi kebijakan pengembangan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular; (b) pengembangan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga yang menangani KSST; (c) pengembangan dan pemantapan *eminent persons group* untuk membantu pemangku kepentingan KSST; (d) promosi KSST di tingkat nasional dan internasional; dan (e) pengembangan model insentif bagi K/L, swasta, dan masyarakat sipil yang terlibat KSST.
6. Meningkatkan promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM melalui strategi (a) promosi demokrasi dan HAM di tingkat regional dan internasional; (b) pemantapan dialog HAM dan interfaith di level bilateral, regional dan internasional; (c) penegakan demokrasi dan HAM di dalam negeri; (d) penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan; (e) penyusunan dan

penyampaian paket-paket komunikasi untuk menyampaikan upaya penegakan HAM dan demokrasi di dalam negeri kepada kalangan internasional.

7. Meningkatkan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri melalui strategi (a) peningkatan keberpihakan diplomasi Indonesia pada WNI/BHI; (b) pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri dengan mengedepankan kepedulian dan keberpihakan; (c) pelaksanaan perjanjian bilateral untuk memberikan perlindungan bagi WNI/BHI di luar negeri; dan (d) penguatan konsolidasi penanganan WNI/BHI diantara pemangku kepentingan melalui koordinasi dan pembangian tugas yang jelas; (e) peningkatan upaya perlindungan melalui sinergi dengan komunitas WNI/TKI di luar negeri.
8. Menata kebijakan dan infrastruktur diplomasi Indonesia melalui strategi (a) evaluasi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan penyusunan buku biru diplomasi yang menggambarkan politik luar negeri bebas aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritime; (b) Penyediaan beasiswa untuk bidang hukum laut, riset strategis dan perdagangan; (c) Evaluasi dan konsolidasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara regular untuk melaksanakan kebijakan politik luar negeri RI yang berkarakter bebas aktif, kepentingan nasional dan jatidiri negara maritim; (d) perluasan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan diplomasi.

III.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Luar Negeri

III.2.1. Arah Kebijakan Kementerian Luar Negeri

Selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional, Kementerian Luar Negeri telah menentukan 8 Arah Kebijakan yaitu:

1. Penguatan Diplomasi Maritim dalam rangka menjaga kedaulatan Indonesia
2. Penguatan kepemimpinan Indonesia di ASEAN
3. Peningkatan peran dan pengaruh Indonesia sebagai negara *middle power* di dunia internasional
4. Penguatan diplomasi ekonomi
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri serta pemberdayaan diaspora
6. Peningkatan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan
7. Peningkatan kapasitas organisasi, tata kelola yang akuntabel, serta kompetensi SDM Kementerian Luar Negeri yang berbasis teknologi informasi
8. Perwujudan kebijakan luar negeri yang berkualitas melalui penguatan peraturan perundangan nasional yang terkait dengan penyelenggaraan diplomasi

III.2.2. Strategi Kementerian Luar Negeri

Atas seluruh arah kebijakan tersebut, Kementerian Luar Negeri telah merumuskan strategi-strategi dari setiap arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Arah Kebijakan 1, **Penguatan diplomasi maritim dalam rangka menjaga kedaulatan Indonesia** memiliki **10 strategi**, antara lain:
 - i. Mempertahankan integritas wilayah NKRI
 - ii. Memperkuat kerja sama sub-kawasan (BIMP-EAGA, IMT-GT, dsb) untuk meningkatkan konektivitas Indonesia

- iii. Mendorong kerja sama pengamanan, pengelolaan, dan perlindungan sumber daya alam hayati non hayati laut.
 - iv. Mendorong peningkatan kerja sama dalam bidang keamanan dan keselamatan laut, serta *search and rescue*, penanganan bencana di laut, serta perlindungan lingkungan laut.
 - v. Meningkatkan upaya-upaya diplomasi dalam mewujudkan kerangka kerja sama maritim yang mendukung perwujudan konektivitas maritim dan mengedepankan jati diri Indonesia sebagai negara maritim
 - vi. Memperjuangkan kepentingan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam forum-forum internasional, termasuk masa keketuaan Indonesia di IORA.
 - vii. Mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan Indonesia, termasuk perbatasan darat dengan 3 negara dan perbatasan laut dengan 10 negara tetangga dan pemberlakuan serta pendaftarannya ke PBB.
 - viii. Memanfaatkan klaim Indonesia berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atas hak-hak berdaulat di Landas Kontinen di luar 200 mil laut.
 - ix. Mendorong kerja sama dan penanganan berbagai kasus pelanggaran wilayah serta meningkatkan upaya pengamanan perbatasan.
 - x. Membantu pembangunan kekuatan pertahanan maritim melalui diplomasi pertahanan dengan berbagai negara sahabat.
- 2) Arah Kebijakan 2, **Penguatan kepemimpinan Indonesia di ASEAN**, memiliki **11 strategi**, antara lain:
- i. Memperjuangkan prakarsa Indonesia di ASEAN dan forum terkait ASEAN dalam mewujudkan kawasan yang aman, stabil, dan sejahtera, sejalan dengan tujuan dan target ketiga pilar masyarakat ASEAN
 - ii. Mendorong kohesivitas dan sentralitas ASEAN dalam hubungan internal dan eksternal, serta terlibat aktif dalam penyelesaian masalah regional dan internasional
 - iii. Memantapkan implementasi Traktat *South East Asia Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ) dan *Plan of Action 2013-2017* serta mendorong ratifikasi Protokol Traktat SEANWFZ oleh *Nuclear-Weapon States* (AS, Inggris, RRT, Rusia, Prancis)
 - iv. Mendorong universalisasi TAC (*Treaty of Amity and Cooperation*) dan implementasi *Bali Declaration of the East Asia Summit on the Principles for Mutually Beneficial Relations* (*Bali Principles*) ke kawasan yang lebih luas.
 - v. Meningkatkan peran Indonesia dalam pengelolaan konflik kawasan termasuk sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui mekanisme ASEAN, terutama mendorong implementasi secara efektif dan menyeluruh *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (*DoC*), termasuk penyelesaian *code of conduct in the South China Sea*, serta melalui upaya-upaya *preventive diplomacy*.
 - vi. Meningkatkan peran aktif Indonesia dalam mendorong kerja sama ASEAN dengan mitra wicara ASEAN serta *ASEAN-led mechanisms* secara lebih produktif dan konstruktif bagi penciptaan arsitektur kawasan yang sejalan dengan kepentingan nasional.
 - vii. Meningkatkan kerja sama ASEAN dengan pihak eksternal secara lebih sejajar dan saling menguntungkan.
 - viii. Menyelesaikan visi Masyarakat ASEAN 2025 beserta dokumen pendukung (*attendant documents*) mengenai ketiga pilar Masyarakat ASEAN, serta mengawal pelaksanaannya sejalan dengan kepentingan nasional.

- ix. Mendorong penguatan Sekretariat ASEAN yang mampu melaksanakan mandatnya secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi ASEAN.
 - x. Memperkuat fungsi koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia tentang Masyarakat ASEAN, memantapkan posisi nasional dalam pertemuan ASEAN, serta implementasi kesepakatan ASEAN di tingkat nasional.
 - xi. Meningkatkan peran dan kontribusi Pusat Studi ASEAN dan lembaga *think tank* lainnya dalam perumusan kebijakan nasional terkait kerja sama ASEAN.
- 3) Arah Kebijakan 3: **Peningkatan peran dan pengaruh Indonesia sebagai negara *middle power* di dunia internasional**, memiliki **17 strategi**, antara lain:
- i. Memperkuat postur diplomasi sehingga mampu meredam ancaman disintegrasi bangsa di berbagai forum internasional yang relevan.
 - ii. Memperkuat diplomasi dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah, khususnya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
 - iii. Meningkatkan kontribusi Indonesia untuk mencapai “Visi 4000 *Peacekeepers*” pada misi pemeliharaan perdamaian (*peacekeeping*) PBB dan dukungan terhadap bina perdamaian (*peacebuilding*).
 - iv. Memperkuat kerja sama internasional dalam mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia, antara lain: senjata pemusnah massal, penyakit menular, degradasi lingkungan, perubahan iklim, kelangkaan air, krisis pangan dan energi.
 - v. Mengintensifkan kerja sama bilateral, regional dan internasional dalam menanggulangi kejahatan transnasional, seperti: korupsi, terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan orang, perdagangan gelap narkoba, perompakan perdagangan senjata ilegal, *illegal fishing*.
 - vi. Meningkatkan kerja sama peningkatkan kapasitas melalui skema Kerja sama Selatan-Selatan (KSS) dan triangular untuk mendukung politik luar negeri.
 - vii. Memperkuat dialog dan kerja sama konstruktif di bidang pemajuan demokrasi, pemajuan dan perlindungan HAM, toleransi agama, di forum Internasional.
 - viii. Memperkuat peran Indonesia sebagai negara *Middle Power* dengan memanfaatkan forum terkait di antaranya melalui MIKTA.
 - ix. Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global dan internasional melalui penguatan kerja sama bilateral, khususnya dengan negara mitra strategis dan organisasi intra dan antar kawasan.
 - x. Menggunakan diplomasi publik yang berkarakter *soft power* Indonesia melalui kerja sama kebudayaan, pemberian beasiswa, *people to people contact*, jejaring diaspora Indonesia.
 - xi. Mengelola dan memperkuat jaringan alumni asing penerima beasiswa Indonesia dan jaringan alumni WNI penerima beasiswa asing untuk memperkuat diplomasi publik.
 - xii. Mendorong peran Indonesia dalam perumusan norma-norma/aturan-aturan kerja sama ekonomi dan perdagangan internasional.
 - xiii. Menguatkan peran Indonesia dalam koordinasi kebijakan ekonomi global melalui forum G-20.
 - xiv. Memajukan kepentingan Indonesia dalam kerja sama internasional dalam melakukan implementasi agenda pembangunan global pasca 2015.

- xv. Mendorong keterwakilan WNI pada badan-badan internasional baik secara profesional maupun melalui keterlibatan aktif dalam kelompok kerja dan penyusunan norma-norma di tingkat internasional.
 - xvi. Memanfaatkan keanggotaan Indonesia pada forum internasional untuk menyuarakan dan mendorong inisiatif-inisiatif baru yang mengakomodasi kepentingan nasional dan kepentingan negara berkembang.
 - xvii. Meningkatkan kerja sama konektivitas kawasan melalui IORA, APEC, ASEAN, ASEM, FEALAC.
- 4) Arah Kebijakan 4, **Peningkatan diplomasi ekonomi**, memiliki **12 strategi**, antara lain:
- i. Memperkuat diplomasi ekonomi pada forum bilateral, regional, dan global untuk menopang kemandirian ekonomi nasional.
 - ii. Memperluas dan meningkatkan akses pasar bagi produk barang dan jasa Indonesia, serta meningkatkan arus investasi, dan pariwisata ke Indonesia, serta mendorong perlindungan pasar domestik dari praktek perdagangan yang tidak adil.
 - iii. Memanfaatkan forum regional dan internasional untuk membentuk norma dan arsitektur keuangan, investasi, dan perdagangan internasional yang memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Indonesia.
 - iv. Memperkuat diplomasi Indonesia pada pasar prospektif.
 - v. Mendorong masuknya investasi asing pada sektor-sektor prioritas bagi Indonesia, serta memfasilitasi dan mendorong serta melindungi investasi Indonesia di luar negeri. Perhatian khusus diberikan pada Perjanjian Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) bilateral serta kelanjutan perundingan perjanjian investasi.
 - vi. Merumuskan saran kebijakan terkait pengelolaan perundingan berbagai kerja sama ekonomi seperti *Preferential Tariff Agreement* (PTA), *Free Trade Agreement* (FTA), *Comprehensive Economic Partnership* (CEPA) termasuk *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) sesuai dengan kepentingan nasional.
 - vii. Memberikan saran kebijakan terkait implementasi kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
 - viii. Mendorong implementasi kerja sama perdagangan dan investasi yang berimbang dan berkelanjutan.
 - ix. Meningkatkan pemanfaatan keanggotaan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan organisasi terkait komoditi, hak kekayaan intelektual (HKI) dan pembangunan industri guna membuka akses pasar, peningkatan perlindungan HKI, dan pengembangan SDM nasional.
 - x. Menguatkan peran Indonesia dalam perundingan untuk pembentukan dan peninjauan kembali kerangka hukum internasional (*international legal framework*) di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, baik di tingkat bilateral, regional dan multilateral.
 - xi. Memanfaatkan forum kerja sama global dan APEC untuk mendorong perlindungan dan pemanfaatan kekayaan laut melalui pembahasan isu *blue economy* serta mendorong implementasi prakarsa Indonesia di bawah forum kerja sama global dan APEC *Initiative on Mainstreaming Ocean-related Issues* (MOI).
 - xii. Mendorong perluasan potensi perdagangan, investasi, pariwisata, dan pengembangan infrastruktur maritim serta pengelolaan kekayaan maritim.

- 5) Arah Kebijakan 5, **Peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri serta pemberdayaan diaspora**, memiliki **5 strategi**, antara lain:
- Memastikan kehadiran negara dalam pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri dengan mengedepankan kepedulian dan keberpihakan.
 - Memperkuat sistem kelembagaan Perlindungan WNI/BHI di dalam negeri dan luar negeri dengan memperhatikan aspek pencegahan (*prevention*), deteksi dini (*early detection*), dan perlindungan secara cepat dan tepat (*immediate response*).
 - Memperkuat Diplomasi Perlindungan WNI/BHI di luar negeri melalui pembentukan instrumen internasional untuk perlindungan WNI, upaya pengampunan bagi WNI yang terancam hukuman mati, dan repatriasi WNI serta meneruskan kebijakan moratorium penempatan TKI sektor domestik.
 - Mengoptimalisasikan langkah-langkah pencegahan, deteksi dini dan cepat tanggap dalam penyelesaian kasus WNI/BHI di luar negeri.
 - Memperkuat sinergi dalam Perlindungan WNI di luar negeri dengan Komunitas Indonesia di luar negeri serta pelayanan dan pemberdayaan Diaspora dan Masyarakat Madani.
- 6) Arah Kebijakan 6, **Peningkatan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan**, memiliki **4 strategi**, antara lain:
- Meningkatkan efektivitas kebijakan luar negeri melalui perumusan kebijakan yang melibatkan peran/partisipasi/ dukungan para pemangku kepentingan.
 - Mendorong implementasi komitmen nasional atas kesepakatan bilateral, regional, interregional, multilateral, dan global.
 - Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap tindak lanjut/ implementasi oleh pemangku kepentingan atas hasil diplomasi atau kesepakatan internasional.
 - Mewujudkan Kerangka Kelembagaan dan Regulasi yang melibatkan pemangku kepentingan serta harmonisasi kebijakan antar K/L.
- 7) Arah Kebijakan 7, **peningkatan kapasitas organisasi, tata kelola yang akuntabel, serta kompetensi SDM Kementerian Luar Negeri yang berbasis teknologi informasi**, memiliki **11 strategi**, antara lain:
- Melakukan penataan organisasi yang adaptif, peningkatan evaluasi kinerja, dan tata kelola Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.
 - Memperkuat sistem manajemen kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dengan dukungan IT.
 - Mewujudkan manajemen SDM Kementerian Luar Negeri yang berbasis kompetensi dan kinerja yang transparan dan akuntabel.
 - Memperluas kerja sama pendidikan dan pelatihan diplomasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Kementerian Luar Negeri.
 - Meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Luar Negeri melalui pengembangan keahlian khusus yang mendukung penyelenggaraan hubungan luar negeri, dengan prioritas pada keahlian seperti *asset recovery*, hukum laut internasional, dan riset strategis.
 - Melakukan akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
 - Membangun sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi berdasarkan *IT Master Plan* Kementerian Luar Negeri.

- viii. Meningkatkan anggaran Kementerian Luar Negeri dan memperkuat sistem penganggaran berbasis kinerja.
 - ix. Memperkuat penganggaran yang mengadopsi pengarusutamaan gender.
 - x. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang dan pendorong kinerja Kementerian Luar Negeri.
 - xi. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan.
- 8) Arah Kebijakan 8, **perwujudan kebijakan luar negeri yang berkualitas melalui penguatan peraturan perundangan nasional yang terkait dengan penyelenggaraan diplomasi**, memiliki **4 strategi**, antara lain:
- i. Mendorong penyempurnaan norma hukum nasional yang mengatur mengenai diplomasi, hubungan luar negeri dan pembentukan perjanjian internasional, khususnya melalui revisi UU tentang Hubungan Luar Negeri dan UU tentang Perjanjian Internasional.
 - ii. Menggagas serta mengawal pembentukan norma-norma hukum nasional yang bersentuhan serta berimplikasi dengan hubungan luar negeri.
 - iii. Memantapkan peran Kementerian Luar Negeri sebagai penjuru dalam perumusan kebijakan luar negeri dan sebagai fungsi koordinator dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri.
 - iv. Menguatkan peran Kementerian Luar Negeri sebagai juru runding dan penasihat hukum (*legal adviser*) dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri, pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional dengan negara asing dan/atau organisasi internasional.

Terkait bidang politik luar negeri “menguatnya peran Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular” dan “meningkatnya promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM” telah diakomodir pada Arah Kebijakan 3 Kementerian Luar Negeri, yaitu **“Peningkatan peran dan pengaruh Indonesia sebagai negara *middle power* di dunia internasional”**.

III.2.3. Program Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri untuk 5 (lima) tahun mendatang akan melaksanakan 11 (sebelas) program dan 56 (lima puluh enam) kegiatan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

Pada kurun waktu 2015—2019, Kementerian Luar Negeri juga akan melakukan perubahan program untuk Perwakilan RI, sehingga kinerja Perwakilan RI dapat tercerminkan pada suatu program tersendiri yaitu **Program Pelaksanaan Tugas Diplomasi di Perwakilan RI**. Program eksisting yang ada pada tahun 2010—2014 menjadikan Program Perwakilan RI berada dibawah **“Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri”**, dengan posisi tersebut, kinerja Perwakilan RI sebagai ujung tombak kinerja diplomasi Indonesia tidak tercerminkan dalam suatu program tersendiri. Proses pembahasan program untuk perwakilan RI masih berlangsung sampai dengan Renstra ini ditetapkan. Adapun program eksisting yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama ASEAN

Program ini memiliki 2 (dua) sasaran program, yaitu:

1. **Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat**, dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan.
2. **Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri terkait kesepakatan ASEAN**, dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase masyarakat yang memahami integrasi Masyarakat ASEAN, dan Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional.

2) Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral

Program ini memiliki 3 (tiga) sasaran program, yaitu:

1. **Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral**, dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral.
2. **Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral**, dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral.
3. **Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku kepentingan nasional** dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional.

3) Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Program ini memiliki 1 (satu) sasaran program, yaitu: **Peran Indonesia di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang meningkat**, dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase kesepakatan kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti dan Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dan ditindaklanjuti pada forum kerjasama intrakawasan.

4) Program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional

Program ini memiliki 1 (satu) sasaran program, yaitu **Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional**, dengan 3 (tiga) indikator yaitu Persentase jumlah perundingan yang berhasil diselenggarakan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah di laut serta penegasan dan pengelolaan batas wilayah di darat; Persentase hasil perundingan atau perjanjian internasional di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral yang disepakati; serta Persentase produk hukum yang diselesaikan.

5) Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa

Program ini memiliki 1 (satu) sasaran program, yaitu **Peran Indonesia di Kawasan Amerika dan Eropa yang meningkat**, dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase kesepakatan kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti, dan Persentase prakarsa/rekomendasi yang diterima dan ditindaklanjuti pada forum kerja sama intrakawasan.

6) Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri

Program ini memiliki 1 (satu) sasaran program, yaitu **Rekomendasi kebijakan hubungan luar negeri yang berkualitas**, dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang disetujui oleh Pimpinan Kementerian Luar Negeri.

7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

Program ini memiliki 4 (empat) sasaran program, yaitu:

1. **Meningkatnya kualitas pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri serta pemberdayaan Diaspora**, dengan 3 (tiga) indikator yaitu, Indeks sistem kelembagaan perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri; Indeks penguatan diplomasi perlindungan; dan Indeks penyelesaian kasus WNI/BHI di Luar Negeri.
2. **Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan Kekonsuleran**, dengan 1 (satu) indikator yaitu, Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran.
3. **Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan Keprotokolan**, dengan 1 (satu) indikator yaitu, Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan Protap yang berlaku.
4. **Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan Fasilitas Diplomatik**, dengan 1 (satu) indikator yaitu, Persentase penyelesaian dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP.

8) Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik

Program ini memiliki 1 (satu) sasaran program yaitu **Menguatnya Citra Positif Indonesia melalui peningkatan peran Indonesia di dunia Internasional**, dengan 4 (empat) indikator yaitu, Persentase pemberitaan positif oleh media massa dan kehumasan badan publik terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia; Persentase dukungan konstituen domestik/internasional dan negara sahabat terhadap aset-aset diplomasi publik Indonesia; Persentase respon positif terhadap bantuan kerjasama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular; dan Persentase respon positif terhadap pengamanan perwakilan asing dan kegiatan internasional di Indonesia.

9) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian Luar Negeri

Program ini memiliki 2 (dua) sasaran program, yaitu

1. **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis, efektif & efisien**, dengan 1 (satu) indikator yaitu, Persentase Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja.
2. **Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan**, dengan 1 (satu) indikator yaitu, Persentase Laporan Keuangan (LK) Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

10) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri

Program ini memiliki 1 (satu) sasaran program, yaitu **Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis pelaksanaan diplomasi Indonesia**, dengan 5 (lima) indikator, yaitu Indeks kepuasan pegawai; Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Luar Negeri; Opini BPK; Persentase pejabat yang telah memenuhi

standar kompetensi jabatan; Persentase penerapan cetak biru teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri.

- 11) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri**, Program ini memiliki 1 (satu) sasaran program, yaitu **Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis dalam sarana dan prasarana Kementerian Luar Negeri**, dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase sarana dan prasarana Kemlu dan Perwakilan RI yang dipenuhi.

III.3. Kerangka Regulasi

Berdasarkan urgensi pembentukan berdasarkan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan hubungan luar negeri, adanya kebutuhan untuk melakukan kalibrasi prioritas kebijakan luar negeri, keperluan untuk menyempurnakan materi muatan hubungan luar negeri, serta adanya Inisiatif revisi UU Hubungan Luar Negeri dari Dewan Perwakilan Rakyat, maka Kementerian Luar Negeri dalam kurun waktu tahun 2015—2019 memerlukan arah kerangka regulasi dan kebutuhan regulasi untuk melakukan Revisi atas Undang Undang (UU) Hubungan Luar Negeri No. 37 tahun 1999.

III.4. Kerangka Kelembagaan

Sampai dengan Renstra ini disahkan, Kementerian Luar Negeri sedang melakukan perumusan kerangka kelembagaan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian kinerja sebagaimana tertuang pada Renstra Kementerian Luar Negeri 2015—2019.

PENUTUP

Sesuai dengan amanat konstitusi, politik luar negeri dan diplomasi Indonesia diabdikan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Dalam melaksanakan amanat konstitusi tersebut, Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif. Dalam kurun waktu 2015-2019, diplomasi Indonesia akan menonjolkan karakter sebagai negara maritim, diplomasi Indonesia akan terkoneksi dengan kepentingan rakyat (*diplomacy for the people*), diplomasi Indonesia akan membumi (*down to earth*), dan diplomasi Indonesia akan dilakukan secara tegas dan bermartabat.

Sebagai implementasi visi dan misi Presiden RI-Wakil Presiden RI, maka prioritas politik luar negeri Indonesia telah serta merta tercantumkan ke dalam dokumen Rencana Strategi Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019 dengan 1 visi, 3 misi, 3 tujuan utama, 8 sasaran strategis, 8 arah kebijakan dengan strategi beserta alat ukur dan targetnya.

Pencapaian target kinerja Kementerian Luar Negeri dan keberhasilan pelaksanaan politik luar negeri secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh kondisi dalam dan luar negeri. Oleh karena itu peran, keterlibatan, dan sinergisitas seluruh komponen *stakeholders* dan pemanfaatan seluruh lini kekuatan (*multi-track diplomacy*) harus dilaksanakan demi peningkatan pencapaian kinerja pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
KEMENTERIAN LUAR NEGERI							6,251,765	6,876,942	7,564,636	8,321,099	9,153,209			
	1	Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh					50,422	55,465	61,011	67,112	73,823	Ditjen. Kerja Sama ASEAN, Ditjen. Informasi dan Diplomasi Publik, Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen. Amerika dan Eropa, Ditjen. Multilateral, Perwakilan RI		
		Indikator Kinerja: Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional	89%	90%	92%	94%	95%							
	2	Nilai manfaat ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri						4,485,216	4,933,738	5,427,111	5,969,822	6,566,805	Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen. Amerika dan Eropa, Perwakilan RI	
		Indikator Kinerja: 1. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan	78	80	81	83	85							
		2. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia	25	35	45	55	65							
		3. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	23	30	38	50	60							
	3	Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional						26,615	29,277	32,204	35,425	38,967	Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen. Amerika dan Eropa, Ditjen. Kerja Sama ASEAN, Ditjen. Multilateral, Perwakilan RI	
		Indikator Kinerja: Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh <i>stakeholders</i> dalam negeri	70%	72.4%	75%	77.3%	79.4%							
	4	Pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik						25,474	28,021	30,824	33,906	37,296	Ditjen. Protokol dan Konsuler	
		Indikator Kinerja: Hasil evaluasi pelayanan publik oleh KemenPAN dan RB	Baik	Baik	Amat Baik	Amat Baik	Amat Baik							
	5	Kebijakan luar negeri yang berkualitas						8,177	8,995	9,894	10,884	11,972	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	
		Indikator Kinerja: Persentase rekomendasi yang diimplementasikan	70%	70%	70%	70%	70%							
	6	Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat						49,622	54,584	60,043	66,047	72,652	Ditjen. Hukum dan Perjanjian Internasional, Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen. Amerika dan Eropa, Ditjen. Kerja Sama ASEAN, Ditjen. Multilateral, Perwakilan RI	
		Indikator Kinerja: Indeks diplomasi maritim dan perbatasan	39%	54.43%	66.29%	81.89%	97.50%							
	7	Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat						17,442	19,186	21,105	23,215	25,537	Ditjen. Kerja Sama ASEAN, Perwakilan RI	
		Indikator Kinerja: Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima	90%	92%	93%	94%	95%							
	8	Peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat						100,210	110,231	121,254	133,380	146,717	Ditjen. Informasi dan Diplomasi Publik, Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen. Amerika dan Eropa, Ditjen. Multilateral, Perwakilan RI	
		Indikator Kinerja: Indeks peran Indonesia	88%	89%	90%	90%	91%							
	9	Diplomasi ekonomi yang kuat						30,974	34,071	37,478	41,226	45,349	Ditjen. Hukum dan Perjanjian Internasional, Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen. Amerika dan Eropa, Ditjen. Multilateral, Ditjen. Informasi dan Diplomasi Publik, Sekretariat Jenderal, Perwakilan RI	
		Indikator Kinerja: Indeks diplomasi ekonomi	67%	72%	79%	85%	92%							
	10	Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI dan diaspora yang prima						81	89	98	108	119	Ditjen. Protokol dan Konsuler, Perwakilan RI	
		Indikator Kinerja: Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora	58%	60.7%	65.1%	70%	74.8%							
	11	Monitoring hasil diplomasi yang efektif						33,769	37,145	40,860	44,946	49,441	Ditjen. Kerja Sama ASEAN, Ditjen. Hukum dan Perjanjian Internasional, Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen. Amerika dan Eropa, Ditjen. Multilateral, Ditjen. Informasi dan Diplomasi Publik, Sekretariat Jenderal	
		Indikator Kinerja: Persentase deviasi efektifitas perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri	10%	10%	10%	10%	10%							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	12 SDM yang berkompeten						454,773	500,251	550,276	605,303	665,834	Sekretariat Jenderal, Sekretariat Seluruh Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat BPPK	
	Indikator Kinerja: Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	50%	60%	70%	80%	90%							
	13 Organisasi dan tata kelola yang baik						172,667	189,934	208,928	229,820	252,802	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Seluruh Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat BPPK	
	Indikator Kinerja: Nilai kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenlu	60	75	85	90	95							
	14 Lingkungan kerja yang kondusif						262,107	288,318	317,150	348,865	383,751	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Seluruh Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat BPPK	
	Indikator Kinerja: Indeks kepuasan pegawai	65%	70%	75%	80%	85%							
	15 Sistem informasi manajemen yang terintegrasi						237,510	261,261	287,388	316,126	347,739	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Seluruh Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat BPPK	
	Indikator Kinerja: 1. Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	1,5	2	2,5	3	3,5							
	2. Indeks Pemingkatan e-Government Indonesia (PEGI)	3,35	3,45	3,55	3,65	3,75							
	16 Anggaran yang optimal						296,704	326,375	359,012	394,914	434,405	Sekretariat Jenderal, Sekretariat Seluruh Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat BPPK, Perwakilan RI	
	Indikator Kinerja: Persentase penyerapan anggaran dan realisasi kinerja	95%	96%	97%	98%	99%							
Program: Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN							60,204	66,224	72,847	80,132	88,145	Ditjen KS ASEAN	
	Sasaran Program:Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat												
	1 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan	90%	92%	93%	94%	95%							
	Sasaran Program: Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri terkait kesepakatan ASEAN												
	2 Persentase masyarakat yang memahami integrasi Masyarakat ASEAN	85%	87%	89%	90%	92%							
	3 Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat Nasional	97%	97%	97%	97%	97%							
Kegiatan: Kerjasama ASEAN bidang Politik dan Keamanan							11,770	12,947	14,241	15,666	17,232	Dit. Politik Keamanan ASEAN	
	Sasaran Kegiatan: Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat di bidang politik dan keamanan												
	1 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan pilar politik dan kerja sama ASEAN	90%	92%	94%	95%	96%							
	Sasaran Kegiatan: Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri terkait kesepakatan ASEAN di bidang dan keamanan												
	2 Persentase responden yang memahami kerja sama politik dan keamanan ASEAN	87%	88%	89%	90%	90%							
	3 Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di bidang Politik dan Keamanan di tingkat Nasional	97%	97%	97%	97%	97%							
Kegiatan: Kerjasama ASEAN bidang Ekonomi							6,764	7,441	8,185	9,003	9,903	Dit. Kerjasama Ekonomi ASEAN	
	Sasaran Kegiatan: Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat di bidang ekonomi												
	1 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan pilar ekonomi ASEAN	85%	85%	87%	87%	90%							
	Sasaran Kegiatan: Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri												
	2 Persentase responden yang memahami kerja sama ekonomi ASEAN	85%	85%	87%	87%	90%							
	3 Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di bidang Ekonomi di tingkat Nasional	85%	87%	90%	92%	94%							
Kegiatan: Kerjasama ASEAN bidang Fungsional							5,605	6,165	6,782	7,460	8,206	Dit. Kerjasama Fungsional ASEAN	
	Sasaran Kegiatan: Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat di bidang sosial budaya												
	1 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan pilar sosial budaya ASEAN	85%	87%	89%	91%	93%							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Kegiatan: Kerja sama ASEAN dengan mitra wicara dan antar kawasan	Sasaran Kegiatan: Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri											Dit. Mitra Wicara dan Antarkawasan ASEAN	
	2 Persentase Responden yang memahami kerja sama Sosial Budaya ASEAN	85%	87%	89%	91%	93%							
	3 Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di bidang Sosial Budaya di tingkat Nasional	98%	98%	98%	98%	98%							
	Sasaran Kegiatan: Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat dalam kerja sama dengan						5,687	6,255	6,881	7,569	8,326		
	1 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan dengan negara mitra wicara dan organisasi regional/ internasional	85%	86%	87%	88%	89%							
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kerjasama ASEAN	Sasaran Kegiatan: Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri											Setditjen KS Asean	
	2 Persentase responden yang memahami kerja sama ASEAN dengan negara mitra wicara dan organisasi regional/ internasional	82%	85%	87%	88%	89%							
	Sasaran Kegiatan: Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri												
	1 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan dengan negara mitra wicara dan organisasi regional/ internasional	85%	86%	87%	88%	89%							
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam rangka penguatan												
	2 Persentase Realisasi Anggaran Ditjen Kerja Sama ASEAN	90%	91%	93%	94%	95%							
	3 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Kerja Sama ASEAN	75	76	77	78	79							
	4 Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	60%	63%	65%	67%	70%							
	5 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Ditjen Kerja Sama ASEAN	80%	82%	84%	86%	88%							
	Sasaran Kegiatan: Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri						30,379	33,417	36,758	40,434	44,478		
Program: Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	Sasaran Program: Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral						544,585	599,043	658,947	724,842	797,326	Ditjen Multilateral	
	1. Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral	90%	90%	90%	90%	90%							
	Sasaran Program: Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral												
	2. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral	85%	85%	85%	85%	85%							
	Sasaran Program: Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku												
	3. Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional	90%	90%	90%	90%	90%							
Kegiatan: Kerjasama Multilateral Terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara, dan Terorisme	Sasaran Kegiatan: Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral						11,867	13,054	14,359	15,795	17,375	Dit. KIPS	
	1. Persentase posisi Indonesia yang diterima di forum multilateral bagi terwujudnya pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4.000 personel pada Tahun 2019	90%	90%	90%	90%	90%							
	2. Persentase posisi Indonesia yang diterima di forum multilateral mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional,	90%	90%	90%	90%	90%							
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral												
	1 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral bagi terwujudnya pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4.000 personel pada Tahun 2019	100%	100%	100%	100%	100%							
	2 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan	90%	90%	90%	90%	90%							
	Sasaran Kegiatan: Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku												
	1 Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional bagi terwujudnya pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4.000 personel pada Tahun	90%	90%	90%	90%	90%							
	2 Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata	90%	90%	90%	90%	90%							
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral						6,386	7,025	7,727	8,500	9,350		
	1. Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk penanganan isu residual	90%	90%	90%	90%	90%							
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral												
Kegiatan: Kerjasama Multilateral Terkait Isu Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	2. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral mengenai penanganan isu pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk penanganan isu residual Timor Timur,	85%	85%	85%	85%	85%						Dit. HAM dan Kemanusiaan	
	Sasaran Kegiatan: Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku												
	3. Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional mengenai penanganan isu pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk penanganan isu	60%	60%	60%	60%	60%							
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral						3,770	4,147	4,562	5,018	5,520		
	1. Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi dan hak kekayaan intelektual	90%	90%	90%	90%	90%							
Kegiatan: Kerjasama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual	Sasaran Kegiatan: Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral											Dit. PPIH	
	1. Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi dan hak kekayaan intelektual	90%	90%	90%	90%	90%							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Kegiatan: Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup	Sasaran Kegiatan: Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral											Dit. PELH	
	2. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi dan hak kekayaan intelektual	85%	85%	85%	85%	85%							
	Sasaran Kegiatan: Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku												
	3. Persentase rekomendasi tentang perdagangan, perindustrian, investasi dan hak kekayaan intelektual untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional	90%	90%	90%	90%	90%							
							4,097	4,507	4,957	5,453	5,999		
Kegiatan: Kerjasama Multilateral Terkait Isu Sosial, Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	Sasaran Kegiatan: Peningkatan peran Indonesia dalam forum multilateral											Dit. Sosbud & OINB	
	1. Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral terkait isu pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup	85%	85%	85%	85%	85%							
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral												
	2. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral terkait isu pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup	80%	80%	80%	80%	80%							
	Sasaran Kegiatan: Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku												
	3. Persentase rekomendasi tentang pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional	85%	85%	85%	85%	85%							
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Multilateral							513,167	564,484	620,932	683,026	751,328	Setditjen Multilateral	
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral												
	1. Persentase keberhasilan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada organisasi internasional	75%	75%	75%	75%	75%							
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral												
	2. Persentase rekomendasi yang dikeluarkan dalam mengkaji dan memverifikasi pembayaran kontribusi dan status keanggotaan Indonesia pada OI	90%	90%	90%	90%	90%							
	3. Persentase meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai peluang bekerja pada OI yang Indonesia menjadi anggotanya	90%	90%	90%	90%	90%							
Program: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Sasaran Kegiatan: Optimalisasi Anggaran											Ditjen Asia Pasifik dan Afrika	
	4. Persentase realisasi anggaran Ditjen Multilateral	90%	90%	90%	90%	90%							
	Sasaran Kegiatan: Organisasi dan tata kelola yang baik												
	5. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Multilateral	70	71	72	73	74							
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen												
	6. Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	60%	65%	70%	75%	80%							
	Sasaran Kegiatan: Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku												
	7. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Ditjen Multilateral	95%	95%	95%	95%	95%							
							132,707	145,978	160,576	176,633	194,297		
	Sasaran Program: Peran Indonesia di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang meningkat												
	1. Presentase kesepakatan kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti	70%	72%	74%	76%	78%							
	2. Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dan ditindaklanjuti pada forum kerjasama intrakawasan	80%	80%	80%	80%	80%							
Kegiatan: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika							4,099	4,509	4,960	5,456	6,001	Dit. Afrika	
	Sasaran Kegiatan: Peran Indonesia di Kawasan Afrika yang meningkat												
	1. Jumlah Kesepakatan Kerjasama	8	10	12	14	16							
Kegiatan: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah							3,919	4,311	4,742	5,216	5,738	Dit. Asia Selatan dan Tengah	
	Sasaran Kegiatan: Peran Indonesia di Kawasan Asia Selatan dan Tengah yang meningkat												

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	1. Jumlah kesepakatan kerjasama	10	10	11	11	12							
	2. Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan	22	22	22	23	23							
Kegiatan: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar							7,078	7,786	8,564	9,421	10,363	Dit. Asia Timur dan Pasifik	
	Sasaran Kegiatan: Peran Indonesia di Kawasan Asia Timur dan Pasifik yang meningkat												
	1. Jumlah kesepakatan kerjasama	21	22	22	22	22							
	2. Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan	25	26	27	29	30							
Kegiatan: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah							3,630	3,993	4,392	4,831	5,315	Dit. Timur Tengah	
	Sasaran Kegiatan: Peran Indonesia di Kawasan Timur Tengah yang meningkat												
	1. Jumlah kesepakatan kerjasama	7	8	9	9	9							
	2. Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan	29	29	29	29	29							
Kegiatan: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika							85,366	93,902	103,293	113,622	124,984	Dit. KIK Aspasaf	
	Sasaran Kegiatan: Peran Indonesia di forum kerja sama intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika yang												
	1. Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum kerjasama intrakawasan	64	64	64	65	65							
	2. Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia pada forum kerjasama intrakawasan yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan	23	23	23	24	24							
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika							28,616	31,477	34,625	38,088	41,896	Setditjen Aspasaf	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Aspasaf												
	1. Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Asia Pasifik Afrika	95%	95%	95%	95%	95%							
	2. Nilai evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	68,01	69	70	71	72							
	3. Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	75%	76%	77%	78%	79%							
	4. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	95%	95%	95%	95%	95%							
	5. Persentase pemenuhan laporan dan penyediaan data	98%	98%	98%	98%	98%							
Program: Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional							39,117	43,029	47,332	52,065	57,272	Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional	
	Sasaran Program: Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian												
	1. Persentase Jumlah Perundingan yang berhasil diselenggarakan dalam rangka Upaya Penyelesaian Penetapan Batas Wilayah di Laut serta Penegasan dan Pengelolaan batas	70%	70%	70%	70%	70%							
	2. Persentase Hasil Perundingan atau Perjanjian Internasional di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan baik di tingkat Bilateral, Regional maupun Multilateral	80%	80%	80%	80%	80%							
	3. Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan	70%	70%	70%	70%	70%							
Kegiatan: Diplomasi melalui Pelaksanaan Hukum							2,765	3,041	3,345	3,680	4,048	Dit. Hukum	
	Sasaran Kegiatan: Penguatan Diplomasi melalui Pelaksanaan Hukum												
	1. Persentase Jumlah Kasus yang Diselesaikan	65%	65%	65%	65%	65%							
	2. Persentase Pendapat Hukum yang Disampaikan kepada Stakeholders	90%	90%	90%	90%	90%							
	3. Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan	70%	70%	70%	70%	70%							
Kegiatan: Diplomasi Terkait Dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan							10,918	12,010	13,211	14,532	15,985	Dit. PI Polkamwil	
	Sasaran Kegiatan: Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan												
	1. Persentase Jumlah Perundingan yang Berhasil Diselenggarakan dalam rangka Upaya Penyelesaian Penetapan Batas Wilayah di Laut serta Penegasan dan Pengelolaan Batas	70%	75%	80%	85%	90%							
	2. Persentase Pendapat Hukum di Bidang Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan yang Disampaikan kepada Stakeholders	80%	80%	80%	80%	80%							
	3. Persentase Tingkat Pemahaman Stakeholders atas Substansi Hukum di bidang Politik, Keamanan, Kewilayahan dan Kelautan	80%	80%	80%	80%	80%							
	4. Persentase Dokumen Hasil Perundingan atau Perjanjian Internasional di Bidang Politik, Keamanan, Kewilayahan dan Kelautan yang Disepakati	80%	80%	80%	80%	80%							
Kegiatan: Diplomasi Terkait Dengan Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya serta Pengelolaan Naskah Perjanjian Internasional							6,069	6,676	7,343	8,077	8,885	Dit. Ekosobud	
	Sasaran Kegiatan: Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya												
	1. Persentase Pendapat Hukum Dibidang Ekonomi dan Sosial Budaya yang Disampaikan ke stakeholders	80%	80%	80%	80%	80%							
	2. Persentase Pengelolaan dan Pelayanan Perjanjian Internasional di Treaty Room	80%	80%	80%	80%	80%							
	3. Persentase Hasil Perundingan atau Perjanjian Internasional di bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan baik ditingkat Bilateral, Regional maupun Multilateral	80%	80%	80%	80%	80%							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional							19,366	21,302	23,433	25,776	28,353		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis lainnya Direktorat Jenderal												
	1. Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	100%	100%	100%	100%	100%							
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Ditjen HPI	B (70,05)	71	72	73	74							
	3. Persentase Pegawai yang Ditempatkan Sesuai Dengan Kompetensinya	85%	85%	85%	85%	85%							
	4. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ditjen HPI	95%	95%	95%	95%	95%							
Program: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa							44,345	48,780	53,658	59,023	64,926	Ditjen Amerika dan Eropa	
	Sasaran Program: Peran Indonesia di Kawasan Amerika dan Eropa yang meningkat												
	1. Persentase kesepakatan kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti	70%	72%	74%	76%	78%							
Kegiatan: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia							2,645	2,909	3,200	3,520	3,872	Dit. Amerika Selatan dan Karibia	
	Sasaran Kegiatan: Peran Indonesia di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia yang meningkat												
	1. Jumlah Kesepakatan Kerjasama	14	14	14	14	14							
Kegiatan: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Utara dan Tengah							4,018	4,420	4,862	5,348	5,882	Dit. Amerika Utara dan Tengah	
	Sasaran Kegiatan: Peran Indonesia di Kawasan Amerika Utara dan Tengah yang meningkat												
	1. Jumlah kesepakatan kerjasama	12	12	12	12	12							
Kegiatan: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Barat							2,767	3,044	3,348	3,683	4,051	Dit. Eropa Barat	
	Sasaran Kegiatan: Peran Indonesia di Kawasan Eropa Barat yang meningkat												
	1. Jumlah kesepakatan kerjasama	27	27	27	27	27							
Kegiatan: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Tengah dan Timur							2,764	3,041	3,345	3,679	4,047	Dit. Eropa Tengah dan Timur	
	Sasaran Kegiatan: Peran Indonesia di Kawasan Eropa Tengah dan Timur yang meningkat												
	1. Jumlah kesepakatan kerjasama	15	15	15	15	15							
Kegiatan: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa							3,173	3,490	3,839	4,223	4,646	Dit. KSI Amerop	
	Sasaran Kegiatan: Peran Indonesia di forum kerja sama intrakawasan Amerika dan Eropa yang												
	1. Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan	17	17	17	17	17							
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Amerop							28,978	31,876	35,064	38,570	42,427	Setditjen Amerop	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat												
	1. Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	95%	95%	95%	95%	95%							
	2. Nilai evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	B (66)	67	68	69	70							
	3. Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	75%	75%	75%	75%	75%							
	4. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	100%	100%	100%	100%	100%							
Program: Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri							28,621	31,483	34,632	38,095	41,904	BPPK	
	Sasaran Program: Rekomendasi kebijakan hubungan luar negeri yang berkualitas												
	1. Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang disetujui oleh Pimpinan Kemlu	70%	70%	70%	70%	70%							
Kegiatan: Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri Terkait Isu-isu Pada Kawasan Amerika dan Eropa							2,700	2,970	3,267	3,594	3,953	P3K2 Amerika dan Eropa	
	Sasaran Kegiatan: 1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri untuk Kawasan Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	70%							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Kegiatan: Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri Terkait Isu-isu Pada Kawasan Kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika							2,849	3,134	3,447	3,792	4,171	P3K2 Asia Pasifik dan Afrika	
	Sasaran Kegiatan: 1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri untuk Kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	70%							
Kegiatan: Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri Terkait Isu-isu Pada Organisasi Internasional PBB dan Non-PBB							2,628	2,891	3,180	3,498	3,848	P3K Organisasi Internasional	
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Kualitas Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional PBB dan Non-PBB yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	70%							
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan							20,444	22,488	24,737	27,211	29,932	Sekretariat BPPK	
	Sasaran Kegiatan:												
	1. Persentase rekomendasi terkait data dan isu khusus yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	70%							
	2. Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Publik yang Mendukung Kegiatan Kajian	80%	82%	84%	86%	90%							
	3. Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	75%	75%	75%	80%	90%							
	4. Persentase jumlah peserta sosialisasi/diseminasi kebijakan yang mampu menjawab 60% pertanyaan dengan benar dalam survey tingkat pemahaman	70%	75%	80%	85%	90%							
	5. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPPK	B	B	A	A	AA							
	6. Persentase jumlah terbitan Majalah/jurnal berkala di BPPK beserta pendistribusiannya yang terlaksana tepat pada waktunya	65%	70%	75%	80%	85%							
	7. Persentase realisasi penyerapan anggaran untuk layanan perkantoran BPPK	85%	87%	89%	92%	95%							
	8. Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana yang memadai bagi peningkatan kinerja BPPK	90%	90%	90%	90%	90%							
Program: Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Keksuleran							135,973	149,571	164,528	180,980	199,079	Ditjen Protokol dan Konsuler	
	Sasaran Program: Meningkatnya kualitas pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri												
	1. Indeks sistem kelembagaan perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	11,6	12,3	13,1	13,9	14,7							
	2. Indeks penguatan diplomasi perlindungan	8,7	9,2	9,8	10,5	11,0							
	3. Indeks penyelesaian kasus WNI/BHI di Luar Negeri	37,7	40,1	42,6	45,3	47,8							
	Sasaran Program: Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan Keksuleran												
	4. Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan keksuleran	90%	93%	95%	98%	100%							
	Sasaran Program: Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan Keprotokolan												
	5. Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan Protap yang berlaku	95%	95%	95%	95%	95%							
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan Fasilitas Diplomatik												
	6. Persentase penyelesaian dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP	95%	95%	95%	95%	95%							
Kegiatan: Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pelayanan Fasilitas Diplomatik							4,099	4,509	4,960	5,456	6,002	Dit. Fasilitas Diplomatik	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas												
	1. ISO Pelayanan Penerbitan ID Card	95%	95%	95%	95%	95%							
	2. Persentase Tingkat Pemahaman Peserta Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diskusi, Sarasehan, dan Pembekalan Fasilitas Diplomatik	80%	80%	80%	80%	80%							
	3. Persentase penyelesaian dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP	95%	95%	95%	95%	95%							
Kegiatan: Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pelayanan Keksuleran							18,275	20,102	22,112	24,323	26,756	Dit. Keksuleran	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas												
	1. Persentase penyelesaian dokumen keksuleran secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
	2. Persentase tingkat pemahaman peserta yang nilainya di atas 80	80%	82%	83%	84%	85%							
	3. Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan keksuleran	90%	90%	90%	90%	90%							
	4. Persentase publik yang mendapat respon	100%	100%	100%	100%	100%							
	5. Persentase WNA bermasalah yang difasilitasi	80%	80%	80%	80%	80%							
Kegiatan: Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pelayanan di bidang Perlindungan WNI dan BHI							81,000	89,100	98,010	107,811	118,592	Dit. PWNI/BHI	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas												
	1. Indeks sistem kelembagaan perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	11,6	12,3	13,1	13,9	14,7							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	2 Indeks penguatan diplomasi perlindungan	8,7	9,2	9,8	10,5	11,0							
	3 Indeks penyelesaian kasus WNI/BHI di Luar Negeri	37,7	40,1	42,6	45,3	47,8							
Kegiatan: Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pelayanan Keprotokolan							3,100	3,410	3,751	4,126	4,539	Dit. Protokol	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas												
	1. Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan protap yang berlaku	95%	96%	97%	98%	98%							
	2. Persentase tingkat pemahaman atas Keprotokolan	100%	100%	100%	100%	100%							
	3. Persentase jumlah dokumen keprotokolan yang diterbitkan tepat waktu	95%	96%	97%	98%	98%							
Kegiatan: Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan dukungan manajemen dan teknis administrasi serta kualitas prasarana sarana dan kelembagaan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler							29,500	32,450	35,695	39,264	43,190	Setditjen Protokol dan Konsuler	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan dukungan manajemen dan												
	1. Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	100%	100%	100%	100%	100%							
	2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	100%	100%	100%	100%	100%							
	3. Persentase Penyelesaian Laporan Sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%							
	4. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	70	71	72	73	74							
	5. Persentase Pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensinya	100%	100%	100%	100%	100%							
	6. Persentase penyelesaian ucapan selamat dan simpati dari dan kepada Presiden, Wapres/Menlu sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%							
Program: Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik							66,468	73,115	80,426	88,469	97,316	Ditjen IDP	
	Sasaran Program: Menguatnya Citra Positif Indonesia melalui peningkatan peran Indonesia di												
	1. Persentase pemberitaan positif oleh media massa dan kehumasan badan publik terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia	90%	90%	90%	90%	90%							
	2. Persentase dukungan konstituen domestik/internasional dan negara sahabat terhadap aset-aset diplomasi publik Indonesia	90%	90%	90%	90%	90%							
	3. Persentase respon positif terhadap bantuan kerjasama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular	75%	77%	79%	80%	80%							
	4. Persentase respon positif terhadap pengamanan perwakilan asing dan kegiatan internasional di Indonesia	75%	77%	79%	80%	80%							
Kegiatan: Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran diplomasi publik							20,200	22,220	24,442	26,887	29,575	Dit. Diplomasi Publik	
	Sasaran Kegiatan: Menguatnya citra positif Indonesia melalui peningkatan peran diplomasi publik												
	1. Persentase dukungan konstituen domestik/internasional dan negara sahabat terhadap aset-aset diplomasi publik Indonesia	90%	90%	90%	90%	90%							
Kegiatan: Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang informasi dan pelayanan media							5,578	6,136	6,749	7,424	8,167	Dit. Infomed	
	Sasaran Kegiatan: Menguatnya citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang												
	1. Persentase pemberitaan positif oleh media massa dan kehumasan badan publik terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia	90%	90%	90%	90%	90%							
	2. Persentase partisipasi publik dalam media digital (situs portal dan media sosial) Kemlu	60%	60%	60%	60%	60%							
	3. Persentase pemenuhan kebutuhan informasi dan pengelolaannya	90%	90%	90%	90%	90%							
Kegiatan: Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang keamanan informasi, personalia dan kerja sama keamanan diplomatik							2,737	3,010	3,311	3,643	4,007	Dit. Keamanan Diplomatik	
	Sasaran Kegiatan: Menguatnya citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang												
	1. Jumlah rekomendasi dalam rangka peningkatan standar pengamanan perwakilan RI	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi							
	2. Jumlah rekomendasi terkait pengamanan perwakilan asing dan kegiatan internasional di Indonesia	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi							
Kegiatan: Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang pemberian bantuan kerjasama teknik yang berkualitas							8,302	9,132	10,045	11,049	12,154	Dit. Kerja Sama Teknik	
	Sasaran Kegiatan: Menguatnya citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang												
	1. Persentase respon positif terhadap bantuan kerjasama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular	75%	75%	75%	75%	75%							
	2. Jumlah kegiatan penguatan/promosi/peluasan jaringan kemitraan dalam rangka pemberian bantuan kerjasama teknik selatan-selatan dan triangular	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan							
Kegiatan: Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik							29,651	32,616	35,878	39,466	43,412	Setditjen IDP	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat												
	1. Persentase realisasi anggaran Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	95%	95%	95%	95%	95%							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	2. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	75	75	76	76	76							
	3. Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	95%	95%	95%	95%	95%							
	4. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%							
Program: Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kementerian Luar Negeri							25,492	28,041.1	30,845.2	33,929.7	37,322.7	Inspektorat Jenderal	
	Sasaran Program: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis,												
	1. Persentase Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja.	80%	82%	84%	86%	88%							
	Sasaran Program: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta												
	2. Persentase Laporan Keuangan (LK) Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	90%	91%	92%	93%	95%							
	Sasaran Program: Meningkatnya efektifitas kegiatan pengendalian untuk memberikan keyakinan												
	3. Nilai indeks akuntabilitas kinerja dan penganggaran Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang memenuhi unsur Sistem Pengendalian Intern	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5							
	Sasaran Program: Meningkatnya dukungan manajemen yang baik dalam mendukung keberhasilan pengawasan intern Kemlu												
Kegiatan: Pengawasan Perwakilan RI Wilayah Asia dan Kementerian Luar Negeri I							1,145	1,259	1,385	1,524	1,676	Inspektorat Wilayah I	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis,												
	1. Persentase satuan kerja di Inspektorat Wilayah I yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja	80%	82%	84%	86%	88%							
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta												
	2. Persentase Laporan Keuangan (LK) Satuan Kerja yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I.	90%	91%	92%	93%	95%							
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektifitas kegiatan pengendalian untuk memberikan keyakinan												
	3. Persentase kepuasan Satuan Kerja atas pelaksanaan konsultasi, pendampingan dan koordinasi oleh Inspektorat Wilayah I	70%	72%	75%	78%	80%							
Kegiatan: Pengawasan Perwakilan RI Wilayah Eropa dan Kementerian Luar Negeri II							1,414	1,555	1,710	1,881	2,070	Inspektorat Wilayah II	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis,												
	1. Persentase satuan kerja di Inspektorat Wilayah II yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja	80%	82%	84%	86%	88%							
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta												
	2. Persentase Laporan Keuangan (LK) Satuan Kerja yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II	90%	91%	92%	93%	95%							
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektifitas kegiatan pengendalian untuk memberikan keyakinan												
	3. Persentase kepuasan Satuan Kerja atas pelaksanaan konsultasi, pendampingan dan koordinasi oleh Inspektorat Wilayah II	70%	72%	75%	78%	80%							
	4. Nilai indeks akuntabilitas kinerja dan penganggaran Satuan Kerja di Wilayah II yang memenuhi unsur Sistem Pengendalian Intern	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5							
Kegiatan: Pengawasan Perwakilan RI Wilayah Afrika dan Timur Tengah dan Kementerian Luar Negeri III							1,312	1,443	1,587	1,746	1,921	Inspektorat Wilayah III	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis,												
	1. Persentase satuan kerja di Inspektorat Wilayah III yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja	80%	82%	84%	86%	88%							
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta												
	2. Persentase Laporan Keuangan (LK) Satuan Kerja yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III	90%	91%	92%	93%	95%							
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektifitas kegiatan pengendalian untuk memberikan keyakinan												
	3. Persentase kepuasan Satuan Kerja atas pelaksanaan konsultasi dan pendampingan Inspektorat Wilayah III	70%	72%	75%	78%	80%							
	4. Nilai indeks akuntabilitas kinerja dan penganggaran Satuan Kerja di Wilayah III yang memenuhi unsur Sistem Pengendalian Intern	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5							
Kegiatan: Pengawasan Perwakilan RI Wilayah Amerika, Karibia, Pasifik dan Kenterian Luar Negeri IV							1,496	1,646	1,810	1,991	2,190	Inspektorat Wilayah IV	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis,												
	1. Persentase satuan kerja di Inspektorat Wilayah IV yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja	80%	82%	84%	86%	88%							
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta												
	2. Persentase Laporan Keuangan (LK) Satuan Kerja yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	90%	91%	92%	93%	95%							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektifitas kegiatan pengendalian untuk memberikan keyakinan											Sekretariat Inspektorat Jenderal	
	3. Persentase kepuasan Satuan Kerja atas pelaksanaan konsultasi, pendampingan dan koordinasi oleh Inspektorat Wilayah IV	70%	72%	75%	78%	80%							
	4. Nilai indeks akuntabilitas kinerja dan penganggaran Satuan Kerja di Wilayah IV yang memenuhi unsur Sistem Pengendalian Intern	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5							
							20,125	22,138	24,352	26,787	29,466		
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen yang baik dalam mendukung keberhasilan											Sekretariat Inspektorat Jenderal	
	1. Persentase laporan analisis temuan dan tindak lanjut yang dapat dimanfaatkan stakeholders terkait	80%	82%	85%	88%	90%							
	2. Persentase APIP Itjen yang memiliki kompetensi "Baik"	85%	85%	85%	85%	85%							
	3. Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja dan anggaran	90%	91%	92%	93%	95%							
	4. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Inspektorat Jenderal	90%	90%	90%	90%	90%						Sekretariat Jenderal	
							4,835,339	5,318,873	5,850,760	6,435,836	7,079,420		
	Sasaran Program: Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis pelaksanaan diplomasi												
	1. Indeks kepuasan pegawai	55%	58%	60%	63%	65%							
Program: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	2. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Luar Negeri	70 (B)	72	75	76	77						Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Biro Perencanaan dan Organisasi	
	3. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	4. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	50%	55%	60%	65%	70%							
	5. Persentase penerapan cetak biru teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri	55%	68%	82%	96%	97%							
Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	Sasaran Program: Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis dalam sarana dan prasarana						338,691	372,560	409,816	450,797	495,877	Biro Perlengkapan	
	1. Persentase sarana dan prasarana Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang dipenuhi	95%	95%	95%	95%	95%							
							17,833	19,617	21,578	23,736	26,110	BAM	
	Sasaran Kegiatan: Dukungan Layanan Pimpinan Kemlu yang Optimal												
Kegiatan: Pelayanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya Menteri Luar Negeri	1. Indeks tingkat kepuasan Pimpinan Kemlu atas dukungan layanan BAM	60 < x ≤ 80 (Memuaskan)	60 < x ≤ 80 (Memuaskan)	60 < x ≤ 80 (Memuaskan)	60 < x ≤ 80 (Memuaskan)	60 < x ≤ 80 (Memuaskan)							
	2. Persentase tindak lanjut arahan Pimpinan Kemlu yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%							
							17,314	19,045	20,950	23,045	25,349	BAKP	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya												
Kegiatan: Pelayanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya Kementerian dan Perwakilan	1. Persentase jumlah kegiatan Satker Kemlu serta Lembaga Pemerintah Lainnya dan Lembaga Non Pemerintah yang digabungkan	80%	83%	85%	85%	85%							
	2. Persentase calon Kepala Perwakilan dan Konsul Kehormatan yang menyatakan "puas" atas pelayanan BAKP	80%	80%	83%	85%	85%							
	3. Persentase naskah peraturan dan produk hukum yang masuk dari Satker/Perwakilan sesuai dengan standar format Kementerian Luar Negeri	80%	82%	85%	85%	85%							
	4. Persentase Perwakilan yang menyatakan "puas" atas pengiriman kantong diplomatik	80%	83%	85%	85%	85%							
	5. Volume arsip yang telah ditertibkan	1000 Meter Lari	1000 Meter Lari	1000 Meter Lari	1000 Meter Lari	1000 Meter Lari						Biro Kepegawaian	
	6. Persentase kepuasan Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Utusan Khusus Presiden terhadap pelayanan BAKP	80%	83%	85%	85%	85%	259,002	284,903	313,393	344,732	379,205		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis pengelolaan sumber daya												
	1. Persentase peningkatan pemahaman pegawai Kementerian Luar Negeri mengenai peraturan dan kebijakan kepegawaian	65%	70%	75%	75%	75%							
Kegiatan: Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri	2. Persentase peningkatan kepuasan pegawai terhadap pelayanan Biro Kepegawaian	50%	60%	70%	80%	90%						Biro Kepegawaian	
	3. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	60%	70%	80%	90%	95%							
	4. Tersusunnya dokumen pedoman evaluasi atas kinerja diplomat	1	-	-	-	-							
	5. Tersusunnya dokumen hasil evaluasi atas kinerja diplomat	1	1	1	1	1							
Kegiatan: Pengelolaan Keuangan Kementerian Luar Negeri							155,012	170,514	187,565	206,321	226,954	Biro Keuangan	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen keuangan dan teknis keuangan												
	1. Persentase penyelesaian dokumen keuangan tepat waktu	80%	85%	90%	90%	95%							
	2. Persentase kasus-kasus keuangan yang ditindakdanjuti	80%	85%	90%	90%	95%							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	3. Persentase serapan anggaran Kemlu	80%	85%	90%	95%	95%							
Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Penguatan Organisasi Kementerian Luar Negeri							12,050	13,255	14,581	16,039	17,643	Biro Perencanaan dan Organisasi	
	Sasaran Kegiatan: Kinerja dan anggaran Kementerian Luar Negeri yang berfokus strategi organisasi												
	1. Jumlah satker yang memiliki evaluasi AKIP "baik"	22	32	42	52	62							
	2. Persentase unit organisasi yang menerapkan sistem kerja	80%	82%	85%	88%	90%							
	3. Persentase deviasi pagu anggaran Kemlu antara perencanaan dan dokumen anggaran	5%	5%	5%	5%	5%							
	4. Persentase penyelesaian penataan organisasi di Kemlu dan Perwakilan RI	80%	82%	85%	88%	90%							
Kegiatan: Pengelolaan Perlengkapan serta Urusan							85,668	94,235	103,659	114,025	125,427	Biro Perlengkapan	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis dalam sarana dan prasarana												
	1. Persentase administrasi dan operasional perkantoran yang diselenggarakan	100%	100%	100%	100%	100%							
	2. Persentase penatausahaan BMN yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%							
	3. Persentase Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek dan Sosialisasi dalam rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	100%	100%	100%	100%	100%							
	4. Persentase sarana dan prasarana Kemlu dan Perwakilan RI yang dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%							
Kegiatan: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik							55,280	60,808	66,889	73,577	80,935	Pusdiklat	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Teknis Pelaksanaan Diplomasi												
	1. Persentase Kelulusan Peserta Diklat yang Memiliki Nilai Minimal 70	98%	98%	98%	98%	98%							
	2. Persentase Hasil Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	90%							
	3. Persentase (%) Tingkat Kepuasan Peserta atas Pelaksanaan Diklat	80%	82%	84%	86%	87%							
	4. Persentase Kerjasama Lembaga Diklat dengan Negara atau Lembaga Lain	75%	75%	75%	78%	80%							
Kegiatan: Dukungan Sistem Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri							93,652	103,017	113,319	124,651	137,116		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Teknis Melalui Sistem Informasi dan												
	1. Persentase Rencana Induk Strategis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang Diterapkan	10%	20%	30%	40%	50%						Puskom	
	2. Indeks Kualitas Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,2	4,63	4,71	4,79	4,87						Puskom, Lembaga Sandi Negara, Badan Intelijen Nasional (BIN)	
	3. Rasio Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Perwakilan RI	0,8	0,85	0,9	0,95	1						Puskom	
	4. Indeks Kepuasan Pengguna Aplikasi Sistem Informasi	2,7	2,7	2,8	2,85	2,9						Puskom	
	5. Persentase Tingkat Penerapan Keamanan Informasi dan Komunikasi	60%	70%	80%	90%	100%							
	6. Persentase Dukungan Manajemen di Pusat Komunikasi	85%	88%	91%	93%	95%						Puskom	
Kegiatan: Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional Perwakilan RI							4,478,217	4,926,039	5,418,643	5,960,507	6,556,557	Perwakilan RI	
	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama												
	1. Persentase rekomendasi hasil kajian komprehensif Perwakilan RI yang ditindaklanjuti <i>stakeholders</i>	70%	75%	80%	85%	90%							
	2. Persentase rencana aksi sebagai implementasi dari dokumen perjanjian/kesepakatan	70%	75%	80%	85%	90%							
	3. Persentase peningkatan <i>trade, tourism and investment</i>	5%	5%	5%	5%	5%							
	4. Persentase Permasalahan/Kasus/Bantuan hukum WNI dan BHI di Luar negeri yang diselesaikan	80%	80%	80%	80%	80%							

LAMPIRAN 2: MATRIKS KERANGKA REGULASI

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET SELESAI
1	2	3	4	5	6
1	Revisi atas UU Hubungan Luar Negeri No. 37 tahun 1999	1. Perkembangan dan dinamika penyelenggaraan hubungan luar negeri 2. Kebutuhan untuk melakukan kalibrasi prioritas kebijakan luar negeri 3. Keperluan untuk menyempurnakan materi muatan hubungan luar negeri 4. Inisiatif revisi UU Hubungan Luar Negeri dari Dewan Perwakilan Rakyat	Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri	DPR, KEMHUMHAM, KEMDAGRI, KEMENKOPOLHUKAM, PEMDA	2017

